KI HAJAR DEWANTARA

n Direktorat
ebudayaan
.0598
AR
k
53/92

EPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
EK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1989

MILIK DEP. P DAN K
TIDAK DIPERDAGANGKAN

KI HAJAR DEWANTARA

Oleh :

Darsiti Soeratman

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1989

PT GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA

Nomor Index : 153/92
Tanggal terima : 29-4-92
Tanggal catat : 29-4-92
Berhadiah dari : Hadiah
Nomor buku : 92 SoE li.
Kopi ke : 1

Penyunting :

- Sutrisno Kutoyo

Cetakan I : Tahun 1981
Cetakan II : Tahun 1989
Copyright pada Proyek IDSN

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kenejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang di-

perlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, September 1981
Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. HARYATI SOEBADIO
NIP. 130119123

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan biografi Pahlawan Nasional, yang sudah memperoleh pengesahan dari pemerintah. Adapun ketentuan umum bagi Pahlawan Nasional, ialah seseorang yang pada masa hidupnya, karena terdorong oleh rasa cinta tanah air, sangat berjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar negeri ataupun sangat berjasa baik dalam lapangan politik, ketatanegaraan, sosial-ekonomi, kebudayaan, maupun dalam lapangan ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan Indonesia.

Tujuan utama dari penulisan biografi Pahlawan Nasional ini ialah membina persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan kebanggaan nasional, mengungkapkan nilai-nilai budaya bangsa, dan melestarikan jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan bangsa dan negara.

Di samping itu penulisan biografi Pahlawan Nasional yang juga bertujuan untuk mengungkapkan kisah kehidupan para Pahlawan Nasional yang berguna sebagai suri teladan bagi generasi penerus dan masyarakat pada umumnya. Penulisan itu sendiri merupakan kegiatan memelihara kenangan tentang para Pahlawan Nasional yang telah memberikan dharma baktinya kepada nusa dan bangsa. Sekaligus juga bermakna sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kesadaran dan minat akan sejarah bangsa dan tanah air.

Selanjutnya penulisan biografi Pahlawan Nasional merupakan usaha dan kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pribadi warga negara, serta manfaat bagi pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, September 1981

Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN		vii
KATA PENGANTAR		ix
DAFTAR ISI		xi
PENDAHULUAN		1
Bab I	**Lingkungan Dan Suasana Pendidikan**	6
Bab II	**Munculnya Elit Baru**	22
Bab III	**Perintis Kemerdekaan Nasional**	33
Bab IV	**Hidup Di Tanah Pengasingan**	51
Bab V	**Kegiatan-kegiatan Selama di Tanah Pengasingan**	65
Bab VI	**Kembali ke Medan Perjuangan**	80
Bab VII	**Bapak Pendidikan Nasional**	96
Bab VIII	**Melawan "Ordonansi Sekolah Liar"**	111
Bab IX	**Menghadapi Berbagai Macam Masalah**	129
Bab X	**Di Tengah-tengah Keluarga**	141

Bab XI Kesimpulan 153
Daftar Pustaka 156
Lampiran 160

PENDAHULUAN

Nama Ki Hajar Dewantara telah dikenal secara luas baik di dalam dan di luar negeri. Di Indonesia, khususnya di kalangan para pendidik, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh yang berjuang untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan: "Pendidikan apakah yang paling cocok untuk anak-anak Indonesia?" Jawaban yang paling tepat untuk masalah tersebut ialah: Pendidikan Nasional.

Usaha menyelenggarakan pendidikan nasional tersebut dimulai pada 3 Juli 1922, dengan mendirikan Perguruan Kebangsaan Taman Siswa yang pertama-tama di Yogyakarta. Pada waktu itu nama yang dipakai adalah: *Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa.* Sejak saat didirikan perguruan tersebut, nama Ki Hajar Dewantara tidak dipisahkan lagi dari Taman Siswa. Ia adalah Bapak Taman Siswa, Bapak Pendidikan Nasional. Sudah barang tentu usahanya menyelenggarakan perguruan nasional itu merupakan perjuangan yang sangat berani, karena pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Belanda adalah pendidikan kolonial.

Perguruan kebangsaan Taman Siswa sangat menarik para cendekiawan dalam dan luar negeri. Banyak di antara mereka

datang di Yogyakarta dan di cabang-cabang Taman Siswa lainnya untuk mempelajari, mengerti dan mendalami cita-cita, konsepsi dan hasil usaha Ki Hajar Dewantara dan kawan-kawannya. Ada yang datang dari negeri Belanda, Inggris, Australia, Jepang, Amerika Serikat dan lainnya. Bahkan pada jaman penjajahan Belanda, seorang pujangga besar dari India, Rabindranath Tagore, menyempatkan diri untuk mengunjungi Taman Siswa di Yogyakarta.

Melalui perguruan Taman Siswa Ki Hajar Dewantara mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Nusa dan Bangsa. Taman Siswa melaksanakan kerja duta dan kerja membantu. Tugas yang pertama dimaksudkan untuk mendidik rakyat agar berjiwa kebangsaan dan berjiwa merdeka, untuk menjadi kader-kader yang sanggup dan mampu mengangkat derajat Nusa dan Bangsanya sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang merdeka. Tugas yang kedua, kerja membantu dimaksudkan untuk membantu perluasan pendidikan dan pengajaran yang pada saat itu sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, sedang jumlah sekolah yang disediakan oleh Pemerintah Belanda sangat terbatas.

Agar dapat leluasa melaksanakan apa yang telah digariskan sesuai dengan dasar-dasar pendidikan nasional maka Taman Siswa berjalan dengan kekuatan sendiri, tidak menerima bantuan atau subsidi dari Pemerintah Kolonial. Sebagai konsekuensinya, maka pejuang-pejuang Taman Siswa harus berani hidup sederhana penuh pengabdian. Ki Hajar Dewantara selalu memperingatkan bahwa tugas para pemimpin Taman Siswa ialah terjun ke dalam kalangan masyarakat, menyatukan diri dengan hidup dan penghidupan rakyat serta menggerakkan rakyat ke arah kemajuan.

Karena Taman Siswa selalu berusaha untuk bersatu dengan rakyat, maka dalam waktu yang singkat Ki Hajar Dewantara mendapatkan pengikut yang banyak. Di beberapa kota segera

didirikan cabang-cabang baru yang makin lama makin meluas sampai ke luar Jawa. Taman Siswa bukan suatu perguruan yang diperuntukkan anak-anak Jawa saja, karena ternyata di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Ambon terdapat cabang-cabangnya. Pada waktu sekarang perguruan Taman Siswa hanya tersebar di kota-kota dan kabupaten di Jawa, Sumatra dan Kalimantan saja.

Semboyan-semboyan: *Suci Tata Ngesti Tunggal, Tut Wuri Andayani, Mengabdi kepada Sang Anak* merupakan pegangan bagi pamong-pamong Taman Siswa dalam melaksanakan tugasnya. Ternyata bahwa semboyan-semboyan itu, terutama yang pertama dan yang ketiga mampu mengalahkan semangat kemurkaan diri pada para pemimpinnya, sehingga dengan demikian dapat melindungi organisasi Taman Siswa dari bahaya perpecahan.

Pada masa penjajahan, Taman Siswa dianggap sebagai gerombolan yang membahayakan kedudukan penguasa asing. Sebab itu sejak lahirnya perguruan tersebut terus menerus hidup dalam ancaman bahaya. Salah satu ancaman yang sangat berbahaya ialah Peraturan Pemerintah Kolonial mengenai Pengajaran yang dikenal sebagai "Ordonansi Sekolah Liar". Sadar akan bahaya besar itu, Ki Hajar segera tampil ke depan untuk melawan Ordonansi tersebut. Perjuangannya didukung oleh segenap partai politik, pergerakan sosial, pergerakan wanita, golongan agama; semuanya berdiri serentak di sekeliling Ki Hajar Dewantara.

Ki Hajar Dewantara adalah cucu Sri Paku Alam III. Semula bernama R.M. Suwardi Suryaningrat. Gelar kebangsawanannya ditanggalkan ketika ia harus menjalani hukuman pengasingan di Negeri Belanda. Kemudian sejak 23 Pebruari 1928, tepat pada usia lima windu atau 40 tahun menurut perhitungan tahun Jawa, namanya diganti menjadi Ki Hajar Dewantara. Dengan

demikian maka Ki Hajar tidak merasa terpisah dari rakyat banyak.

Menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, bangsawan harus seorang yang tidak boleh hidup bermalas-malasan, karena segala-galanya akan datang sendiri. Seorang bangsawan harus berusaha agar cara hidupnya dicontoh oleh orang banyak yang harus ia pimpin. Seorang bangsawan adalah seorang ksatria, seorang pejuang yang harus memajukan dunia ini dengan menjauhkan diri dari segala yang jelek.

Pendapat Ki Hajar Dewantara mengenai arti bangsawan tidaklah jauh berbeda dari pendapat Kartini – tokoh kemajuan wanita Indonesia – yang menyatakan bahwa bangsawan itu berarti berbudi. Ia mengemukakan pendapatnya itu dalam surat yang dikirimkan kepada Nn. Zeehandelaar (1899) sebagai berikut:

> *"Bagi saya hanya ada dua macam bangsawan; bangsawan pikiran dan bangsawan budi. Tiada yang lebih gila dan bodoh pada pemandangan saya daripada melihat orang yang membanggakan soal keturunannya. Bangsawan dan berbudi, boleh dikatakan dua perkataan yang searti."*

Ki Hajar Dewantara tidak hanya berjuang dalam bidang pendidikan. Sebelumnya ia telah berjuang untuk kemerdekaan negerinya melalui bidang politik dan jurnalistik. Ki Hajar mengikuti dari dekat kebangunan Nasional dimulai dari Budi Utomo, Sarikat Islam dan *Indische Partij*, di mana ia ikut bekerja secara aktif.

Pada 26 April 1959, Ki Hajar Dewantara wafat sesudah melaksanakan tugas luhur, mengabdi kepada bangsanya sejak berusia 24 tahun. Ia adalah Perintis Kemerdekaan, Perintis Pendidikan Nasional dan Perintis Kebudayaan Nasional. Karena jasanya yang besar itu ia diangkat oleh Pemerintah R.I. sebagai Pahlawan Bangsa. Menjelang wafatnya, dalam keadaan sakit,

ia masih menulis sebuah brosur tentang "Demokrasi dan Kepemimpinan".

Kegemarannya pada bidang jurnalistik sangat menguntungkan kita semua yang ditinggalkan, karena hasil karya itu merupakan sumber yang tidak ternilai artinya untuk dapat mengerti siapa Ki Hajar Dewantara, bagaimana ajarannya, pandangan hidupnya dan perjuangannya. Sayang sekali belum semua tulisan beliau dapat terkumpulkan. Namun demikian Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa telah berhasil mengumpulkan sebagian hasil karya Pahlawan tersebut dan telah dibukukan. Jilid pertama meliputi Pendidikan dan jilid kedua mengenai Kebudayaan.

Sebuah dokumentasi tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara yang berupa film penting pula artinya, terutama bagi angkatan muda. Film dokumentasi ini dibuat oleh Perusahaan Film Negara, dimulai seak 1956 dan diakhiri dengan pemakaman jenazah Pahlawan Nasional ini pada 29 April 1959. Selain dokumentasi berupa tulisan-tulisan dan film, barang-barang bersejarah yang dipergunakan Ki Hajar Dewantara semasa hidupnya disimpan di dalam museum "Dewantara Kirtigrhia".

Dalam mengemukakan biografi Pahlawan Nasional Ki Hajar Dewantara ini, penulis menganggap perlu untuk menyisipkan gambaran masyarakat Indonesia dan kebijaksanaan Pemerintah Kolonial yang relevan dengan penulisan biografi tersebut. Juga mengenai keadaan di Negeri Belanda sedikit disinggung, karena Ki Hajar pernah tinggal di negeri dingin tersebut sebagai orang buangan. Seluruh uraian tambahan itu merupakan ilustrasi yang maksudnya untuk memperjelas perjuangan Pahlawan Nasional, Ki Hajar Dewantara.

BAB I LINGKUNGAN DAN SUASANA PENDIDIKAN

Lingkungan keluarga mempunyai arti dan pengaruh yang besar bagi pelaksanaan pendidikan. Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang pendidik mengemukakan betapa pentingnya tiga pusat pendidikan ialah alam atau lingkungan keluarga, alam perguruan dan alam pemuda. Masing-masing pusat itu mempunyai tugas sendiri-sendiri, tetapi antara tiga pusat tersebut harus ada hubungan yang rapat.[1] Sudah barang tentu untuk pendewasaan anak didik, sikap dan tenaga si pendidik sangat penting artinya di samping faktor lingkungan atau pusat-pusat pendidik tersebut.

Adapun tugas tiga pusat pendidikan itu adalah sebagai berikut:

1. Alam keluarga, pusat pendidikan yang pertama dan yang terpenting. Tugasnya mendidik budi pekerti dan laku sosial.
2. Alam perguruan, pusat pendidikan yang berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran dan memberi ilmu pengetahuan.

3. Alam pemuda, membantu pendidikan baik yang menuju kepada kecerdasan jiwa maupun budi pekerti.[2]

Sistem pendidikan yang mengemukakan adanya tiga pusat pendidikan tersebut dinamakan "Sistem Tripusat".[3]

Alam Keluarga merupakan pusat pendidikan yang terpenting karena pengaruh hidup keluarga itu terus menerus dialami oleh anak-anak, lebih-lebih dalam periode "masa peka", yaitu antara usia 3½ sampai 7 tahun. Masa peka ini merupakan waktu yang sangat penting dalam hidupnya kanak-kanak. Waktu itu boleh dinamakan waktu "terbukanya jiwa" kanak-kanak. Dalam waktu itu kanak-kanak mudah menerima kesan-kesan serta pengaruh-pengaruh dari luar jiwanya.[4]

Mulai kecil sampai dewasa anak-anak tinggal di tengah-tengah keluarganya. Keadaan dan lingkungan keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap tabiat dan budi pekerti anak. Sebagai contoh dapat kita bandingkan beberapa orang sarjana. Mereka mempunyai kedudukan yang sama dalam masyarakat, akan tetapi tabiatnya tidak sama. Perbedaan ini selain karena faktor pembawaan, juga karena pengaruh lingkungan keluarga. Mereka yang waktu kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang religius, tentu mempunyai kecintaan pada agama lebih daripada orang-orang yang waktu kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang tidak perduli terhadap agama. Orang yang pada waktu kecilnya berada di tengah-tengah keluarga yang menyukai kesenian, biasanya juga senang pada kesenian.

Bagaimanakah pendidikan yang diterima oleh Ki Hajar Dewantara dalam alam keluarga? Untuk mengetahui hal ini perlu dikenal lebih dahulu termasuk keluarga manakah Ki Hajar dan bagaimana lingkungan keluarga tersebut. Pengalaman dan penderitaan seseorang turut menentukan pribadinya.

Ki Hajar Dewantara, pada waktu mudanya bernama R.M. Suwardi Suryaningrat, lahir pada hari Kamis Legi, tanggal 2 Puasa 1818 atau 2 Mei 1889. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat, putera Kanjeng Gusti Pangeran Hadipati Haryo Suryosasraningrat yang bergelar Sri Paku Alam III. R.M. Suwardi kawin dengan R.Aj. Sutartinah, putera puteri G.P.H. Sasraningrat, adik G.P.H. Suryaningrat. Dengan demikian Ki Hajar dan Nyi Hajar Dewantara adalah saudara sepupu. Baik Ki Hajar maupun Nyi Hajar, keduanya mempunyai saudara yang banyak jumlahnya. Untuk jelasnya di bawah ini disertakan daftar keturunan Sri Paku Alam III.

Kanjeng Gusti Hadipati Haryo Suryosasraningrat atau Sri Paku Alam III mempunyai putera tujuh orang:

1. K.P.H. Purwoseputro
2. B.R.M.H. Suryohudoyo
3. K.P.H. Suryaningrat (ayah Ki Hajar Dewantara)
4. B.R.M.H. Suryokusumo
5. B.R. Ayu Nototaruno
6. G.P.H. Sasraningrat (ayah Nyi Hajar Dewantara)
7. G.B.R. Ayu Hadipati Paku Alam VI

Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat berputera sembilan orang:

1. R.M. Suryopranoto
2. R.M. Suryosisworo
3. R. Ayu Suwartiyah Bintang
4. R. Ayu Suwardinah Suryopratiknyo
5. R.M. Suwardi (Ki Hajar Dewantara)
6. R.M. Joko Suwarto (K.R.T. Suryaningrat)
7. R.M. Suwarman Suryaningrat
8. R.M. Surtiman Suryodiputro
9. R.M. Harun Al Rasyid

Gusti Pangeran Haryo Sasraningrat berputera 13 orang:

1. R.M. Prawiraningrat
2. R.M. Nataningrat Sucipto
3. R.M. Suprapto
4. R. Ayu Martodirjo
5. R.M. Suroyo Sasraningrat
6. R.Aj. Sutartinah (Nyi Hajar Dewantara)
7. R. Aj. Sukapsilah
8. R.M. Suyatmo
9. R.M. Sudarto Sasraningrat
10. R.Aj. Sulastri – Suyadi Darmoseputro
11. R.M. Sancoyo Sasraningrat
12. R. Aj. Sukirin Harjodiningrat.[5]

Ki Hajar Dewantara adalah keturunan Sri Paku Alam III, demikian pula Nyi Hajar Dewantara. Keduanya termasuk kerabat Paku Alaman. Istana atau Kadipaten Paku Alaman merupakan salah satu kerajaan dari empat kerajaan di Jawa Tengah. Berdirinya istana tersebut adalah yang paling akhir dibandingkan dengan tiga kerajaan lainnya. Jika kerajaan Yogyakarta merupakan pecahan dari kerajaan Mataram yang berpusat di Surakarta dan pemecahan ini berdasarkan ketentuan dalam perdamaian Gianti (1755) dan Mangkunegaraan berdiri pada 1757 berdasarkan ketentuan perdamaian Salatiga, maka berdirinya Paku Alaman tidak dapat dipisahkan dari peristiwa pendudukan Inggris di Indonesia.

Serangan Inggris terhadap wilayah Belanda di Indonesia dilakukan sesudah negeri Belanda dianeksasi pada kerajaan Napoleon pada 1810. Thomas Stamford Raffles adalah tangan kanan Lord Minto, Gubernur Jendral Inggris yang berkedudukan di India. Raffles diserahi tugas memimpin ekspedisi untuk menduduki kepulauan Indonesia. Tugas tersebut diterimanya dengan penuh antusiasme, karena sejak waktu yang lama

ia sangat tertarik kepada Indonesia. Ketika ia berkedudukan di pulau Penang (1805), ia mulai mempelajari bahasa, tata cara sejarah Melayu. Ia mengadakan hubungan korespondensi secara teratur dengan William Marsden, penulis buku *History of Sumatra*, dan juga dengan Dr. Leyden.[6]

Beberapa waktu sebelum serangan Inggris dilancarkan, Lord Minto memerintahkan kepada Raffles untuk menghubungi raja-raja dan pembesar-pembesar di Jawa, Sumatra dan Bali. Hubungan tersebut dilakukan dengan cara berkorespondensi dan surat-surat itu dibawa oleh pedagang-pedagang Indonesia.[7] Jawaban yang diterima menunjukan bahwa pada umumnya, raja-raja itu bersimpati kepada orang-orang Inggris. Pada waktu itu Gubernur Jendral Daendels sudah diganti oleh Janssens. Tetapi keadaannya sangat tidak menguntungkan, karena sikap dan tindakan Daendels membuat raja-raja dan penguasa-penguasa lainnya di Jawa memusuhi Belanda.

Serangan ke Jawa menggunakan armada yang terdiri atas 100 kapal dan dengan kekuatan 12.000 orang. Armada tersebut diberangkatkan dari Malaka di bawah pimpinan Lord Minto. Pada 3 September 1811 mereka muncul di depan Batavia (Jakarta). Peperangan berlangsung selama enam minggu dan sesudah terjadi pertempuran yang sengit di sebelah selatan Batavia, Inggris dapat menguasai daerah di sekitar kota tersebut. Janssens melarikan diri ke timur untuk menyusun kekuatan baru, di sebelah selatan Semarang. Ia mengharapkan memperoleh bantuan dari raja-raja Jawa. Tetapi hanya Prang Wedana saja, pengganti Mangkunegara I yang tetap setia kepada Belanda.[8] Janssens terpaksa menyerah dan penandatanganan perjanjian dilakukan pada 18 September 1811. Isi perjanjian itu berbunyi, bahwa Jawa, Makasar, Palembang dan Timor menjadi daerah Inggris.[9] Daerah lainnya di Indonesia segera ditaklukkan.

Oleh Lord Minto, Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur menguasai daerah pemerintahan: Malaka, Bengkulu, Jawa dan Maluku. Akan tetapi sebenarnya perhatian Raffles terhadap daerah di luar Jawa sangat sedikit. Pekerjaan yang dilakukannya meliputi:

1. Peninjauan kembali perjanjian antara Pemerintah di Batavia dengan raja-raja di Jawa.
2. Reorganisasi lembaga-lembaga pemerintahan dan pengadilan.
3. Pembaharuan stelsel pajak.[10]

Selain pekerjaan yang tersebut di atas, reputasi yang paling besar dicapai adalah sebagai penulis buku *History of Java*, sebuah buku sejarah mengenai Jawa yang tidak bersifat Belanda-sentris.

Walaupun ada perbedaan-perbedaannya, pembaharuan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral Daendels dan Letnan Gubernur Raffles banyak persamaannya. Terutama dalam hal merombak pemerintahan di Jawa. keduanya menghendaki masuknya individualisme dan berusaha mengganti pemerintahan pribumi yang berdasarkan feodalisme dengan aparat pemerintahan modern menurut contoh Barat.[11] Raffles juga melakukan politik memecahbelah.

Dalam usaha mengatur kembali perjanjian dengan raja-raja di Jawa, Raffles mendapat tantangan dari Sultan Yogyakarta, Hamengku Buwana II. Oleh sebab itu tentara Inggris dikirim ke Yogyakarta dan pada tanggal 20 Juni 1812 Yogyakarta diduduki. Kemudian pada 28 Juni 1812 bertempat di Loji Kebon, jam 5 sore putera mahkota diangkat menjadi Sultan, bergelar Hamengku Buwana III.[12] Pada 29 Juni 1812, jam 5 sore, di ruang Bangsal Kedaton, Pangeran Notokusumo diangkat menjadi Kanjeng Pangeran Adipati Paku Alam I, sedang Hamengku Buwana II atau Sultan Sepuh bersama

putera-puteranya Pangeran Mangkudiningrat, Pangeran Martosono dan Sumodiwiryo diasingkan ke Pulau Penang.[13] Pangeran Notokusumo adalah saudara Sultan Hamengku Buwana II. Karena ia dianggap banyak jasanya bagi Inggris, maka Raffles memberinya sebagian daerah Sultan Yogyakarta. Maka sejak 1812 di Jawa Tengah terdapat empat kerajaan kecil. Seperti halnya dengan daerah Mangkunegaran, kedaulatan Pura Pakualaman dijamin oleh Pemerintah di Batavia.

Sesudah Paku Alam I yang memerintah pada 1812–1829, secara berturut-turut memerintah:

Paku Alam II	(putera Paku Alam I), 1829–1858
Paku Alam III	(putera Paku Alam II), 1858–1864
Paku Alam IV	(kemenakan P.A. III), 1864–1878
Paku Alam V	(saudara P.A. III), 1878–1900
Paku Alam VI	(putera P.A. V), 1901–1902
Paku Alam VII	(putera P.A. VI), 1903–1938
Paku Alam VIII	(putera P.A. VII), 1938– .....

Tempat kediaman K.P.H. Suryaningrat ada di sebelah timur pura Paku Alaman. Demikian pula rumah G.P.H. Sasraningrat, ayah Nyi. H. Dewantara. Seperti lazimnya rumah para bangsawan di Jawa, pada rumah para pangeran itu terdapat pendapa dan dalem. Di halaman yang sama terdapat rumah-rumah para *sentono* (= keluarga) yang ikut bertempat tinggal (*magersari* – Jawa).

Menurut K.H. Dewantara, ciri khas kerabat Paku Alam ialah kecenderungan akan kesasteraan dan mempelajari kesenian yang indah. Pangeran Notokusumo kelak menjadi P.A. I, sangat rajin dalam mempelajari kesasteraan Jawa, Ilmu Politik dan badan-badan pemerintahan. Hingga saat ini tiap keturunan dapat menghasilkan seorang atau lebih yang bertekun dalam mempelajari sastra dan kesenian. Sri Paku Alam III mengarang Serat *"Darmo Wirayat"*, berbentuk syair dan berisi pelajaran

tentang kesusilaan. Karena penerbitan buku tersebut, nama Paku Alam III menjadi harum. Penyair muda ini tidak dapat mengembangkan bakatnya karena wafat dalam usia yang sangat muda.

Tidak hanya dalam bidang kesasteraan, melainkan juga dalam bidang kesenian, kerabat Paku Alam menduduki tempat yang utama. Ketika P.A.I. memerintah, terjadi pergolakan di kerajaan Yogyakarta disebabkan adanya Perang Diponegoro (1825–1830). Akibatnya PA.I. tidak mempunyai banyak waktu untuk bekerja dalam bidang kesenian. Dalam usaha memajukan kesasteraan P.A.II setingkat dengan P.A.I. Bahkan pada jaman P.A.II itu orang merintis jalan baru dalam seni musik dan drama. Begitu giatnya orang mempelajari kesenian dan kesasteraan di istana Paku Alaman, sampai Sri Sultan Hamengku Buwana V selalu mengirimkan para sentono dan abdidalem ke Pakualaman untuk mempelajari tembang-tembang kawi *(sekar ageng).*[14]

Sri Paku Alam III semula bernama Gusti Pangeran Hadipati Haryo Suryosasraningrat. Kedua puteranya, kelahiran permaisuri yang pertama, bernama Pangeran Suryaningrat (ayah K.H. Dewantara) dan Pangeran Sasraningrat (ayah Nyi H. Dewantara). Kedua pangeran tersebut kemudian secara aktif melanjutkan pelajaran kesasteraan dan musik. Mereka sangat berjasa dalam soal kebudayaan. Tetapi sejak masih muda, Pangeran Suryaningrat itu tuna netra. P. Sastraningrat adalah seorang sastrawan yang kuat, yang secara istimewa dapat mengungkapkan keindahan dalam bentuk syair. Sedang P. Suryaningrat sangat menyukai musik dan soal-soal keagamaan yang bersifat filosofis dan islamistis. Kedua saudara kakak beradik ini bersama-sama telah dapat mengubah *"Sastra Gending"* (pelajaran kebatinan) yang dualistis dari Sultan Agung.[15] Selain itu kedua saudara ini mewariskan banyak karya tulis yang berujud buku/*serat*.

Tulisan-tulisan P. Suryaningrat (ayah Ki Hajar, berbentuk syair dan bersifat filosofis-religius, yang sesuai dengan pandangan hidup pengarang, ialah Islam Jawa. Juga ditulisnya syair-syair lepas, antara lain *panembrama* untuk perayaan-perayaan Taman Siswa. Di antaranya panembrama yang ditunjukkan kepada Rabindranath Tagore, yang berkunjung di Taman Siswa Yogyakarta pada 1928. Mengutip pendapat R.M. Joyodiputro yang disampaikan kepada K.H. Dewantara bahwa P. Suryaningrat dalam soal gending dapat disebut *"empu"* (pujangga). Ia memang mengetahui betul apa saja yang pada waktu itu berhubungan dengan pelajaran-pelajaran musik Jawa.[16]

Perlu dicatat bahwa ketika P.A.V. (1878–1900) memerintah, datanglah periode baru, periode yang sangat mementingkan kemajuan intelek dan kurang memperhatikan kesasteraan dan kesenian Jawa.[17] Karena tindakan raja ini maka kerabat Paku Alam terkenal sebagai kerabat raja-raja Jawa yang paling maju. Banyak di antara mereka melanjutkan pelajaran ke negeri Belanda. P.A. Noto Dirojo, putera P.A.V. adalah seorang yang mengerti kehendak jaman. Putera-puteranya diberi pendidikan yang luas R.Aj. Karlinah, puteri P.A. Noto Dirojo, adalah wanita Indonesia yang lulus akte guru Eropa. Lima orang puteranya belajar di negeri Belanda: R.M. Noto Suroto, R.M. Noto Kuworo, R.M. Noto Diningrat, R.M. Sewoyo. Demikian pula adiknya, R.M. Suryo Putro belajar di Delft.

Untunglah pada pemerintahan P.A.VII (1903–1938), kebudayaan Jawa sangat dimajukan. Tari-tarian, juga tari Serimpi dan Bedoyo dipelajari lagi. Seni wayang dan seni tari dapat dinikmati beberapa kali seminggu dari halaman. Dalam Pakualaman.

Pengiriman putera-putera kerabat Paku Alam ke sekolah Belanda tidak dapat merusak pendidikan nasional Jawa, sebab di istana Paku Alam, seperti halnya di istana raja-raja Jawa lain-

nya selalu disediakan guru untuk mengajar sejarah, kesasteraan dan kesenian dalam arti yang luas. Hal semacam ini juga berlaku bagi R.M. Suwardi dan saudara-saudaranya. Di lingkungan keluarganya orang tekun berolah sastra. Selain itu suasana religius dengan adanya langgar dan mesjid di dekat rumahnya, mempertebal keyakinan agamanya. Setiap hari Jumat ayah Suwardi bersholat di Mesjid bersama ulama-ulama lain. Dari Pangeran Suryaningrat yang tinggi hidup keagamaannya, Suwardi menerima ajaran agama Islam. Ayahnya mementingkan ajaran yang berbunyi, "Syariat tanpa hakikat adalah kosong. Hakikat tanpa syariat adalah batal". Selain ajaran Islam, Suwardi juga mendapat pelajaran berupa ajaran lama yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu yang terserat dalam ceritera wayang. Pelajaran tentang seni sastra, gending dan seni suara diberikan secara mendalam.[18]

Karena sejak kecil Suwardi telah dididik dalam suasana religius dan dilatih untuk mendalami soal-soal sastra dan kesenian lainnya, maka ketika sudah dewasa ia sangat menyukai dan mahir tentang bidang-bidang tersebut. Pada waktu ia tinggal di Negeri Belanda sebagai orang buangan, ia dikenal sebagai ahli sastra Jawa. Ia mendapat undangan dari Panitia Kongres Pengajaran Kolonial I di Den Haag untuk ikut serta dalam kongres tersebut (1916) dan diminta untuk menyampaikan prasaran. Suwardi selalu berpendapat bahwa pendidikan kesenian adalah sangat penting, karena pendidikan kesenian yang disebut pula pendidikan estetis dimaksudkan untuk menghaluskan perasaan terhadap segala benda lahir yang bersifat indah.[19] Pendidikan estetis ini melengkapi pendidikan etis atau pendidikan moral, yang bermaksud menghaluskan hidup kebatinan anak. Dengan pendidikan etis ini anak-anak dapat mengembangkan berjenis-jenis perasaannya: religius, sosial, individual dan sebagainya.[20]

Ayah Ki Hajar dan ayah Nyi Hajar Dewantara dilahirkan oleh permaisuri Paku Alam III, yang berasal dari Pugeran, keluarga Sultan Hamengku Buwana. Ketika permaisuri tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, dengan lain perkataan dicerai, maka kedua pangeran, Suryaningrat dan Sasraningrat menjadi terlantar hidupnya. Keduanya hanya diserahkan kepada *emban* dam tidak boleh diasuh oleh ibunya, karena ibunya tidak lagi mempunyai kedudukan dalam keluarga Pakualaman. Keadaan ini makin suram setelah Sri Paku Alam III wafat. Kedua pangeran bersama anak keturunannya hidup menderita, termasuk R.M. Suwardi. Dari istana pada pemerintahan Paku Alam IV, V dan VI tidak ada yang memperhatikan nasib putera-putera dan keturunan Paku Alam III. Perlu diketahui bahwa sejak pemerintahan Paku Alam IV, yang diangkat menjadi Paku Alam tidak diambilkan dari garis lurus laki-laki keturunan Paku Alam III. Sebenarnya ayah Ki Hajar, Pangeran Suryaningrat adalah putera mahkota, tetapi ia cacad netranya.

Dalam keadaan yang materiil terbatas itu Suwardi dan saudara-saudaranya tidak patah hati, tetapi justru bertekad untuk berbuat hal-hal yang mulia. Ketika Sri Paku Alam VI wafat (1902), terjadilah perubahan, keturunan Paku Alam III mulai ditanyakan. Pada waktu itu R.M. Suwardi dan R.M. Suryopranoto sudah besar. Suwardi sudah hampir tamat Sekolah Dasar Belanda.

Berhubung putera mahkota masih belajar di H.B.S. Semarang, maka pihak Belanda menghendaki agar Pangeran Suryaningrat bersedia *ngembani* atau mewakili Paku Alam VII. Pangeran tersebut menolak karena telah tuna netra dan ia mengusulkan agar adiknya, Pangeran Sasraningrat yang memegang jabatan itu. Usul ini disertai permintaan, apabila kelak Pangeran Sasraningrat akan ditetapkan menjadi Paku Alam, supaya kedudukan itu diserahkan kepada Suwardi Suryaningrat.[21]

Suwardi menyampaikan syarat bahwa jika Pangeran Sasraningrat diangkat menjadi Paku Alam atau wakilnya, kekuasaan Paku Alam yang dulu harus dikembalikan, ialah memiliki legiun dan agar penduduk diijinkan membuat garam di pantai selatan.[22]

Diceritakan bahwa Suwardi mempunyai darah Madura, karena Kanjeng Gusti Notokusumo beristrikan puteri dari Madura. Dari pihak Sutartinah atau Nyi Hajar Dewantara masih ada hubungannya dengan Diponegaran, karena ibu Nyi Hajar adalah cucu Mertonegoro, sedang Mertonegoro adalah seorang basah ikut berperang di samping Diponegoro. Ketika Pangeran Diponegoro diasingkan oleh pihak Belanda, basah Mertonegoro diambil menantu, kawin dengan putera puteri Diponegoro. Dari perkawinan ini lahir Nayoko Mertonegoro dan ibu Nyi Hajar Dewantara adalah putera Nayoko Mertonegoro ini.

Demikianlah keadaan lingkungan keluarga, di mana Suwardi menerima pendidikan yang mula-mula. Suasana lingkungan, pengaruh orang tua atau pendidik di rumah dan keadaan rumahtangga semuanya akan memberikan pengaruh bagi terbentuknya pribadi Suwardi.

Keluarga Paku Alam termasuk keluarga yang maju. Seluruh putera dalam lingkungan itu dikirim ke sekolah Belanda. R.M. Suwardi tidak terkecuali, tetapi berbeda dengan saudara-saudara sepupunya, ia tidak dikirim ke Sekolah Dasar Belanda I, melainkan ke Sekolah Dasar Belanda III. Sekolah ini letaknya di kampung Bintaran Yogyakarta, tidak jauh dari tempat kediamannya. Di sekolah itu banyak terdapat anak-anak Ambon dan Indo Belanda. Seringkali sesudah sampai di rumah, Suwardi menceriterakan pengalamannya pada waktu ia pulang sekolah, di mana ia terpaksa harus berkelahi dengan kawan-kawannya, karena mereka menghinanya.

Sesudah tamat Sekolah Dasar tersebut (1904), timbullah masalah ke mana ia akan meneruskan sekolahnya. Akhirnya

Suwardi masuk *Kweekschool* (Sekolah Guru) di Yogyakarta. Tetapi tidak lama kemudian datang dokter Wahidin Sudiro Husodo di pura Paku Alaman, dan menanyakan siapa di antara putera-putera yang mau masuk *Stovia* (Sekolah Dokter Jawa) di Jakarta, dengan mendapat bea siswa. Suwardi menerima tawaran itu.

Selama 1905–1910, Suwardi menjadi murid *Stovia*. Bea siswanya kemudian dicabut karena ia tidak naik kelas, disebabkan karena sakit selama empat bulan. Terpaksa ia harus meninggalkan sekolah karena tidak dapat membiayai. Dari direktur sekolahnya ia mendapat surat keterangan istimewa atas kepandaiannya berbahasa Belanda.[23]

Walaupun ia tidak dapat menyelesaikan studinya di *Stovia*, tetapi ia memperoleh banyak pengalaman baru. Sebagai mahasiswa *Stovia*, ia harus masuk asrama yang telah disediakan. Jumlah anak yang tinggal di asrama tersebut sebanyak 200 orang dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Agama mereka berbeda-beda. Bagi Suwardi tempat tinggalnya yang baru itu lain sekali dengan tempat asalnya. Suasana feodal yang dialami di rumah orang tuanya di Yogyakarta tidak terdapat di kota besar Jakarta. Untuk semuanya ini ia harus menyesuaikan diri.

Seperti di asrama pada umumnya, di asrama pelajar *Stovia* itu juga berlaku peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh penghuninya. Menurut peraturan, pada malam Idul Fitri penghuni asrama dilarang merayakan hari besar itu dengan membunyikan petasan. Bagi rakyat Indonesia, Idul Fitri mempunyai sifat nasional, sehingga yang merayakan tidak hanya orang-orang yang menganut agama Islam saja. Selain itu kebiasaan pada waktu itu orang menyambut hari raya tersebut dengan membunyikan petasan. Oleh sebab itu ia bersama-sama dengan teman-temannya membunyikan beberapa puluh mercon. Akibatnya pemimpin asrama marah, dan Suwardi bersama

kawan-kawannya dimasukkan dalam kamar tertutup sebagai hukuman.[24]

Pada sekitar 1908, pada waktu diadakan persiapan untuk mendirikan *Budi Utomo*, Suwardi mulai berkenalan dengan Douwes Dekker. Sesudah *Budi Utomo* didirikan, pada 20 Mei 1908, Suwardi sangat tertarik. Waktu itu ia masih menjadi pelajar di *Stovia*. Ia ikut aktif dalam organisasi tersebut dan mendapat tugas bagian propaganda.

Demikianlah pendidikan yang diperoleh Suwardi di luar pusat keluarga. Perlu ditambahkan bahwa ketika ia masih tinggal di Yogyakarta, hubungannya dengan anak-anak di kampung sangat baik. Suwardi terkenal ramah, sabar dan sering tampil sebagai pemimpin di kalangan teman-teman sepermainannya.

Sesudah meninggalkan *Stovia*, Suwardi bekerja pada laboratorium Pabrik Gula Kalibogor, Banyumas. Kemudian pada 1911 pindah ke Yogyakarta, bekerja sebagai pembantu apoteker di Rathkamp. Di samping itu ia mulai terjun dalam bidang jurnalistik, membantu surat kabar *Sedyo Utomo* (berbahasa Jawa) di Yogyakarta, *Midden Java* (berbahasa Belanda) di Bandung dan *De Expres* (berbahasa Belanda) di Bandung.

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL

CATATAN

1. KHD, Sistim Trisentra, *Wasita*, Juni 1935 atau Karya I : 74
2. KHD, Sistim Trisentra, *Wasita*, Juni 1935 atau Karya I : 74
3. KHD, Sistim Trisentra, *Wasita*, Juni 1935 atau Karya I : 76
4. KHD, *Karya I* : 384
5. Catatan Nyi Hajar Dewantara
6. Vlekke, *Geschiedenis van de Indische Archipel*, 1974 : 294
7. Vlekke, *Geschiedenis*, 1947 : 295
8. Vlekke, *Geschiedenis*, 1947 : 297
9. Vlekke, *Geschiedenis*, 1947 : 297
10. Vlekke, *Geschiedenis*, 1947 : 301
11. Burger-Prajudi, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid I, 1957 : 150
12. Peonsen, Amangku Buwana II, *Bijdragen*, 1905 : 315
13. Poensen, Amangku Buwana II, *Bijdragen*, 1905 : 316-318
14. KHD, *Karya II*^{a} : 302
15. KHD, *Karya II*^{a} : 310
16. KHD, *Karya II*^{a} : 312
17. KHD, *Karya II*^{a} : 309
18. Pranata SSP, *Ki Hadjar Dewantara*, 1959 : 34
19. KHD, *Karya I* : 323

20. KHD, *Karya I* : 323
21. Laporan kerja Team Sistematisasi Ajaran KHD, Seksi Politik (hasil wawancara antara Nyi Mujono Pr, cs dengan Ibu Suyadi).
22. Laporan kerja Team Sistematisasi, Seksi Politik.
23. M. Tauchid. *Ki Hadjar Dewantara, Pahlawan dan Pelopor Pendidikan*, 1968 : 14.
24. Pranata SSP, *Ki Hadjar Dewantara*, 1959 : 38.

BAB II MUNCULNYA ELIT BARU

Empat abad yang lalu pedagang-pedagang Belanda mengadakan kontak dengan pedagang dan penguasa-penguasa di Indonesia. Kontak ini adalah antara pedagang-pedagang yang masing-masing pihak bebas dan sama kedudukannya. Hubungan ini berubah, sesudah dibentuk Kongsi Dagang Belanda yang menjalankan monopoli-monopoli perdagangan dan menguasai daerah-daerah. Hubungan tersebut mengalami perubahan lagi sesudah Kongsi Dagang tersebut bangkrut, dan seluruh wilayahnya di Indonesia jatuh ke tangan Pemerintah Belanda.

Di bawah ini sebuah ilustrasi yang menggambarkan kontak pertama antara pedagang-pedagang Belanda dan orang-orang Indonesia. Seperti kita ketahui, pada abad ke-16 bandar Banten merupakan bandar yang dikunjungi oleh bermacam-macam pedagang. Tidak hanya pedagang-pedagang dari negeri-negeri di Asia saja, tetapi terdapat pula pedagang-pedagang Portugis. Pada bulan Juli 1596, terdapat empat kapal Belanda mendekati bandar Banten. Menurut cerita pelaut-pelaut Belanda, ketika kapal-kapal mereka telah mendarat, datanglah pedagang-pedagang Portugis di atas kapal Belanda tersebut untuk menyampaikan ucapan selamat datang. Kemudian dengan sikap yang ra-

mah, orang-orang Portugis itu memberi penjelasan-penjelasan mengenai keadaan dan kemakmuran Pulau Jawa. Sesudah itu mereka minta diri; untuk menyatakan terima kasih dan juga untuk penghormatan kepada orang-orang Portugis itu, pedagang-pedagang Belanda melepaskan tembakan.[1]

Sesudah pedagang-pedagang Portugis mengunjungi kapal-kapal Belanda, esok harinya datang penguasa-penguasa Indonesia menjumpai pedagang Belanda itu. Mereka berembuk dan pedagang-pedagang Belanda itu diijinkan berdagang di bandarnya. Tidak lama kemudian datang kapal-kapal milik pedagang-pedagang Jawa, Cina dan Gujarat mengelilingi kapal-kapal Belanda itu. Dalam waktu singkat geladak kapal-kapal Belanda itu berubah menjadi pasar.[2]

Sesudah armada dagang Belanda yang pertama itu berhasil, maka banyak kongsi dagang Belanda mengirim armadanya ke Indonesia. Pada 1601 sebanyak 14 armada diberangkatkan yang terdiri atas 65 buah kapal.[3] Tujuannya mengunjungi pulau Jawa dan Maluku. Kepulauan Maluku yang terkenal sebagai pusat rempah-rempah, terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil beratus-ratus jumlahnya. Hubungan antar pulau dilakukan dengan perahu-perahu yang bermacam-macam jenisnya. Di antara pulau-pulau itu terdapat kepulauan Banda yang menghasilkan pala. Bandarnya ramai, penuh dengan perahu-perahu dagang milik orang-orang Makasar, Jawa, Minangkabau, Arab, India, Johor, Patani dan sebagainya. Dari Banda biasanya mereka berlayar ke Ambon dan terus menuju ke Maluku Utara.

Pada sekitar tahun 1600, bandar di Banda seakan-akan menjadi kota internasional. Selain pala juga fuli dan cengkeh mereka perdagangkan. Cengkeh didatangkan dari Ambon. Untuk menyimpan cengkeh dalam jumlah besar, didirikan gudang-gudang di sekitar bandar.

Sesudah Perserikatan Dagang Belanda atau V.O.C. didirikan, keadaan mengalami perubahan, karena kongsi dagang ini

melakukan politik dagang monopoli. Lebih-lebih sesudah V.O.C. berhasil dapat menguasai daerah-daerah. Mula-mula Batavia diduduki (1619), kemudian merebut kota Malaka dari tangan Portugis (1641). Penguasaan terhadap dua pusat kota yang mempunyai arti penting dalam bidang strategi perdagangan tersebut, sangat merugikan pedagang-pedagang Portugis. Sebaliknya V.O.C. makin kuat dan berkembang.

Menurut beberapa ahli Sejarah Ekonomi, Negeri Belanda, pada abad ke-17 merupakan kekuatan ekonomi yang paling penting di Eropa. Orang-orang Belanda menguasai perdagangan, keuangan dan juga dalam menghasilkan barang-barang. Industri tekstil berkembang, terutama dalam produksi wol dan kain lena. Ikan dan keju merupakan barang ekspor yang menumpuk. Industri perkapalan sangat maju, baik untuk keperluan pengangkutan barang-barang maupun untuk dijual. Pedagang-pedagang Belanda tidak hanya berdagang di wilayah Eropa, tetapi juga menghubungkan Eropa dengan benua baru, ialah Amerika. Di samping itu juga berdagang sampai Asia, khususnya di perairan Indonesia.[4]

Pada abad berikutnya, keadaan ekonomi Belanda merosot. Kemunduran ekonomi ini berlangsung sampai belahan pertama abad ke-19. Hubungan antara orang-orang Belanda dan Indonesia juga mengalami perubahan. Pada waktu itu V.O.C. telah menguasai banyak daerah. Dengan perluasan daerah dan pengaruh ketatanegaraan, maka V.O.C. tumbuh "dari pedagang menjadi raja". Penyerahan wajib yang dikenakan kepada penduduk mengubah corak perdagangan menjadi penarikan pajak. Penanaman kopi yang dipaksakan berakibat perkembangannya dari "dagang ke agraria".[5]

Pada abad ke-18 kekuasaan V.O.C. meliputi Maluku, sebagian Jawa, Madura, Padang, Palembang, Pontianak, Sambas, Makasar dan Minahasa. Akan tetapi V.O.C. belum menyelenggarakan pemerintahan umum. Kekuasaannya terbatas pada penun-

tutan penyerahan wajib dari penguasan-penguasa Indonesia, mengangkat pegawai-pegawai dan mengawasi mereka agar dapat melaksanakan kewajibannya terhadap V.O.C.

Pada pertengahan abad ke-18 Inggris mendapat kekuasaan besar di laut baik di Eropa maupun di Asia. Kekuasaan Belanda di India didesak oleh Inggris dan Prancis. Kemudian diikuti oleh kekalahan Belanda dalam perang melawan Inggris, sehingga berakhirlah monopoli V.O.C. atas perairan Indonesia. Keadaan V.O.C. makin lama makin buruk. Korupsi merajalela dan pada akhir abad ke-18 runtuhlah V.O.C. Daerahnya di Indonesia jatuh di tangan Pemerintahan Belanda, tetapi V.O.C. telah meletakkan dasar-dasar untuk pemerintahan selanjutnya.

Politik kolonial Belanda pada awal abad ke-19 dapat dikatakan masih melanjutkan politik V.O.C. Tetapi sesudah jaman Napoleon, liberalisme mulai berkembang di Negeri Belanda. Tetapi golongan liberal ini masih belum kuat kedudukannya untuk menguasai pemerintahan. Malahan di antara mereka itu terdapat pertentangan, sehingga kesatuan mereka terpecah.

Dalam menghadapi lawan yang terpecah menjadi beberapa aliran itu, kaum konservatif keluar sebagai pemenang. Mereka memaksakan lagi politik kolonial tradisional yang dulu dijalankan oleh V.O.C. Pelaksanaan politik ini berbentuk sistem Tanam Paksa, berlangsung mulai 1830 sampai 1870. Sistem ini diajukan oleh Van den Bosch dengan maksud untuk dapat mendatangkan keuntungan dengan cara-cara tradisional.

Sesungguhnya, meskipun antara golongan konservatif dan golongan liberal terdapat perbedaan ideologi yang dalam, namun mereka keduanya mempunyai titik persamaan yang fundamental. Kedua golongan tersebut berpendapat bahwa daerah koloni adalah untuk kepentingan negara induk. Daerah koloni harus mengisi perbendaharaan Belanda. Daerah koloni

adalah gabus yang menjadi tempat mengapungnya kesejahteraan negara induk. Mereka menghadapi masalah yang sama, ialah bagaimana caranya menjamin Negeri Belanda agar memperoleh keuntungan-keuntungan dan tetap mempunyai martabat yang tinggi.[6]

Perlu diketahui bahwa pada sekitar 1830, Negeri Belanda berada di ambang pintu kebangkrutan. Kebutuhan akan keuntungan finansial pada waktu itu sangat mendesak, karena di Indonesia baru saja Perang Diponegoro dapat diakhiri dan di Eropa, Belanda menyiapkan perang melawan Belgia. Oleh sebab itu maka hasil yang melimpah dari koloni itulah yang diharapkan, sedang mengenai cara untuk mencapainya merupakan hal yang kedua. Golongan konservatif menghendaki cara-cara tradisional dengan disertai paksaan, sedang pihak lawannya condong untuk memakai cara-cara yang dilandasi kebebasan, sesuai dengan prinsip-prinsip liberal.

Akan tetapi liberalisme di Negeri Belanda terus berkembang dan pada 1848 mereka berhasil mengubah struktur politik. Konstitusi diperbaiki, Kerajaan Konstitusional diubah menjadi Kerajaan dengan sistem demokrasi parlementer. Partai Liberal yang pada waktu itu berpengaruh di dalam parlemen, menentang sistem Tanam Paksa yang dianggapnya sebagai hal yang menyimpang dari prinsip-prinsip ekonomi liberal. Tetapi perjuangan mereka belum banyak berhasil. Di antara hasil yang mereka capai adalah diterimanya Peraturan Pemerintah atau *Regeerings Reglement* (1854). Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, dimulailah standar baru bagi pemerintah di Indonesia dan dipaksakannya politik yang lebih liberal.[7]

Sejak 1850 telah dimulai penanaman modal di Indonesia. Secara berangsur-angsur Sistem Tanam Paksa dihapus dan berkembanglah perusahaan-perusahaan swasta terutama dalam perkebunan tebu, tembakau dan industri timah Periode antara 1850 dan 1870 adalah masa jaya bagi Liberalisme di Negeri

Belanda, sedangkan di Indonesia periode tersebut merupakan periode transisi dari politik kolonial konservatif ke politik kolonial liberal.[8]

Menginjak tahun 1870, terjadilah titik balik dalam Sejarah Politik Kolonial Belanda. Pada tahun itu Undang-undang agraris disahkan dan dijalankan. Orang asing mendapat ijin untuk masuk ke Indonesia dan diperbolehkan menyewa tanah yang bukan milik desa atau sawah penduduk selama tujuh puluh lima tahun.[9] Undang-undang tersebut mengijinkan pula para pengusaha swasta menghubungi pemilik individual baik perorangan maupun desa, untuk menyewa tanah milik Pemerintah ini kadang-kadang sampai mencapai dua puluh tahun, tetapi dapat dalam jangka waktu lima tahun saja.[10]

Akibat Undang-undang Agraria tersebut lahirlah di Indonesia perkebunan-perkebunan milik Belanda dan bangsa asing lainnya yang mendapat perlindungan dan bantuan dari Pemerintah Hindia Belanda. Perkebunan-perkebunan itu terdapat di daerah yang tanahnya belum pernah diusahakan oleh bangsa Indonesia dan di sawah-sawah atau perkebunan yang telah diusahakan. Tanaman tebu, teh, indigo, kina, tembakau dan kopi secara berangsur-angsur menggantikan penanaman secara paksa. Kerja paksa diganti dengan kerja bebas dan perdagangan monopoli diganti dengan perdagangan bebas.

Pemerintah berusaha melakukan penetrasi ekonomi secara Barat sampai jauh ke pedalaman. Ekonomi pedesaan harus disesuaikan dengan tuntutan kaum liberal. Dengan demikian maka ini berarti bahwa individualisasi harus masuk ke masyarakat desa. Usahanya ialah melanjutkan garis yang telah dirintis oleh Gubernur Jendral Daendels dan Letnan Gubernur Raffles. Pemerintah bertindak melucuti kaum bangsawan dari berbagai hak-hak feodalnya. Di samping itu usaha individualisasi tersebut dilakukan dengan melalui perdagangan, industri dan pendidikan modern.[11]

Untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pemerintah Liberal mengadakan perubahan-perubahan mengenai politik pendidikan di Indonesia. Didirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak lapisan bawah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri dan perkebunan partikelir. Untuk anak-anak golongan atas, pendidikan ditujukan untuk membentuk kelompok baru yang berhaluan Barat, dan terlepas dari masyarakatnya. Tujuan yang lebih jauh ialah agar hubungan antara negeri induk dengan koloni menjadi dekat.[12]

Kehidupan ekonomi yang membawa kemakmuran pada permulaan periode liberal selama lima belas tahun (1870–1885) yang terutama disebabkan oleh perkembangan industri gula yang amat pesat, memungkinkan Pemerintah Kolonial menambah biaya pendidikan di Indonesia. Jika biaya yang disediakan untuk keperluan pengajaran penduduk bumiputera pada 1864 sebesar F 25.000,–, maka pada 1883 jumlah tersebut naik menjadi F 350.000,– sampai F 400.000,– setahunnya.[13] Jumlah Sekolah Dasar bertambah, dari jumlah 186 buah pada 1864 menjadi 512 buah pada 1882. Jumlah *Kweekschool* atau Sekolah Guru juga bertambah.

Dalam kenyataannya, Undang-undang Agraria yang memberi jaminan bagi modal Eropa yang ditanam di berbagai perkebunan tidak lain adalah eksploitasi kapitalis. Walaupun tenaga kerja jarus diperoleh berdasarkan kontrak, namun rakyat kecil tidak berdaya menghadapi kepala-kepala mereka atau pengusaha-pengusaha perkebunan Belanda. Mereka tetap merupakan tenaga kerja murah. Keuntungan dan kemakmuran yang melimpah mengalir kepada kaum kapitalis penanam modal, sedang rakyat hidup dalam kemelaratan yang tidak terhingga.

Kemelaratan dan kesengsaraan rakyat yang sangat hebat itu menggerakkan hati-hati orang-orang Belanda yang mempunyai rasa perikemanusiaan. Pelopor gerakan ini adalah Mr.

Pieter Brooshooft. Ia adalah pemimpin redaksi surat kabar *"De Locomotief"* yang terbit di Semarang. Pada 1884 ia mendesak Pemerintah supaya mengambil tindakan-tindakan yang maksudnya memperbaiki nasib rakyat. Brooshooft mempunyai pengikut di antara sekelompok pegawai Belanda yang masih muda. Gerakan mereka disebut "Haluan Etis". Tetapi golongan ini lemah kedudukannya, karena pelaksanaan cita-citanya sangat tergantung kepada Pemerintah.

Pada 1899, van Deventer menulis dalam majalah *De Gids* dengan kepala: "Hutang Budi". Penganut aliran sosial demokrat ini menurut restitusi atau pengembalian uang berjuta-juta gulden yang diperoleh Negeri Belanda sejak berlakunya Undang-undang Komtabilitet pada 1867. Di dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa anggaran belanja Hindia Belanda ditentukan berdasarkan undang-undang Negeri Belanda. Menurut van Deventer, disebut pula sebagai "Bapak Politik Etis", keuntungan yang diangkut ke Negeri Belanda dari Indonesia sejak 1867 sebesar 187 juta gulden.[14]

Dicetuskannya ide restitusi tersebut bersamaan waktunya dengan timbulnya suatu orientasi politik kolonial baru yang terarah pada prinsip "Hindia Belanda untuk orang pribumi".[15] Dengan berpegang pada prinsip tersebut, maka golongan yang berpandangan humanistis itu mengejar politik kesejahteraan. Terkenal slogan dari politik etis: "Irigasi, Edukasi dan Emigrasi", yang dimaksudkan untuk memajukan dan membawa kesejahteraan bagi penduduk Indonesia, sebagai pembayaran "Hutang Budi" yang dikemukakan oleh van Deventer.

Semboyan trilogi memajukan "Irigasi. Edukasi dan Emigrasi" didukung oleh kaum kapitalis yang menanamkan modal di Indonesia. Perkebunan-perkebunan tebu membutuhkan irigasi yang intensif. Emigrasi ke luar Jawa sangat diharapkan, karena tenaga manusia dan tenaga kerja yang murah dibutuhkan untuk membuka daerah-daerah baru guna kepentingan perkebunan-perkebunan partikelir baru. Persekolahan makin

banyak dibuka untuk kepentingan mencetak pegawai-pegawai yang berpendidikan Barat baik untuk Pemerintah Hindia Belanda, kantor-kantor dagang maupun cabang-cabang perusahaan lainnya.

Menjelang abad ke-20, pendidikan dan pengajaran secara Barat mempunyai arti yang sangat penting. Melalui saluran ini orang dapat memperoleh penghidupan yang lebih baik, kedudukan dan prestasi. Sesuai dengan nilai priyayi tradisional, maka bekerja sebagai pegawai Pemerintah Belanda dianggap pula sebagai priyayi. Pendidikan modern secara Barat merupakan persiapan yang paling baik untuk karir tersebut. Suatu bukti bahwa Pemerintah Belanda sangat mementingkan pendidikan calon pegawai negeri, ialah diadakannya ujian yang disebut *Kleinambtenaars-examen* (K.E.) atau Ujian Pegawai Rendah. Pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu sangat gemar menempuh ujian tersebut.

Demikianlah muncul elit baru, kelompok terpelajar yang memegang jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Sebagian besar dari mereka berasal dari bangsawan tingkat rendah dan bahkan dari rakyat biasa. Elit baru ini mempunyai kedudukan atau jabatan karena berprestasi, bukan karena pewaris seperti yang berlaku pada elit tradisional.

Dalam keadaan yang mengecewakan, di mana rakyat terjajah menderita karena tidak ada keadilan, tampillah kaum elit baru yang memiliki kesadaran nasional memegang pimpinan untuk menuntut perbaikan-perbaikan. Mereka berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsanya. Mereka ingin menjunjung derajat bangsanya setaraf bangsa-bangsa lain yang merdeka. Mereka berpendapat bahwa protes mereka akan lebih efisien, kalau mereka berjuang menurut contoh-contoh Barat. Mereka tidak lagi mengadakan perlawanan seperti yang dilakukan oleh penguasa-penguasa tradisional pada abad-abad sebelumnya. Maka sekarang Pemerintah Belanda berhadapan dengan "senjata" mereka sendiri.

Muncullah organisasi-organisasi yang dipelopori oleh *Budi Utomo*. Organisasi ini lahir pada 20 Mei 1908 di gedung *Stovia* atau Sekolah Dokter Jawa, di Jakarta. Agak menarik perhatian bahwa lulusan atau mereka yang putus sekolah dari *Stovia*, banyak yang terjun dalam pergerakan pada periode pertama itu. Mungkin sekali tindakan-tindakan tersebut merupakan pencerminan perasaan tidak puas di kalangan mahasiswa sekolah tersebut.

Stovia didirikan pada pertengahan abad ke-19, bersamaan dengan didirikannya *Kweekschool* atau Sekolah Guru. Sekolah Dokter Jawa tersebut didirikan untuk kepentingan program Pemerintah Belanda, ialah untuk melatih vaksinator. Lulusan sekolah tersebut dikenal sebagai Dokter Jawa, bukan *Indische Arts*, dan di dalam masyarakat Jawa kurang mendapat penghargaan. Mereka dianggap lebih rendah daripada asisten wedana, hanya setingkat dengan mantri: mantri leding atau mantri polisi.[16] Padahal waktu untuk menyelesaikan studinya cukup lama, dan pelajarannya cukup berat. Oleh karena keadaan yang tidak imbang tersebut, mereka sering bersikap reaktif terhadap para Pangreh Praja.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa dilaksanakannya politik etis, khususnya yang berhubungan dengan perluasan pendidikan modern, mengakibatkan munculnya elit baru. Sebagian dari mereka tampil ke depan menjadi pemimpin-pemimpin Pergerakan Nasional. Perkembangan pergerakan tersebut ada hubungan timbal-balik dengan perluasan pendidikan modern. Kennedy mengemukakan bahwa pendidikan dapat dipandang sebagai sebuah dinamit bagi sistem kolonial.[17] Sedang Colijn mengakui bahwa pengaruh pendidikan terhadap masyarakat kolonial sangat merugikan. Ini merupakan tragedi politik kolonial, karena ia membentuk dan membangun kekuatan yang pada kemudian hari akan melawan Pemerintah Kolonial itu sendiri.[18]

CATATAN

1. Vlekke, *Geschiedenis*, 1947 : 110
2. Vlekke, *Geschiedenis*, 1947 : 110
3. Boxer, *Zeevarend Nederland en zijn Wereldrijk*, 1970 : 56
4. Tuma, *European Economic History*, 1971 : 148
5. Burger-Prajudi, *Sejarah*, 1947 : 80
6. Sartono Kartodirdjo, *Lembaran Sejarah I*, 1967 : xi
7. Sartono Kartodirdjo, *Lembaran Sejarah I*, 1967 : xv
8. Sartono Kartodirdjo, *Lembaran Sejarah I*, 1967 : xx
9. Vlekke, *Geschiedenis*, 1947 : 353
10. Vlekke, *Geschiedenis*, 1947 : 353
11. Wertheim, *Indonesian Society in Transition*, 1956 : 38
12. Van Der Wal, *Het Onderwijsbeleid in Ned. Indie*, 1900–1940, 1963 : 15
13. Brugmans, *Geschiedenis van het Onderwijs in Ned. Indie*, 1957 : 170
14. Vlekke, *Geschiedenis*, 1947 : 390
15. Sartono Kartodirdjo, *Lembaran Sejarah I*, 1967 : xxiii
16. Achmad Djajadiningrat, *Herinneringen*, 1936 : 236
17. Sartono Kartodirdjo, *Lembaran Sejarah I*, 1967 : 21
18. Sartono Kartodirdjo, *Lembaran Sejarah I*, 1967 : 21

BAB III PERINTIS KEMERDEKAAN NASIONAL

Pada awal abad ke-20 di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia timbul pergerakan rakyat yang menggunakan nasionalisme sebagai kekuatan penggeraknya. Pergerakan ini muncul untuk memberi jawaban terhadap tantangan yang berupa situasi kolonial pada waktu itu. Di dalam masyarakat terdapat perbedaan yang menyolok antara penjajah dan yang dijajah. Di bidang politik, sosial dan ekonomi orang-orang Belanda menduduki jenjang yang tinggi, sebaliknya bangsa kita berada di tingkat rendau. Kesombongan orang-orang Belanda yang merasa dirinya sebagai bangsa superior dan orang-orang Indonesia dianggap sebagai bangsa yang rendah dan hina, menyebabkan makin kuatnya kesadaran nasional.

Periode dalam Sejarah Indonesia yang lazimnya disebut periode Sejarah Pergerakan berlangsung antara 1908 dan 1942, yaitu tahun berdirinya organisasi *Budi Utomo* dan dimulainya Perang Pasifik. Kaum pergerakan yang berjuang pada awal periode tersebut bertindak sebagai perintis kemerdekaan.

Terbentuknya *Budi Utomo* pada 20 Mei 1908, yang diumumkan oleh R. Sutomo dan Mas Gunawan Mangunkusumo di gedung *Stovia* merupakan tindakan yang berani. Kehadiran organisasi ini disambut dengan gembira oleh pelajar-pelajar

di luar *Stovia*. Mereka mendirikan cabang-cabang B.U. di tempatnya masing-masing.

Sebelum 1908 dan bahkan sebelum terjadinya perang antara Rusia dan Jepang, di Indonesia telah ada bukti-bukti adanya kebangunan. Tetapi kebangunan ini sifatnya masih individual, terdapat pada diri Kartini yang memiliki gagasan yang sangat maju. Buah pikiran puteri Jepara ini dipakai sebagai pedoman bagi *De Indische Vereeniging*, perhimpunan mahasiswa Indonesia yang ada di Negeri Belanda. R.M. Notosuroto mengemukakan bahwa nasionalisme Kartini tidak sempit. Ia tidak hanya mengagungkan atau memuji apa yang menjadi milik bangsa sendiri, akan tetapi ia tidak segan-segan mengakui kesalahan sendiri dan tidak malu mengambil unsur-unsur yang baik dari pihak lain.[1]

Salah satu tulisan Kartini yang menunjukkan tekadnya untuk bekerja bagi orang banyak dan menghancurkan tradisi yang merugikan adalah sebagai berikut:

> *"Kami hidup dan kami harus hidup. Itu berarti kami harus bergerak maju. Kami harus membangkitkan rakyat kami. Mimpi itu nikmat, mimpi itu indah. Tetapi apa gunanya kalau tetap impian? Kami harus membuatnya lebih indah, lebih nikmat dengan berusaha untuk membuat impian itu menjadi kenyataan . . . . . Orang bangsawan Jawa memandang rendah segala apa yang tidak disertai payung emas. Sifat ini harus segera diberantas, karena merupakan hambatan bagi kemajuan."*[2]

Sesudah Kartini menyusul dokter Wahidin Sudirohusodo, yang dalam masyarakat Jawa terkenal dengan sebutan Mas Ngabei Sudirohusodo. Ia mempunyai keyakinan bahwa bangsanya harus berjuang dan untuk mempersiapkan mereka menghadapi perjuangan, ada dua hal yang perlu diperhatikan: memperluas pengajaran yang sempurna dan memperkuat kesadaran

nasional. "Dana Belajar" harus diadakan untuk membantu anak-anak dan pemuda yang cerdas, tetapi tidak dapat selanjutkan studinya karena terhalang oleh biaya yang tidak mungkin terpikul. Sejak 1906 ia berkeliling ke seluruh Pulau Jawa untuk mempropagandakan berdirinya "Dana Belajar". Di Yogyakarta ia mendapat dukungan dari sekelompok orang-orang terkemuka untuk mencapai tujuan tersebut. Di antaranya yang sangat besar pengaruhnya adalah: Pangeran Notodirdjo dari keluarga Paku Alaman, R. Dwijosewoyo, Mas Budiarjo, dan R. Sosrosugondo.

Berkat kebijaksanaan R. Sutomo dan kawan-kawan yang menghendaki Budi Utomo menjadi perhimpunan nasional yang umum dan secara besar-besaran, maka pemuda-pemuda di Jakarta tersebut mencari hubungan dengan pemimpin-pemimpin tua. Kemudian pada Kongres B.U. pada 1908 di Yogyakarta, kaum muda dan kaum tua berunding. Pada waktu itu timbul pertentangan faham antara golongan "revolusioner nasionalis" dengan golongan "konservatif". Akhirnya terbentuklah Pengurus Besar B.U. dengan bupati Tirtokusumo sebagai ketuanya.

Golongan yang tidak puas dengan politik dan langkah-langkah yang diambil oleh B.U. menggabung pada perkumpulan lain atau menjadi pemuka organisasi baru. R.M. Suwardi Suryaningrat, yang ikut aktif dalam menyelenggarakan Kongres B.U. pada 1908, juga meninggalkan B.U. Ia pindah ke Sarikat Islam, mula-mula sebagai anggota kemudian duduk dalam pimpinan S.I. cabang Bandung, bersama-sama Abdul Muis dan St. Muhamad Zain, pada 1912. Akhirnya ia menggabungkan diri pada dokter Douwes Dekker dan dokter Cipto Mangunkusumo yang bergerak dalam *Indische Partij*.

Pada 1908, pada waktu B.U didirikan, Douwes Dekker ikut dalam segala persiapannya. Rumahnya dipakai sebagai tempat permusyawaratan di samping menjadi tempat bacaan dan perpustakaan bagi para pemuda Indonesia di Jakarta.[3]

Hubungan dengan para mahasiswa Stovia sangat erat. Pernah Douwes Dekker menghadiahkan beberapa buku, antara lain penerbitan Multatuli lengkap. Mula-mula Direktur Stovia akan menolaknya, akan tetapi akhirnya diterima juga. Maklumlah pada waktu itu di kalangan orang Belanda, Douwes Dekker dicap sebagai *"pembawa keonaran"*. Sebaliknya di kalangan para mahasiswa Stovia dan pemuda serta para pemimpin bangsa Indonesia pada jaman itu, ia diakui sebagai salah seorang pemimpin nasional yang turut menanam dan membimbing benih dan cita-cita kebangsaan di kalangan orang-orang Indo.[4]

Perkenalan pertama kali antara R.M. Suwardi Suryaningrat dengan Douwes Dekker berlangsung sekitar tahun 1908. Pada waktu itu Douwes Dekker menjabat redaktur *Bataviaasche Nieuwsblad* yang dipimpin oleh Zaalberg.[5] Douwes Dekker, nama lengkapnya Ernest Francois Eugene Douwes Dekker, adalah seorang jurnalis yang cakap. Pada 1902, ketika ia kembali ke Indonesia dari tempat pembuangannya di Pulau Sailan (ia diasingkan oleh Inggris karena ikut Perang Bur di Afrika Selatan melawan Inggris), ia diterima menjadi koresponden surat kabar *De Locomotief*. Kemudian ia pindah ke Harian *Surabaiaasch Handelsblad* dan sesudah itu pindah lagi ke harian *Bataviaasch Nieuwsblad*.

Douwes Dekker dan Zaalberg, keduanya adalah orang Indo. Akan tetapi sikapnya terhadap bangsa Indonesia sangat berbeda. Zaalberg merendahkan bangsa kita, sedang D. Dekker membela kepentingan kita. Sebagai redaktur yang mempunyai wibawa terhadap atasannya, ialah Zaalberg, ia dapat memasukkan beberapa pembantu dari bangsa kita, di antaranya Suryopranoto, Cokrodirjo, Cipto Mangunkusumo dan Gunawan Mangunkusumo. Dengan demikian harian tersebut sering memuat tulisan-tulisan yang mempropagandakan cita-cita kebangsaan, yang pada waktu itu sedang tumbuh dengan hebat. Ki

Hajar Dewantara menyebut bahwa "infiltrasi" yang amat efektif ini adalah jasa pertama dari kawannya D. Dekker, sebagai "pelopor" pergerakan nasional.[6]

Dalam waktu satu tahun tersiarlah cita-cita kebangsaan bangsa kita di kalangan orang-orang Belanda yang terkemuka dalam lingkungan pemerintahan dan masyarakat Hindia Belanda. Karena D. Dekker dianggap berbahaya untuk keamanan orang-orang Belanda, maka oleh direksi ia dipecat dari jabatannya sebagai redaktur *Bataviaasch Nieuwsblad*. Tetapi D. Dekker tidak berhenti bekerja untuk mencapai cita-citanya. Ia menerbitkan majalah *Het Tijdschrift*, yang cukup tersiar dan terbaca oleh kaum cendekiawan bangsa kita. Majalah ini terbit pada Mei 1912 dan pada September 1912 terbit pula harian *De Expres*, yang berhaluan revolusioner nasionalistis.[7]

R.M. Suwardi yang pada waktu itu menjadi ketua S.I. cabang Bandung sangat tertarik pada kegiatan D. Dekker. Bersama pemimpin-pemimpin lainnya yang berjiwa nasionalistis dan revolusioner, ia menjadi pembantu tetap majalah tersebut. Kemudian ia ikut mengasuh Harian *De Expres*, sedang dr. Cipto Mangunkusumo menjadi anggota sidang pengarang.

Bantuan Suwardi yang kemudian menggabung pada kelompok D. Dekker menambah kekuatan untuk dapat mencapai cita-citanya. D. Dekker merasa mendapat keuntungan besar, karena kawannya yang baru tersebut berotak tajam, teguh pendirian dan keyakinannya.[8] Dalam gelanggang perjuangan, tiga pemimpin itu D. Dekker, Suwardi S. dan Cipto Mangunkusumo bekerja bahu-membahu. Ketiga pemimpin tersebut disebut pula *Janget Kinatelon* atau Tiga Serangkai.

Sesudah aliran nasionalisme dan revolusioner disiarkan melalui *Het Tijdschrift* dan *De Expres* dapat memasuki alam pikiran dan alam perasaan bangsa kita, maka pada 6 September 1912, didirikanlah *Indische Partij*. Partai ini sejak lahirnya se-

cara langsung memperkenalkan diri sebagai "partai politik" yang berhaluan kebangsaan, kerakyatan dan kemerdekaan.[9]

Ketika D. Dekker mendirikan *Indische Partij*, banyak orang Indo Belanda masuk ke dalam partai itu. Jumlah ini kemudian menjadi berkurang, setelah D. Dekker tidak dapat menerima apabila orang-orang Indo menuntut sebagai golongan minoritas. D. Dekker menghendaki agar orang-orang Indo meleburkan diri kepada bangsa Indonesia.

D. Dekker adalah orang Indo Belanda. Ia tidak pernah memakai kebangsaan Belanda. Ia selalu menggunakan kebangsaan *Indier*, berhubung pada waktu itu istilah *Indonesier* atau orang Indonesia belum ada. Ketika ia akan dipromosi menjadi "doktor ekonomi" di Universitas Zurich di Negeri Swiss, ia harus memberitahukan kebangsaannya. Ia menyebut *Indier*, tetapi ditolak, karena di kalangan internasional, istilah *Indier* adalah nama kebangsaan untuk India. Sebab itu D. Dekker menggunakan kebangsaan *Javaan*, orang Jawa.[10]

Orang-orang Indo sangat kecewa terhadap ucapan D. Dekker yang menyatakan bahwa orang Indo Belanda tidak boleh memiliki tanah. Bumi Indonesia hanyalah untuk putera-putera Indonesia saja. Maka mereka yang ingin memiliki tanah, mereka harus menjadi orang Indonesia terlebih dahulu. Mereka harus bersedia melakukan kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh rakyat, sampai ikut melakukan ronda malam dan lain-lain pekerjaan yang biasanya disebut pekerjaan rendah.[11]

Dalam memperjuangkan cita-citanya, ketiga pemimpin tersebut bersemboyan: *Rawe-rawe rantas, malang-malang putung*. Cita-citanya adalah menciptakan Indonesia Merdeka dan Berdaulat. Kewarganegaraannya tidak memperdulikan asal kebangsaannya; asal mengakui Indonesia sebagai negara dan tanah airnya, orang dapat masuk menjadi anggota. Dasar pemersatu bagi *Indische Partij* adalah penderitaan bersama di koloni.[12]

Walaupun *Indische Partij* masih sangat muda usianya, namun langkah-langkahnya sangat tegas dan revolusioner, Anggaran Dasar partai tersebut dikirimkan kepada Pemerintah untuk dimintakan pengesahannya dan partai itu juga minta untuk diakui sebagai badan hukum. Dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 4 Maret 1913 permintaan tersebut ditolak. Adapun alasannya adalah karena perkumpulan itu berdasarkan politik, dan dianggap akan mengganggu keamanan umum; menurut pasal 111 dari Peraturan Pemerintah Hindia Belanda organisasi semacam itu harus dilarang.

Pada tanggal 5 Maret 1913, pemimpin partai mengajukan lagi permohonan kepada Pemerintah untuk pengesahan dan pengakuan sebagai badan hukum. Dalam permohonan yang kedua ini telah diadakan perubahan dalam Anggaran Dasarnya. Pasal 2 dari Anggaran Dasar, yaitu mengenai pokok maksud perkumpulan dicabut dan diganti dengan kata-kata seperti yang terdapat pada Anggaran Dasar *Insulinde*. Perkumpulan *Insulinde* adalah perhimpunan orang-orang Belanda peranakan yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan dan politik. Tetapi lebih banyak ditekankan pada bidang sosial. Pemerintah tetap menolak. Surat Keputusan yang berisi penolakan tersebut tertanggal 11 Maret 1913.[13]

Pada 31 Maret 1913 pucuk pimpinan partai mengambil keputusan yang maksudnya untuk menyelamatkan anggota-anggotanya. *Indische Partij* akan dibubarkan dan sekalian anggotanya supaya pindah ke *Insulinde*, yang juga dipimpin oleh D. Dekker. Dengan jalan demikian, maka *Indische Partij* tetap ada, tetapi dengan pakaian lain. Menurut D. Dekker pada waktu itu sangat dibutuhkan suatu organisasi nasional yang harus berjuang untuk mencapai persamaan derajat bagi seluruh bangsa Hindia, dan persiapan-persiapan yang nyata untuk kemerdekaan bangsa dan tanah air.[14]

D. Dekker adalah orang yang amat gigih dalam perjuangan. Segera ia pergi ke Negeri Belanda, ketika didengar bahwa masalah penolakan Pemerintah Hindia Belanda atas permohonan *Indische Partij* akan dimajukan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Negeri Belanda. Ia tinggal di negeri tersebut selama lima minggu. Sementara itu di Indonesia telah terjadi peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh dua pemimpin *Indische Partij* lainnya.

Pada awal Juli 1913 Cipto Mangunkusumo dan Suwardi mendirikan Komite Bumiputera. Komite ini dimaksudkan untuk menampung isi hati rakyat yang memprotes akan diadakannya perayaan memperingati kemerdekaan Kerajaan Belanda yang telah berusia satu abad. Puncak perayaan tersebut akan dilangsungkan pada 15 Nopember 1913. Peringatan akan dirayakan baik di Negeri Belanda maupun di tanah jajahan.

Kiranya perlu kita menengok sebentar Sejarah Negeri Belanda pada awal abad ke-19. Ketika di Prancis terjadi revolusi pada 1789 yang diikuti dengan perang antara Prancis dan negara-negara yang menolak hasil revolusi tersebut, cita-cita dan pengaruh revolusi itu sampai pula di Negeri Belanda. Pertentangan antara golongan oligarkhi di bawah Pangeran Willem V dan golongan revolusioner terjadi. Republik Belanda yang memihak Inggris diserbu Prancis pada 1793 dan dua tahun kemudian, pada 1795 untuk kedua kalinya. Serbuan yang kedua ini berhasil dan pemerintahan oligarkhis diganti dengan pemerintahan demokratis. Willem V melarikan diri ke Inggris dan pemerintahan baru segera mengadakan perjanjian dengan Prancis.

Selama 1795 sampai 1806, Negeri Belanda menjadi Republik yang memakai nama Republik Bataf. Pada 1806 Republik Bataf ini dijadikan kerajaan diperintah oleh raja Louis Napoleon, adik kaisar Napoleon I. Tujuan dibentuknya kerajaan ini agar supaya Stelsel Kontinental ciptaan Napoleon I,

yang dipakai sebagai alat untuk mengalahkan Inggris dapat membawa hasil. Akan tetapi setelah raja Belanda tersebut tidak mampu melaksanakan Stelsel Kontinental, maka ia dipaksa turun tahta. Negeri Belanda dianeksasikan dan menjadi bagian dari Prancis. Pada waktu itu terjadilah perdagangan gelap antara Inggris dan Belanda, terutama melalui Jerman Utara.

Sebenarnya pada periode 1795 sampai 1806, Negeri Belanda bukanlah negara yang merdeka, melainkan merupakan vasal Prancis. Lebih-lebih pada masa antara 1810 dan 1813, Negeri Belanda menjadi jajahan Prancis. Ketika Napoleon I pada 1813 mengalami kekalahan dalam pertempuran di Leipzig, yang terkenal dengan nama "Pertempuran Bangsa-bangsa", kesempatan itu dipergunakan oleh Belanda untuk merebut kemerdekaannya. Mereka memberontak dan mengusir kekuasaan Prancis yang ada di negerinya.

Janget Kinatelon atau Tiga Serangkai *Indische Partij*, semuanya memiliki keahlian dalam bidang jurnalistik. Masing-masing dengan sifat khasnya sendiri-sendiri. Douwes Dekker adalah seorang nasionalis bersenjatakan pena yang tajam. Yang sangat digemari orang banyak ialah caranya menghantam lawannya hingga *"knock-out"*, hanya dengan satu dua kalimat saja.[15] Cipto Mangunkusumo, pernah menjabat Ketua II dari Pengurus Besar *Indische Partij* dan redaktur harian *De Expres*, mempunyai gaya bahasa dan gaya menulis yang sangat menarik. Tulisannya dapat meyakinkan para pembaca, karena ia menggunakan kalimat-kalimat pendek, ringkas dan kata-katanya tepat. Tulisannya itu mencerminkan sifat jiwanya, sifat wataknya dan sifat budi pekertinya, yaitu: jujur dan sederhana. Watak yang demikian itu tidak membutuhkan *tedeng aling-aling*, tidak membutuhkan kalimat-kalimat yang panjang dan indah. Cara berpikirnya juga istimewa, jernih dan tajam.[16]

Mengenai tulisan Suwardi, Prof. Dr. Sarjito yang menilai tulisan "Seandainya saya seorang Belanda", mengatakan bahwa

karya itu merupakan ujud ketangkasan menulis dalam menyerang pihak Belanda. Tamparan yang sangat hebat itu dilakukan secara tidak kasar, tidak dengan memaki-maki senantiasa tetap sebagai ksatria, memberi kata-kata yang tepat, jitu, indah susunannya, ada humornya, ada sinisnya, tercampur ejekan yang pedas, yang dilemparkan kepada si penjajah, tetapi selanjutnya juga memberikan pandangan-pandangan yang dapat direnungkan untuk pihak sana, dan juga untuk pihak kita.[17]

Kembali kepada Komite Bumiputera yang didirikan oleh Cipto dan Suwardi. Brosur pertama yang dikeluarkan oleh Komite tersebut adalah karangan Suwardi tersebut di atas. Tulisan "Seandainya saya seorang Belanda"[18], merupakan reaksi terhadap rencana Pemerintah Belanda memperingati 100 tahun kemerdekaan Negeri Belanda yang diadakan di Indonesia, dilakukan oleh seluruh penduduk. Di bawah ini disertakan kutipan Suwardi:

> *"Rupa-rupanya segenap penduduk negeri ini diharuskan mengetahui, bahwa tepat dalam bulan Nopember yang akan datang ini, Nederland menjadi kerajaan kembali dan rakyatnya menjadi bangsa lagi yang merdeka dan berdaulat, sekalipun dalam barisan negara-negara yang merdeka berdiri paling belakang . . . . . .*
> *Saya dapat menempatkan diriku dalam rasa-hatinya para patriot Belanda sekarang, yang berkesempatan mengadakan perayaan yang mulia itu . . . Aku akan berteriak-teriak gembira sambil melihat berkibarnya Sang Triwarna, tak jemu-jemu aku akan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan* ***"Wilhelmus"*** *dan* ***"Wien Nederlands Bloed"****. Kepada semua orang Belanda di Insulinde ini, aku akan minta bantuan uang, tidak hanya untuk membiayai perayaan-perayaan tersebut, tetapi juga untuk membantu "rencana tentara laut"nya Colijn, guna mempertahankan kemerdekaan*

Nederlands itu, ... seandainya aku seorang Belanda, aku merasa mungkin akan berbuat apa saja."[19]

Seterusnya ia memberi saran-saran, peringatan kepada Pemerintah Belanda, antara lain sebagai berikut:

"Andai aku seorang Belanda, tidaklah aku akan merayakan perayaan kemerdekaan bangsaku di negeri yang rakyatnya tidak kita beri kemerdekaan . . . . . Tidak dengan sengaja seolah-olah kita berteriak-teriak: Lihatlah, hai orang-orang, bagaimana caranya kita memperingati kemerdekaan kita. Cintailah kemerdekaan, karena sungguh bahagialah rakyat yang merdeka lepas dari penjajahan. . . . . .
Andai aku seorang Belanda, pada saat ini juga aku memprotes hajat mengadakan peringatan itu. Aku akan mengingatkan kawan-kawanku di koloni, bahwa berbahayalah di waktu ini mengadakan perayaan-perayaan kemerdekaan itu; aku akan menasehatkan sekalian orang Belanda supaya janganlah menghina rakyat di Hindia Belanda, yang kini mungkin menunjukkan keberanian dan mungkin akan bertindak pula; sungguh aku akan protes dengan segala kekuatan yang ada padaku. Tetapi . . . aku bukan seorang Belanda; aku hanya seorang putera dari negeri ini, seorang "pribumi" di negeri jajahan Belanda ini; karena itu aku tidak akan protes. . . sebagai "inlander" aku wajib ikut merayakan hari kemerdekaan Nederlands, yakni negeri tuan-tuan kita."[20]

Pada bagian akhir tulisan tersebut, Suwardi memberi gambaran segi-segi positif dari tindakan ikut merayakan hari kemerdekaan Belanda itu bagi bangsa Indonesia. Ia menulis bahwa bagi orang-orang Belanda, perayaan itu sedikit pun tidak ada manfaatnya, sedang bagi kita ada, yaitu:

1. Bahwa niat perayaan itu mengingatkan kepada rakyat, selama Idenburg menjabat wali negara, Negeri Belanda tidak akan memberi kemerdekaan kepada kita.
2. Hajat perayaan itu memberi pengajaran kepada kita, bahwa tiap-tiap orang wajib memperingati hari pernyataan kemerdekaan rakyatnya dengan sekhitmad-khitmadnya.[21]

Suwardi juga menganjurkan dibentuknya "Panitia Nasional" untuk bangsa Indonesia yang terkemuka, dengan maksud agar pada hari perayaan kemerdekaan Nederland itu, panitia mengirimkan telegram pernyataan selamat kepada Ratu Belanda, dengan disertai permohonan agar artikel 111 Peraturan Pemerintah dibatalkan dan segera dibentuk Parlemen.

Sebagai penutup Suwardi menulis,

"Bukankah menarik perhatian, bahwa justru pada Hari Kemerdekaan Bangsa Belanda, Panitia memajukan permintaan kepada Sri Ratu Belanda, untuk mengakhiri penjajahan Nederland terhadap rakyat yang 40 juta banyaknya itu. Itulah pengaruh yang kini sudah timbul, pengaruh daripada niat mengadakan perayaan kemerdekaan, yang kini sedang disiapkan.

Sungguh, seandainya saya seorang Belanda, tidaklah saya merayakan peringatan kemerdekaan di negeri yang masih terjajah itu."[22]

Dalam membela rakyatnya, Suwardi menulis bahwa bukan saja tidak adil, tetapi sangat tidak patut, apabila penduduk bumiputera disuruh menyumbang uang pula untuk membelanjai pesta itu. Tidak hanya diminta untuk ikut berpesta, tetapi juga hendak dikosongkan kantongnya. Sungguh suatu penghinaan lahir dan batin, kata Suwardi.

Dari pihak Belanda terutama yang termasuk golongan konservatif, menganggap salah apa yang dikatakan Suwardi itu. Di dalam harian *Preanger Bode* terdapat karangan H. Mulder

dengan kepala: "Seandainya saya seorang Bumiputera", sebagai reaksi terhadap tulisan Suwardi. Isi tulisan H. Mulder demikian kotornya, sehingga banyak orang Belanda yang tidak dapat menerimanya.

Pemerintah Hindia Belanda segera melakukan tangan besi. Opsir Justisi di Jakarta berangkat ke Bandung untuk melakukan pemeriksaan terhadap Komite Bumiputera. Sementara itu Cipto Mangunkusumo menulis dalam harian *De Expres*, sebuah karangan dengan kepala "Kekuatan atau Ketakutan?" dan kemudian disusul dengan tulisan Suwardi dalam *De Expres* dengan kepala "Satu buat Semua, tetapi juga Semua buat Satu".

Pada waktu itu D. Dekker datang di Indonesia kembali dari Negeri Belanda. Setelah memperhatikan sepak terjang kawan-kawan seperjuangannya, maka pada 5 Agustus 1913 ia menulis di harian *De Expres*, dengan kepala "Pahlawan kita: Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat".

Akibat artikel dan tulisan-tulisan tersebut, ketiga pemimpin *Indische Partij* ditangkap dan ditahan. Dalam waktu yang amat singkat, pada 18 Agustus 1913 keluarlah surat keputusan dari wali negara untuk tiga orang pemimpin tersebut. Ketiganya dikenakan hukuman buang: Suwardi ke Bangka, Cipto Mangunkusumo ke Banda Neira dan Douwes Dekker ke Timor Kupang. Keputusan ini disertai ketetapan bahwa mereka bebas untuk berangkat keluar jajahan Belanda. Ketiganya ingin mengganti hukuman interniran itu dengan hukuman eksternir dan memilih Negeri Belanda sebagai tempat pengasingan mereka.

Ketika Suwardi ditahan dalam penjara, ia dapat menyelundupkan surat yang dikirim kepada D. Dekker. Ia berkata sebagai berikut:

> *"Kita sedang membuat sejarah. Tanah air meminta korban, dan di sinilah kita, siap sedia memberi korban sesuci-sucinya. Tak sekejap mata pun kita pernah kehilangan jiwa*

satria kita. Seluruh penjara menjunjung tinggi dan mencintai kita sebagai pembela bangsa."[23]

Dalam surat lain ia berkata, bahwa hatinya besar dan gembira, setelah ia mengetahui bahwa seluruh keluarganya menghadapi peristiwa tersebut dengan tenang dan bahkan mereka itu merasa bangga. Kemudian ia menulis sebagai berikut: "Bagaimana pendirian kita sekarang? Kita tak akan mundur setapak pun. Dan seorang ksatria hanya berbicara satu kali."

Ketika berada di tahanan, Suwardi sakit keras. Sebelumnya ia tidak diperkenankan menerima tamu, walaupun tamu itu istrinya atau orang tuanya. Tetapi ketika ia sakit, istri dan ayahnya dapat menengoknya dan waktunya sangat terbatas, tidak lebih dari lima belas menit.

Setelah putusan Pemerintah dijatuhkan, dan Tiga Serangkai tersebut memilih Negeri Belanda sebagai tempat pengasingannya, maka organisasi atau Pergerakan Rakyat lainnya, seperti *Budi Utomo* dan Sarikat Islam mengumpulkan dana untuk memungkinkan ketiga pemimpin itu berangkat bersama keluarganya. Tiga pemimpin itu adalah korban yang pertama-tama. Pada 6 September 1913, tepat hari ulang tahun pertama *Indische Partij*, ketiga pemimpinnya meninggalkan tanah air menuju ke tempat pengasingan.

Suwardi pada waktu itu adalah pengantin baru. Mereka sudah menikah, akan tetapi belum diresmikan di depan masyarakat. Peresmian itu terpaksa tidak dilaksanakan, karena mereka harus segera meninggalkan tanah air. Pada malam hari, sebelum mereka berangkat, diadakan pegelaran wayang kulit untuk menghormat akan berangkatnya pemimpin-pemimpin tersebut bersama keluarganya ke Negeri Belanda, tempat pengasingan mereka. Hadir pada malam itu, Kiai Haji Dahlan, Bapak Muhammadiyah, bersama istri. Keduanya sangat terharu menyaksikan peristiwa itu.

Dalam perjalanan menuju ke tanah pengasingan, Suwardi berkirim surat yang ditujukan kepada kawan-kawan seperjuangan di tanah air. Surat itu tertanggal 14 September 1913 dikirim dari Teluk Benggala dan ditulis di atas kapal "Bulow".

Kepala dari tulisan itu ialah: "Peringatan dan Perampasan Kemerdekaan". Beberapa pesannya adalah sebagai berikut:

Hai saudara-saudaraku di Timur jauh, berdaya upayalah. Perayaan tidak boleh langsung. Janganlah kamu sekalian suka diludahi mukamu. Segala sesuatu dalam perayaan nanti akan disengaja untuk menyakitkan hatimu, setidak-tidaknya menghina atau mengabaikan hak-hak kebangsaanmu. Jika nanti pada bulan Nopember si Tiga warna berkibar, itu akan mengingatkan padamu, bahwa kamu tidak mempunyai bendera sendiri yang dapat berkibat dengan megahnya di samping bendera Belanda itu. Jika nanti kamu mendengar lagu-lagu kebangsaan, kamu akan merasa bangsamu tidak mempunyai lagu kebangsaan sendiri yang harus dinyanyikan juga oleh bangsa-bangsa lain yang berada di tanah airmu dan bersukaria itu.

. . . Akan terus langsungkah perayaan pada bulan Nopember nanti? Tidak, katakan tidak. Dan jika protesmu tidak diperdulikan karena tidak mempunyai hak suara, ya kalau begitu. . . . . .

Ah jangan, tinggallah tenang dan ucapkan syukur, bahwa kamu sudah menentang akan penghinaan atas dirimu. Tinggallah selama perayaan itu di rumah saja, sediakanlah bunga-bunga dan bakarlah kemenyan di kamarmu, sujudlah di hadlirat Tuhan, karena hanya Tuhan-lah yang suka mendengarkan suara hatimu dan akan memberi keadilan padamu. Dan bersedia-sedialah. Waktu perayaan kita akan datang juga. Marilah kita doakan semoga waktu itu lekas datang."[24]

Dari tiga pemimpin *Indische Partij* yang diasingkan tersebut, dr. Cipto Mangunkusumo diizinkan pulang kembali ke Indonesia pada 1914, karena ia sakit. Douwes Dekker kembali pada 1918 dan Suwardi pada 1919. Sebenarnya Suwardi telah dibebaskan pada 17 Agustus 1917, akan tetapi ia bersama keluarganya baru dapat pulang ke tanah air pada September 1919.

CATATAN
BAB III

1. Sitisumandari Soeroto, *Kartini*, 1977 : 402
2. Sitisumandari Soeroto, *Kartini*, 1977 : 403
3. KHD, *Kenang-kenangan*, 1952 : 232
4. KHD, *Kenang-kenangan*, 1952 : 232
5. KHD, Cerita Pendek dari Kehidupan Dr. Setyabudi, *Waspada*, (Medan), Rabu 12 Oktober 1949
6. KHD, Cerita *Waspada*, 12 Oktober 1949
7. KHD, Cerita, *Waspada*, 12 Oktober 1949
8. Koch, *Menuju Kemerdekaan*, 1950 : 44
9. KHD, *Kenang-kenangan*, 1952 : 233
10. KHD, *Kenang-kenangan*, 1952 : 233
11. KHD, *Kenang-kenangan*, 1952 : 234
12. Sartono Kartodirdjo, *Lembaran Sejarah I*, 1967 : 45
13. Koch, *Menuju*, 1950 : 49
14. Koch, *Menuju*, 1950 : 52
15. KHD, Cerita, *Waspada*, 12 Oktober 1949
16. KHD, *Kenang-kenangan*, 1952 : 220
17. KHD, *Masalah Kebudayaan*, 1959 : 19
18. Naskah asli dalam bahasa Belanda: *"Als ik eens Nederlander was"*.

19. KHD, *Kenang-kenangan*, 1952 : 257
20. KHD, *Kenang-kenangan*, 1952 : 258–259
21. KHD, *Kenang-kenangan*, 1952 : 260
22. KHD, *Kenang-kenangan*, 1952 : 262
23. Abdurrachman, Cita-cita dan Tindak Perbuatan Nasional Revolusioner Suwardi Suryaningrat, 1913–1922, *Pusara*, Juli–Agustus 1965.
24. *Taman Siswa 30 Tahun*, 1952 : 188

BAB IV HIDUP DI TANAH PENGASINGAN

Setibanya di tanah pengasingan, pertama-tama yang harus dilakukan oleh Suwardi dan istri adalah menyesuaikan diri dengan iklim dan lingkungan tempat tinggal baru. Jika di daerah tropika orang pada umumnya tidak memusingkan macam pakaian untuk musim panas atau musim hujan, maka tidak demikian halnya di negeri dingin. Setiap orang harus memiliki baju, mantel dan alat perlengkapan seperti sepatu, sarung tangan, topi dan kain leher khusus untuk musim dingin. Selain itu juga harus disediakan beberapa selimut tebal untuk keperluan tidur, di samping alat pemanas pada tiap-tiap rumah. Cara mengatur rumah tangga juga harus disesuaikan dengan lingkungan dan keadaan baru.

Belum lagi setahun lamanya Suwardi berada di tanah pengasingan, berkorbarlah perang di Eropa yang dikenal sebagai Perang Dunia I, berlangsung selama empat tahun (1914–1918). Perang ini merupakan perang besar yang pertama sesudah perang Napoleon, satu abad yang lalu. Berbeda dengan perang-perang sebelumnya, perang ini berlangsung lebih dahsyat dan lebih banyak meminta korban jiwa.

Sesungguhnya sejak awal abad ke-20, udara politik di Eropa makin hari makin panas. Persaingan di antara negara-

negara besar untuk kepentingan kapitalisme dan imperialismenya makin menuju ke arah persengketaan yang makin menuju kian meruncing. Berbagai macam krisis sebelum Krisis Balkan 1914 dapat diatasi dengan jalan damai.

Sehubungan dengan niat untuk menjaga perdamaian, maka ahli-ahli negara berpegang pada kebijaksanaan bangsa Romawi: *Si vis pacem, para bellum* yang berarti jika menghendaki damai, bersiap-siaplah akan berperang. Akibatnya belanja untuk angkatan perang tiap tahunnya bagi masing-masing negara besar diperbesar. Pembentukan persekutan-persekutuan dimaksudkan agar menjadi lebih kuat dalam menghadapi lawannya. Tetapi adanya persekutuan ini membuat peperangan makin cepat meluas.

Pada 28 Juni 1914 seorang nasionalis Serbia bernama Princip berhasil membunuh putera mahkota Austria – Honggaria – Pangeran Francis Ferdinand – dengan istri di Kota Serajewo. Kota ini adalah ibukota Provinsi Bosnia dan Herzegowina yang pada 1908 dianeksasi oleh Austria-Hongaria. Serbia sangat menginginkan Bosnia. Di samping itu penduduk daerah tersebut yang terdiri atas orang-orang Serbia dan Kroatia ingin melepaskan diri dari kekuasaan raja Habsburg (Austria-Hongaria). Akibat pembunuhan tersebut, pemerintah Serbia-Hongaria minta pertanggung-jawaban dari pemerintah Serbia, akan tetapi pemerintah Serbia menolak. Sebulan kemudian Austria-Hongaria mengumumkan perang kepada Serbia (28 Juli 1914). Dalam satu minggu itu negara-negara besar di Eropa terseret dalam perang Negara Sentral (Austria-Hongaria dan Jerman) melawan Negara Sekutu (Serbia, Rusia, Prancis dan Inggris). Orang mengatakan bahwa revolver Princip juga membunuh beberapa puluh juta manusia.[1]

Pecahnya Perang Dunia 1914 menimbulkan kesan yang tidak baik bagi Eropa, karena benua yang tua ini ternyata belum mampu mengatasi persengketaan mereka dengan jalan damai.

Agama Nasrani dan peradaban Eropa tidak dapat menghalang-halangi meletusnya perang itu. Lebih-lebih lagi perdamaian tahun 1919 hanya merupakan hasil adu kekuatan, tidak memecahkan masalah-masalah yang dihadapi imperialisme.[2]

Hampir seluruh negara di Eropa terseret dalam perang besar itu. Hanya beberapa negara saja – Spanyol, Swiss, Skandinavia dan Negeri Belanda – yang bersikap netral, tidak memihak salah satu dari kelompok negara-negara yang sedang berlawanan.[3] Di Negeri Belanda umum berpendapat bahwa karena perang tersebut bukan konflik ideologi, maka mereka tidak diwajibkan memilih pihak. Akan tetapi kedua belah pihak yang berlawanan yaitu Negara Sekutu dan Negara Sentral berusaha menarik Negeri Belanda pada pihaknya. Pada bulan Agustus 1914 sesudah Jerman menyerbu Belgia, dan dalam waktu singkat berhasil menddukinya, Jerman ingin memaksa Negeri Belanda agar melepaskan kenetralannya. Pada bulan berikutnya Pemerintah Belanda diancam oleh Inggris agar mau memihak Sekutu. Ancaman itu berbunyi: jika Negeri Belanda tidak memihak Sekutu dan kelak Sekutu keluar sebagai pemenang sesudah perang berakhir, Belanda harus menanggung kenetralannya dengan menyerahkan daerahnya – Zeeuws-Vlaanderen – sebagai ganti rugi kepada Belgia.

Terhadap ancaman-ancaman tersebut di atas, Belanda tetap pada pendiriannya semula. Kaum politisi Belanda selalu berusaha agar kedua belah pihak yang berlawanan mendapatkan keuntungan yang sama dari kenetralan negerinya. Untuk keperluan ini, Belanda harus memberikan konsesi-konsesi. Tetapi sesungguhnya konsesi yang lebih banyak diberikan kepada pihak Sekutu. Hal ini disebabkan karena Negeri Belanda harus mempertahankan kelestarian perdagangannya melalui laut untuk menjamin kebutuhan pangan dan bahan baku bagi industrinya yang sangat tergantung pada luar negeri.[4] Negara-negara Sekutu bersedia memberi kebebasan berlayar kepada

kapal-kapal Belanda, apabila Pemerintah Belanda mau menjamin bahwa barang-barang yang diangkut dengan kapal-kapal Belanda itu tidak akan diperdagangkan ke Jerman atau ke negara-negara sentral lainnya.

Demikianlah kedudukan Negeri Belanda, negara netral yang termasuk negara kecil yang terletak di antara negara-negara besar yang sedang berperang. Akan tetapi di dalam sejarah, sering terjadi bahwa kenetralan dapat memberi keuntungan ekonomi yang cukup besar. Hal yang demikian itu berlaku pula bagi Negeri Belanda yang letaknya berbatasan dengan Jerman. Maka berlangsunglah perdagangan gelap secara besar-besaran di daerah perbatasan sebelah timur. Akibatnya pada 1914, 1915 dan 1916, industri. pertanian dan pelayaran Belanda mendapat keuntungan besar.[5] Selain perusahaan-perusahaan besar dan petani, juga pemilik toko dan tentara yang bertugas di perbatasan timur yang ikut melakukan perdagangan gelap memperoleh keuntungan besar. Pendapat nasional berkembang dari 2346 juta gulden pada 1914 menjadi 3202 pada 1917.[6]

Walaupun ada lapisan masyarakat yang teruntungkan karena kenetralan negerinya, namun Pemerintah Belanda terpaksa melakukan pinjaman-pinjaman untuk menutup pengeluaran yang sangat besar. Selanjutnya guna pembayaran bunga dan pelunasan hutang, Pemerintah menaikkan pajak langsung dan tidak langsung. Sudah barang tentu biaya hidup rakyat pada umumnya menjadi lebih berat karenanya.

Pada 1917 dan 1918 keadaan makin gawat. Terjadilah stagnasi ekonomi. Bahan makanan sangat terbatas. Pemerintah berusaha keras agar bahan pokok tersebut dapat dibeli oleh rakyat secara merata. Oleh karena itu dilakukannya dengan cara distribusi. Keadaan ini makin memburuk, ketika terjadi pengangguran yang berkembang amat cepat. Daya beli rakyat menjadi sangat rendah sedang biaya hidup makin meninggi sedang upah tidak dinaikkan. Untuk mengatasi keadaan yang

gawat itu, Pemerintah Belanda terpaksa menjual barang-barang kebutuhan primer secara distribusi kepada penduduk, dengan harga di bawah harga pembelian. Cara lain untuk mengatasi kesulitan itu ialah dengan memerintahkan para petani untuk mengurangi pemeliharaan ternaknya dan lebih memperhatikan penanaman bahan makanan, seperti gandum dan kentang.[7]

Demikianlah keadaan politik dan ekonomi Negeri Belanda pada masa Perang Dunia I. Pada waktu itu Suwardi bersama istri tinggal di negeri tersebut sebagai orang buangan. Selama di Negeri Belanda, Suwardi memperkenalkan dirinya dengan nama S. Surya Ningrat. Pemakaian nama ini mungkin karena terpengaruh oleh lingkungan, atau karena menyesuaikan diri dengan kebiasaan orang Barat.

Di tanah pengasingan S. Surya Ningrat dan dua orang kawan seperjuangannya hidup dengan biaya yang sangat terbatas. Pemerintah Belanda memberi bantuan, akan tetapi sangat terbatas, berhubung ketiga pemimpin itu menolak keputusan pembuangan yang telah diputuskan semula. Bantuan lain diterima dari Indonesia yang dikirim oleh "Dana TADO"[8], ialah dana dari perkumpulan N.I.P. *(Nationaal Indische Partij).* Partai ini adalah partai baru yang menampung bekas anggota I.P. *(Indische Partij).* Maksud diadakan dana tersebut untuk menunjang perjuangan menuju ke Kemerdekaan. S. Surya Ningrat dengan istri mendapat kiriman f 150,– sebulan, demikian pula dr. Cipto Mangunkusumo dengan istri. Dokter Douwes Dekker dengan istri dan dua orang puteranya mendapat kiriman f 250,–.

Walaupun dalam keadaan material sangat terbatas, namun S. Surya Ningrat selalu memegang teguh prinsip berdiri di atas kaki sendiri. Bantuan yang sekiranya akan mengikat ditolaknya, agar ia tidak kehilangan kebebasan. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini perbuatan Mr. Abendanon – teman dekat R.A. Kartini – yang pada suatu ketika berkunjung ke rumah

S. Surya Ningrat untuk saling bertukar pikiran. Melihat keadaan dan penghidupan pemimpin yang sedang menjalani hukuman pengasingan itu serba dalam kekurangan, maka ia ingin memberi bantuan sekadarnya. Ketika ia akan pulang, diletakannya uang sebesar f 150,– di bawah cangkir. Akan tetapi S. Surya Ningrat menyerahkan uang itu kembali disertai ucapan terima kasih serta permintaan maaf, bahwa ia tidak dapat menerima bantuan tersebut, karena ia ingin hidup atas kekuatan sendiri.[9] Berdasarkan prinsip yang sama, S. Surya Ningrat menolak tawaran dan nasihat Mr. van Deventer supaya ia mau menjadi guru Sekolah Dasar Belanda (H.I.S.) di pulau Bangka, tempat pengasingan untuknya menurut keputusan Pemerintah. Tawaran itu juga ditolak meskipun Pemerintah menyanggupkan akan membebaskannya dari hukuman, apabila ia menerima jabatan tersebut.[10]

Contoh lain di antaranya ialah: ketika S. Surya Ningrat sudah mengakhiri hukumannya dan akan pulang ke tanah air. Beberapa tokoh terkemuka Belanda di antaranya: Stokvis, Van Deventer dan Jonkman menawarkan tiket kapal kelas satu. S. Surya Ningrat menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan kawan-kawannya itu disertai permintaan maaf, bahwa ia terpaksa tidak dapat menerimanya berhubung ia telah mendapatkan tiket kapal kelas tiga, sesuai dengan hak yang diberikan oleh Pemerintah Belanda. Karena alasan itu Stokvis dan kawan-kawan datang lagi untuk menyerahkan uang sebanyak f 3000,– (tiga ribu gulden), hasil pengumpulan secara sukarela di antara kawan-kawan dekat. Tawaran ini pun ditolaknya dengan sopan. Akan tetapi ketika ia sekeluarga akan berangkat menuju tanah air, dengan mendadak puteranya yang pertama sakit keras. S. Surya Ningrat membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk biaya pengobatan puteranya itu. Maka ia datang pada Stokvis untuk meminjam uang yang pernah ditawarkan kepadanya beberapa waktu yang lalu. Stokvis

memberinya dan sama sekali tidak mengharapkan kembalinya uang itu. Tetapi ternyata setelah S. Surya Ningrat telah berada di tanah air, uang tersebut dikembalikan secara mengangsur, sebanyak f 300,– (tiga ratus gulden) tiap bulannya.[11]

Di Negeri Belanda S. Surya Ningrat bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di berbagai universitas di negeri tersebut. Di antaranya adalah: Sartono, Subardjo, Laoh, Samsi. Setelah mereka kembali ke tanah air, mereka menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan perjuangan nusa dan bangsanya. Dengan pemuda-pemuda Indonesia yang ada di Negeri Belanda itu, S. Surya Ningrat sering mengadakan pertemuan untuk saling bertukar pikiran. Biasanya pertemuan dilangsungkan di tempat kediamannya. Pada pertemuan-pertemuan itu semuanya dapat menikmati masakan Indonesia. Keluarga S. Surya Ningrat paling senang membeli hati ayam, rempela, iso, babad dan sebangsanya, karena harganya sangat murah. Orang Belanda tidak mau makan bagian dalam ayam tersebut, dan juga bagian lain seperti sayap, leher, kepala dan kaki. Karena orang Indonesia biasa makan sambal-goreng hati dan rempela, soto babad, goreng iso atau dimasak dengan bumbu lain yang sedap penuh variasi. Berhubung seringnya S. Surya Ningrat membeli bagian dalam ikan ayam tersebut dalam jumlah yang besar, maka suatu ketika bertanyalah si penjual ikan sebagai berikut: "Berapakah anjing tuan di rumah?". Perlu diketahui bahwa di Negeri Barat usus, babad dan sebagainya adalah untuk makanan anjing.

Untuk mencukupi biaya hidup yang cukup tinggi, S. Surya Ningrat mengirimkan artikel-artikel atau karangan lainnya ke surat kabar atau majalah di Negeri Belanda. Ia juga tetap membantu pengisian surat kabar "Utusan Hindia" yang diasuh oleh Cokroaminoto. Sebagai imbalannya ia menerima uang f 50,– setiap bulannya. Dari sahabat-sahabatnya bangsa Indonesia yang telah lebih lama tinggal di Negeri Belanda, S. Surya Ning-

rat mendapat bantuan berupa barang-barang dan bahan makanan. Mr. Gondowinoto memberi bantuan alat-alat rumah tangga, beras dan pakaian.[12] Dari bekas gurunya di Stovia, bernama Dr. Koolemans Beymen yang pada waktu itu menjadi profesor di Universitas Den Haag, ia bersama keluarganya banyak mendapatkan bantuan untuk keperluan kesehatannya.[13]

S. Surya Ningrat bersama keluarganya hidup dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan lingkungan yang dikenal dan dialaminya. Ia mengalami hidup di negara agraria dan dibesarkan dalam lingkungan feodal. Akan tetapi karena ia juga mengikuti pendidikan secara Barat di Sekolah Dasar Belanda, *Kweekschool* dan *Stovia*, maka ia telah mengenal pula kebudayaan Barat, walaupun hanya sedikit. Pada waktu berada di Negeri Belanda, maka ia mengenal dari dekat kebudayaan dan peradaban Barat.

Salah satu kontras antara kebudayaan Timur dan Barat adalah adanya nilai kebudayaan gotong royong dan individualisme. Dua nilai kebudayaan ini biasanya dipakai untuk membedakan antara kebudayaan Barat dan Timur. Nilai gotong-royong adalah konsesi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerja sama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar.[14] Nilai gotong royong itu mempunyai ruang lingkup yang amat luas, sehingga hampir semua karya manusia biasanya dilakukan dalam rangka kerja sama dengan orang lain. Ini berlaku di negara-negara Asia pada umumnya, walaupun pada waktu sekarang unsur individualisme sudah masuk dalam kebudayaan kita. Di dunia Barat berlaku konsesi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu dapat berhasil sepenuhnya atas usaha sendiri. Manusia dapat mencapai suatu hasil yang sama sekali terlepas dari usaha dan bantuan orang lain. Ideal ini disebut individualisme.

Berhubung nilai-nilai kebudayaannya berbeda, maka adat-istiadat dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat Barat

dan Timur juga berlainan. Pada masyarakat Barat dan Timur juga berlainan. Pada masyarakat Indonesia yang juga telah mengenal individualisme, sifat gotong royong masih bertahan. Sebaliknya di dunia Barat sifat individualisme sangat menonjol, walaupun di lingkungan masyarakat di luar kota-kota besar masih pula mengenal gotong royong.[15]

Pengenalan S. Surya Ningrat terhadap kebudayaan Barat secara dekat selama ia berada di tanah pengasingan itu, memperkuat keyakinannya, bahwa pengambilan unsur-unsur asing yang bersifat positif akan memperkaya kebudayaan sendiri tanpa melepaskan kepribadiannya sebagai bangsa. Prinsip ini dipegang teguh dan ia selalu menyerukan agar kita jangan segan-segan memasukkan bahan-bahan dan kebudayaan-kebudayaan asing, dari mana pun asalnya. Tetapi harus diingat bahwa dengan bahan-bahan baru itu rakyat kita dapat mempertinggi hidupnya dengan jalan mengembangkan apa yang sudah menjadi milik kita, atau memperkaya dalam arti menambah dengan apa yang belum kita miliki. Kita tidak boleh hanya meniru (mengkopi) belaka. Bahan-bahan baru itu harus di-"olah" atau di-"masak" agar menjadi makanan baru yang lezat rasanya serta menambah kesehatan rakyat dalam arti kultural.[16]

Sebagai contoh disebutkan masakan "nasi goreng", yang tetap merupakan makanan nasional, sekalipun di dalamnya terdapat bahan-bahan asing, ialah mentega dan keju. Demikian pendirian S. Surya Ningrat alias Ki Hajar Dewantara dalam menghadapi kebudayaan asing.

Di Negeri Belanda S. Surya Ningrat bersahabat dengan seorang bangsawan yang dapat mengikuti jaman, seorang putera raja yang mempunyai dasar demokratis dan banyak memikirkan kepentingan rakyat. Sesuai dengan apa yang selalu diusahakannya, bangsawan tersebut adalah seorang yang suka berbuat banyak untuk rakyat, bila diberi kesempatan.[17] Nama

bangsawan itu adalah R.M.A. Suryo Suparto, putera raja Jawa di Mangkunegaran.

Betapa besar gembiranya S. Surya Ningrat ketika mendengar berita bahwa R.M.A. Suryo Suparto tersebut dinobatkan menjadi raja Mangkunegara VII pada 1916. Besar harapannya bahwa sahabatnya yang berpikir modern itu yang sekarang mempunyai kesempatan untuk melaksanakan cita-citanya, dapat bekerja sesuai dengan gagasan-gagasannya yang demokratis. S. Surya Ningrat menilai raja baru ini sebagai seorang yang berpendirian kuat dan yang melalui beberapa percobaan dalam kehidupan telah mencapai kepribadiannya.

Pada waktu ia masix belajar di Negeri Belanda, ia terkenal sebagai tokoh yang sangat simpatik dan pandai bergaul dengan orang-orang muda ataupun orang tua. Ia adalah seorang pemuda yang selalu gembira dan disebut oleh kawan-kawannya "lebah yang selalu menyanyi". Keluarga S. Surya Ningrat sangat senang, apabila ia muncul di rumah keluarga tersebut dengan sekonyong-konyong pada malam-malam *winter* yang dingin. Kedatangannya selalu disertai kebiasaan bersenandungkan lagu-lagu Jawa.[18]

S. Surya Ningrat sangat bangga dengan pangeran tersebut. Seorang yang meninggalkan kehidupan yang mewah, mau bekerja sebagai pembantu juru tulis yang pada waktu itu disebut dengan istilah magang. Kemudian menjadi mantri kabupaten dan sebagian hasil pendapatannya ditabung untuk membiayai berbagai kursus guna menambah pengetahuannya. Karena ia mempunyai kepandaian yang cukup dalam bahasa Belanda dan bahasa Jawa, maka ia diangkat menjadi penterjemah di Surakarta. Kemudian ia pergi ke Negeri Belanda untuk memperdalam pengetahuannya mengenai bahasa-bahasa di Nusantara dan bahasa Belanda. Tetapi selama di negeri dingin itu, ia tetap mengikuti kejadian-kejadian di tanah air. Perhatiannya kepada pergerakan Jawa Muda sangat besar. Oleh sebab itu

ketika ia kembali ke tanah air, ia mendapat penghargaan dari bangsanya, diangkat menjadi Ketua *Budi Utomo*.[19]

Demikian eratnya hubungan S. Surya Ningrat dengan R.M.A. Suryo Suparto yang disebabkan karena satu dengan lainnya merasa sesuai; sesuai dalam cita-cita dan tindak perbuatan, ialah selalu berusaha berbuat untuk rakyat banyak. Hubungan erat ini diteruskan dan sesudah S. Surya Ningrat dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, Sri Paduka Mangkunegara VII memberi perhatian dan bantuan yang besar bagi lembaga Taman Siswa. Di antaranya pernah memberi gedung Milik Mangkunegaran untuk dipinjamkan kepada Taman Siswa cabang Sala. Di komplek Pendapa Agung di Yogyakarta Sri Mangkunegara juga memberi bantuan berupa uang untuk mendirikan rumah tamu yang diperuntukkan tamu puteri dari India yang ingin belajar tari Serimpi Di Taman Siswa.

Demikianlah kehidupan S. Surya Ningrat di tanah pengasingan. Dalam keadaan ekonomi yang sulit, ia berbuat sesuai dengan cita-citanya, merintis jalan untuk perjuangan berikutnya, apabila ia telah kembali di tanah air.

Menurut keputusan Pemerintah, pada 17 Agustus 1917 berakhirlah hukuman pengasingan bagi S. Surya Ningrat. Hukuman itu telah mulai dijalani sejak 18 Agustus 1913. S. Surya Ningrat beserta keluarga merasa puas, karena dapat keluar sebagai pemenang dari segala duka derita yang dialami. Sehubungan dengan pembebasan dari hukuman itu, S. Surya Ningrat menyiapkan diri pulang ke tanah air dan terjun kembali ke medan perjuangan. Melalui surat kabar *"Nieuwe Amsterdammer"* dan *"Het Volk"* Yang terbit pada 15 September 1917, ia menyampaikan kata perpisahan kepada masyarakat Belanda. Tulisan tersebut berkepala: "Kembali Ke Medan Perjuangan". Selain pemberitahuan bahwa sejak 17 Agustus Pemerintah telah mencabut hukuman pembuangan yang dike-

nakan kepadanya, juga dinyatakan beberapa hal dalam tulisan itu sebagai berikut:

> *". . . Di sini kami ingin menyampaikan bahwa kini saya telah mendapatkan kembali kebebasan saya, bebas dari suatu janji atau pernyataan apa pun juga dari pihak saya, perjanjian yang hanya merupakan suatu hubungan jauh dengan sukses yang saya capai ini.*
> *Perdamaian ini tidak didiktekan kepada saya; tetapi ia membawakan kemenangan bagi saya."*[20]

Selama di tanah pengasingan, bertambahlah keluarga S. Surya Ningrat. Tuhan Yang Mahaesa menganugerahinya dua orang putera, seorang puteri dan seorang lagi putera. Nama-nama yang diberikan adalah Asti Wandansari dan Subroto Ario Mataram. Yang terakhir disebut itu adalah nama pemberian dr. Douwes Dekker, teman senasib dan seperjuangan S. Surya Ningrat.

Keinginan untuk segera kembali ke tanah air terpaksa ditunda, karena perang di Eropa belum selesai. Bahkan pada saat-saat itu keadaan ekonomi Negeri Belanda semakin gawat. Di samping itu putera sulung S. Surya Ningrat sakit keras. Mengenai biaya hidupnya masih ditanggung oleh "Dana Tado". Sambil menunggu kesempatan untuk dapat pulang ke Indonesia, ia melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan. Akhirnya pada 26 Juli 1919 keluarga S. Surya Ningrat meninggalkan negeri dingin, bertolak menuju ke tanah air. Pada 5 September 1919 mereka mendarat di Jakarta dengan selamat.

CATATAN

1. Brinton and Wolf, *A History of Civilization II*, 1965 : 386
2. Romein, *Aera Eropa*, 1956 : 143
3. Berkelbach van der Sprenkel en Brandt, *De Pelgrimstocht der Menschhied*, Utrecht, 1952 : 697
4. Kossmann, *De Lage Landen*, 1976 : 418
5. Kossmann, *De Lage Landen*, 1976 : 422
6. Kossmann, *De Lage Landen*, 1976 : 422
7. Kossmann, *De Lage Landen*, 1976 : 423
8. *Tado* singkatan dari *Tot aan de Onafhankelijkheid* artinya menuju ke Kemerdekaan, (M. Tauchid, *Perjuangan dan Ajaran Hidup KHD)*, 1963 : 24
9. M. Tauchid, *Perjuangan*, 1963 : 24
10. m. Tauchid, *Perjuangan*, 1963 : 25
11. M. Tauchid, *Perjuangan*, 1963 : 26–27
12. M. Tauchid, *Perjuangan*, 1963 : 24
13. Pranata Ssp, *Ki Hadjar Dewantara*, 1959 : 49
14. Kuntjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, 1974 : 126–127
15. Kuntjaraningrat, *Kebudayaan*, 1974 : 127

16. KHD, Hubungan dan Imbangan antara Kebudayaan Daerah dengan Kebudayaan Nasional, Harian *"Kedaulatan Rakyat"*, 20 Mei 1953 atau Karya IIa : 103
17. KHD, Seorang Raja Jawa Yang Modern, *Hindia Putra Thn. I;* 1916–1917 atau Karya IIa : 334
18. KHD, Seorang Raja, *Hindia Putra* Thn. I atau *Karya* IIa : 335
19. KHD, *Karya* IIa : 335
20. KHD, *Pusara* Nopember 1932, hal. 23

BAB V KEGIATAN-KEGIATAN SELAMA DI TANAH PENGASINGAN

Seperti halnya dengan dua orang kawan seperjuangannya, S. Surya Ningrat hidup sebagai orang buangan di Negeri Belanda. Akan tetapi karena Negeri Belanda adalah negara yang menganut faham demokrasi, maka tiga pemimpin yang diasingkan itu masih dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam batas-batas tertentu.

Bagi S. Surya Ningrat kepergiannya ke negeri dingin itu merupakan kesempatan dan kemungkinan untuk mengembangkan pengetahuannya, bakatnya dan jiwanya dengan dasar-dasar yang lebih luas dan dalam. Di tempat pengasingan ini ia berusaha memupuk bakat seninya dan mengembangkan kesenangan menulisnya. Untuk memperdalam pengetahuannya dalam ilmu jurnalistik ia belajar pada S. de Roode, pimpinan Harian *"Het Volk"* dan Mr. Wiessing, pemimpin harian *"De Nieuwe Amsterdammer"*.[1] Bakat seninya dikembangkan dengan mempelajari seni drama dari ahli seni drama Herman Kloppers.

Pada waktu itu masyarakat Belanda pada umumnya belum mempunyai gambaran yang benar tentang keadaan di Indonesia. Dari keterangan-keterangan yang diperoleh dari Pemerintahnya bahkan timbul gambaran-gambaran yang kabur.

Oleh sebab itu, maka S. Surya Ningrat dan kawan-kawannya sering melakukan perjalanan keliling daerah untuk memberi penerangan tentang bagaimana keadaan Indonesia yang sebenarnya. Penerangan tersebut diberikan melalui ceramah-ceramah atau dengan perantaraan film. Kegiatan ini dilakukan atas anjuran perkumpulan *"Algemeen Nederlands Verbond"*, *"Oost en West"* dan *"Sociaal Demokratis Arbeiders Partij"*.

Kedatangan pemimpin-pemimpin *Indische Partij* di Negeri Belanda, membawa pengaruh besar pada perkembangan *Indische Vereeniging*, perkumpulan mahasiswa Indonesia yang berada di Negeri Belanda. Sejak 1916 S. Surya Ningrat mendapat kepercayaan untuk menjadi redaktur majalah "Hindia Putera", milik *Indische Vereeniging* (I.V.). Kedudukan ini diterima sesudah persyaratan yang diajukan kepada I.V. diterima, ialah bahwa sifat majalah harus umum, artinya tidak menjadi organ politik semata-mata. Majalah itu akan diisi dengan hal-hal yang penting dan berguna bagi rakyat Indonesia, baik yang bersifat politik maupun kebudayaan.[3]

Di Negeri Belanda terbit pula mingguan *"De Indier"*, dengan pimpinan redaksi dr. Cipto Mangunkusumo. Mingguan ini bersifat politik sepenuhnya, bercorak radikal dan merupakan alat untuk melanjutkan perjuangan *"Indische Partij"* di Indonesia. Dr. Cipto dan dr. Douwes Dekker sangat aktif mengisi *"De Indier"*. Sebaliknya selama 1913 sampai 1914 S. Surya Ningrat hanya memasukkan dua karangan pada mingguan tersebut. Ini tidak berarti bahwa S. Surya Ningrat meninggalkan gelanggang politik. Ia mempunyai pendapat bahwa belumlah sampai saatnya untuk menarik I.V. untuk mengikuti cita-cita nasional dan radikal dari *Indische Partij*. Melalui tulisan-tulisannya, S. Surya Ningrat bertujuan pertama-tama untuk mempengaruhi pendapat umum di Negeri Belanda terhadap masalah-masalah yang ada di Hindia Belanda.[4] Meskipun majalah "Hindia Putera" tidak menampakkan diri sebagai majalah yang

bersifat politis, namun dari pihak Belanda ada yang memperingatkan agar anggota I.V. bersikap hati-hati, karena redaktur majalahnya adalah seorang buangan politik.

Betapa besarnya perhatian S. Surya Ningrat terhadap negara dan bangsanya, dapat diikuti dari kata sambutan yang ditulisnya pada waktu penerbitan majalah "Hindia Putera" akan dihentikan, berhubung tidak adanya biaya. Ia berpendapat bahwa suatu majalah bercorak politik dalam bahasa Melayu dengan bantuan keuangan dari Hindia, akan lebih besar kelestarian hidupnya daripada organ mereka pada saat itu. Ia menyatakan sebagai berikut:

> *"... menurut pendapat saya telah tiba waktunya I.V. dengan tanpa ragu-ragu untuk merebut tempat kehormatan di dalam kancah perjuangan politik. Hal ini adalah mungkix, karena sungguh pun kita mempunyai pendirian yang berbeda-beda, tetapi kita berasal dari satu rumah. Lain dari itu kita menyadari bahwa kita semua dipersatukan oleh satu cita-cita yang luhur.*[5]

S. Surya Ningrat yang menyadari betapa pentingnya arti majalah bagi suatu perkumpulan, merasa sangat sayang dengan akan dihentikannya penerbitan "Hindia Putera" itu. Ia berpendapat bahwa jurnalistik merupakan alat untuk meneruskan dan menyebarluaskan cita-cita. Tidak mengherankan bahwa ia giat memasukkan berbagai karangan untuk harian, majalah dan mingguan.

Bahwa pengaruh tiga orang pemimpin I.P. yang dibuang ke Negeri Belanda kepada perkumpulan I.V. itu besar, diakui oleh I.V. sendiri. Hal ini dikemukakan dalam buku kenang-kenangannya yang terbit pada 1938. Perubahan nama perkumpulan tersebut merupakan bukti adanya perkembangan yang bersifat radikal. Semula menggunakan nama *"Indische Vereeniging"* (1908), kemudian pada 1912 menjadi *"Indonesische*

Vereeniging". Nama majalahnya juga mengalami perubahan, dari "Hindia Putera" menjadi "Indonesia Merdeka" pada 1924.

Selain bekerja sebagai redaktur "Hindia Putera", membantu *"De Indier"* di Negeri Belanda dan membantu "Utusan Hindia" yang terbit di tanah air, S. Surya Ningrat juga membantu majalah *"Het Indonesische Verbond Van Studeerenden"* bersama dokter Yap Hong Cun dan Mr. Jonkman. Dokter H. Yap adalah seorang dokter spesialis mata yang terkemuka dan mempunyai rumah sakit mata di Yogyakarta. Ia adalah teman karib S. Surya Ningrat dan menyimpan guntingan-guntingan karangan S. Surya Ningrat yang berasal dari mingguan *"Nieuwe Amsterdammer"*. Pada 1960 guntingan-guntingan tersebut dicetak disertai tulisan tambahan oleh putera dr. Yap Hong Cun, bernama dr. Yap Kie Cong, seorang dokter spesialis mata juga. Cetakan tersebut diserahkan kepada Ki Hajar Dewantara dan Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Karangan S. Surya Ningrat dalam warta mingguan *"Nieuwe Amsterdammer"*, bertanggal 2 Juni 1917 adalah mengenai "Aliran-aliran dan partai-partai di Hindia Timur".[6] Karangan ini aslinya ditulis dalam bahasa Belanda dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Drs. Abdurrachman Suryomihardjo. Isinya menerangkan adanya pergerakan rakyat dimulai dari Budi Utomo sampai Sarikat Islam. Masing-masing partai diulas dan dibandingkan. Artikel tersebut disajikan dengan maksud agar masyarakat Belanda tahu akan pengembangan politik di Indonesia, dan untuk menyanggah pendapat umum di Negeri Belanda bahwa rakyat Indonesia belum bergerak dan akan tetap setia kepada Sri Ratu.

Ketika di Eropa pecah perang yang terkenal dengan nama Perang Dunia I, timbullah maksud di kalangan pemimpin-pemimpin pergerakan rakyat dan di kalangan orang Belanda yang ada di Indonesia, untuk mengirim utusan ke Negeri Belanda. Perutusan tersebut diberi nama *"Comitee Indie Weerbaar"*

atau "Komite Hindia Kuat Bertahan Dari Serangan Musuh". Komite itu dibentuk, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Negeri Belanda yang pada waktu itu diancam oleh bahaya perang. Mereka berpendapat bahwa Hindia Belanda harus mampu mempertahankan diri sendiri. Dalam Komite yang dikirim ke Negeri Belanda itu duduk dua orang Indonesia ialah: Abdul Muis dari *Sarikat Islam* dan Dwijosewoyo dari *Budi Utomo*. Pada 1917 mereka datang di Negeri Belanda untuk menyampaikan pernyataan bahwa karena adanya Perang Dunia pada waktu itu, "Hindia Belanda hendaknya memperoleh kekuatan yang cukup baik di laut maxpun di darat untuk dapat mempertahankan diri."[7]

Orang-orang Belanda terutama yang berjiwa konservatif sama sekali tidak mengira bahwa utusan-utusan itu akan menyampaikan pernyataan semacam itu. Mereka mengharapkan bahwa utusan-utusan itu datang untuk menyampaikan kesetiaannya kepada negeri induk, ialah Negeri Belanda. Peristiwa inilah yang mendorong S. Surya Ningrat menulis artikel dengan judul: "Aliran-aliran dan partai-partai di Hindia Timur".

Di Negeri Belanda S. Surya Ningrat berkenalan dengan beberapa tokoh Belanda. Di antaranya adalah: Mr. Abendanon, Stokvis, Jonkman, Van Deventer, Van Kol dan lain-lain. Dengan Van Kol S. Surya Ningrat pernah mengadakan wawancara tentang "Cita-cita Nasional Hindia". Macam-macam pertanyaan diajukan kepada tuan Van Kol yang menyangkut hal-hal dari masa lampau, masa itu (maksudnya tahun 1919) dan masa mendatang. Permasalahan yang diperbincangkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah politik kolonial yang dilakukan pada masa lampau?
2. Sejak kapankah terjadi perubahan dalam politik kolonial itu?

3. Bagaimanakah jiwa Pemerintah di Hindia, di Negeri Belanda dan *Staten Generaal* (Parlemen Belanda) terhadap Hindia?
4. Sesudah terdapat aliran-aliran untuk mencapai kemerdekaan Hindia, apakah hal ini tidak diarahkan kepada pembentukan suatu *"Dominion"* Belanda di Hindia Timur, agar tidak akan terbentuk Negara Indonesia Merdeka penuh pada masa mendatang?
5. Apakah yang dapat diharapkan dari *Volksraad*,[8] apakah lembaga itu akan membawa Hindia ke arah kemerdekaan?
6. Apakah perkembangan ketatanegaraan Hindia akan menuju ke arah kemerdekaan penuh?[9]

Dalam menjawab pertanyaan pertama, tentang politik kolonial Belanda di masa lampau, Tuan Van Kol antara lain menjawab, bahwa ketika Kompeni Dagang Belanda (VOC) berkuasa, cara mempertahankan kekuasaannya adalah dengan politik memecah belah dan menguasai atau *devide et impera.* Keuntungan adalah satu-satunya tujuan dan perjuangan; oleh sebab itu cara apa pun ditempuhnya untuk mencapai tujuan. Kemudian ketika kekuasaan jatuh ke tangan Pemerintah Belanda, maka dilakukan Peraturan Tanam Paksa. Peraturan ini sangat membebani penduduk Jawa pada umumnya, demi pengisian Kas Negeri Belanda. Jutaan gulden mengalir ke negeri induk, sehingga pembaharuan untuk kaum cendekiawan Jawa yang amat mendesak dan perkembangan ekonominya diabaikan. Kepentingan Belanda di masa lalu adalah di atas segala-galanya; Hindia harus menghasilkan uang, pertama-tama untuk kas Negeri Belanda, kemudian untuk kaum modal Belanda. Akibatnya kebutuhan-kebutuhan orang-orang Hindia tidak terpenuhi, tanah dan rakyatnya menjadi melarat karena pengurusan kekayaan yang beratus-ratus juta yang sampai saat itu terus berlangsung. Orang Hindia tetap menjadi korban dari keserakahan

orang asing. Baginya tidak ada hak, tidak ada kebebasan, tidak ada perlindungan baik bagi mereka ataupun barang miliknya. Kepentingan rakyat yang lemah selalu ditunda untuk memberi tempat bagi penguasa-penguasa putih.[10]

Dalam menjawab pertanyaan sejak kapan diadakan perubahan dalam politik eksploitasi kolonial, maka dijawab oleh Tuan Kol bahwa perubahan itu dimulai sejak adanya gerakan "Haluan Etis" (1899). Pada waktu itu Ir. Van Kol adalah anggota Parlemen Belanda, mewakili SDAP (Partai Buruh Sosial Demokrat). Ia mempunyai pengetahuan yang luas mengenai keadaan-keadaan di Indonesia. Dalam perdebatan di dalam Parlemen ia memegang peranan penting. Dalam sidang bulan Nopember 1903 ia mengemukakan bahwa Belanda pada waktu itu berdiri pada titik balik Sejarah kolonialnya. Keadaan yang buruk di koloni adalah akibat dari pemerintahan Belanda yang salah dan orang-orang Belanda merupakan saksi-saksi bagi kebobrokan politik kolonial Belanda. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa harus diadakan perlawanan secara langsung terhadap eksploitasi Hindia itu, eksploitasi oleh Pemerintah Belanda atau pun oleh orang-orang Belanda.[11]

Ir. H. Van Kol adalah seorang ahli dalam masalah-masalah kolonial. Selama 16 tahun, dari 1876 sampai 1892 ia bekerja pada Departemen Pekerjaan Umum di Jawa. Ia sering melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana daerah-daerah di tanah Jawa menderita kelaparan dan terkena bencana lain yang disebabkan karena kesalahan sistem penjajahan Belanda. Karena ia gigih memperjuangkan cita-cita partainya, akhirnya "Politik Etis" diterima oleh Parlemen. Pemerintah pun kemudian bersedia menerima. Pada pidato kenegaraan pada September 1901, Sri Ratu memproklamasikan Politik Etis sebagai politik kolonial baru. Politik ini seakan-akan mengandung pengertian adanya panggilan kesusilaan, bahwa bangsa Indonesia yang dijajah itu ditempatkan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak

penuh dalam hukum, termasuk hak untuk dipenuhi kebutuhan ekonomis dan rokhaninya.[12]

Dalam wawancara dengan S. Surya Ningrat tersebut, Van Kol juga menerangkan bahwa di Indonesia, "air dalam yang dalam waktu lama tenang-tenang saja telah mulai bergelora : "terdapatlah arus yang tidak mungkin dapat dibendung lagi, dan paling-paling orang hanya dapat mengalirkannya ke tempat yang datar." Van Kol mengemukakan seperti pendapat S. Surya Ningrat bahwa cita-cita ke arah kesatuan bangsa Hindia bukanlah tujuannya, melainkan suatu alat untuk mendapatkan penghidupan dan kemakmuran yang lebih baik.[13]

Wawancara antara kedua tokoh tersebut dirupakan brosur. Jilid pertama berisi pendapat Van Kol atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh S. Surya Ningrat. Judul brosur tersebut adalah: "Perjuangan Nasional Hindia". Seperti yang dikemukakan oleh Van Kol, bahwa jilid dua dari brosur tersebut akan ditulis oleh S. Surya Ningrat dan akan berisi hal-hal yang menyimpulkan atas pertanyaan yang diajukan oleh Van Kol. Tetapi sayang sekali penulis karangan ini belum dapat menemukan brosur jilid dua tersebut.

Ketika berada di Negeri Belanda perhatian S. Surya Ningrat tertarik pada masalah-masalah pendidikan dan pengajaran di samping bidang sosial-politik. Ia menambah pengetahuannya dalam bidang pendidikan dan pada 1915 berhasil memperoleh akte guru.[14] Tokoh-tokoh besar dalam bidang pendidikan mulai dikenalnya, antara lain: J.J. Rousseau, Dr. Frobei, Dr. Montessori, Rabindranat Tagore, John Dewey, Kerschensteiner.

Dr. Frobel adalah seorang ahli pendidikan terkenal dari negeri Jerman. Pada 1840 dalam usia 58 tahun, ia mendirikan perguruan untuk anak-anak yang diberi nama *Kindergarten*. Dalam "Taman Anak" tersebut oleh Frobel diajarkan menyanyi, bermain-main dan melaksanakan pekerjaan anak-anak. Bagi Frobel, anak yang sehat badan dan jiwanya selalu ber-

gerak. Maka ia menyediakan alat-alat yang maksudnya untuk menarik anak-anak kecil untuk bekerja dan berfantasi. Berfantasi mengandung arti mendidik angan-angannya atau mempelajari anak-anak berpikir.[15] Metode Frobel kemudian tersebar luas di luar Negeri Jerman. Di Indonesia dahulu juga ada "Sekolah Frobel", yang dimaksud ialah Taman Kanak-kanak.

Selain tertarik pada metode Frobel, S. Surya Ningrat juga menaruh perhatian pada metode Montessori. Dr. Maria Montessori adalah sarjana wanita dari Italia. Ia mendirikan Taman Kanak-kanak dengan nama *"Casa dei Bambini'*, di mana anak-anak putera dan puteri dididik secara bebas dan diasuh melalui saluran Katolik.[16] Kalau Frobel disebut "sahabat kanak-kanak" ditilik dari sikapnya terhadap kanak-kanak, maka Montessori adalah seorang "ahli kanak-kanak".[17] Keduanya amat besar jasanya terhadap kemajuan ilmu serta laku pendidikan pada umumnya. Frobel mementingkan nyanyian serta permainan kanak-kanak, Montessori mementingkan pelajaran panca indera yang berarti mengutamakan tabiat dan kekuatan jiwa anak. Metode Montessori juga berkembang sampai jauh melewati batas Eropa sampai ke Asia.

Dari Rabindranath Tagore, pujangga terkenal dari India, pendiri perguruan *Shanti Niketan* di desa Bolpur di sebelah utara kota Kalkuta, dikenal orang bukunya "Sekolah Beo", yang berisi kecaman terhadap sekolah Eropa yang mengabaikan kepribadian anak. Sesudah S. Surya Ningrat kembali ke tanah air dan terjun ke bidang pendidikan, ada pendapat bahwa Taman Siswa sama atau meniru Shanti Niketan. Hal ini tidaklah benar, karena perbedaan antara kedua lembaga tersebut cukup besar, walaupun dalam beberapa hal ada persamaannya.

Di Negeri Belanda S. Surya Ningrat terkenal pula sebagai seorang ahli sastra Jawa. Ketika akan dilangsungkan Kongres Pengajaran Kolonial I di Den Haag pada Agustus 1916, S. Surya Ningrat mendapat undangan dan ia diminta untuk membuat

prasaran. Ia diundang sebagai seorang ahli kesenian, bukan sebagai seorang ahli politik. Kongres tersebut di antaranya akan membahas masalah bahasa pengantar untuk sekolah-sekolah Bumiputera di Indonesia.

Menjelang dilangsungkannya kongres itu, S. Surya Ningrat menulis sebuah artikel dalam majalah "Hindia Putera" dengan kepala: "Bahasa dan Bangsa".[18] Tulisan tersebut adalah tanggapan terhadap perdebatan antara tuan D.J.A. Westerveld dan dr. Cipto Mangunkusumo di tanah air. Westerveld, seorang guru HBS (Sekolah Menengah Atas) Semarang, berhaluan sosial-demokrat yang mempunyai gagasan untuk meng-Hindiakan pengajaran. Dalam majalah *"De Indische Gids"*, ia menganjurkan dengan semangat berapi-api untuk mengajarkan bahasa Bumiputera di sekolah-sekolah Bumiputera. S. Surya Ningrat menyetujui gagasan tersebut, walaupun pelaksanaannya pasti akan sangat sulit.

Sebaliknya ia menolak pendapat teman seperjuangannya, ialah dr. Cipto Mangunkusumo yang menghendaki bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah Bumiputera. Alasan dr. Cipto ialah bahwa untuk keperluan membentuk keadaan demokratis pada masyarakat kita, maka bahasa Jawa harus dibuang jauh-jauh dan diganti dengan bahasa Belanda. Seandainya teori Cipto itu benar, S. Surya Ningrat mempersoalkan mengapa bahasa Belanda yang dipilih sebagai penggantinya. Mungkin karena Hindia dikuasai oleh Belanda? Selanjutnya ia menulis sebagai berikut:

> *"Siapa yang berani bertanggung jawab bahwa pemerintah-ah Belanda akan bertahan lama di negeri kita? Terutama pada jaman yang keruh ini, tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi besok. Kini orang Jawa belajar bahasa Belanda, beberapa tahun lagi Jepang, kemudian Inggris, yang lebih luas daerah penggunaannya dan yang juga banyak dipergunakan oleh orang-orang Timur dan jauh lebih mu-*

dah untuk dipelajari daripada bahasa Belanda? . . . . Tidak, bukan bahasa Inggris dan bukan pula bahasa Belanda atau bahasa asing mana pun juga yang akan kita pakai sebagai bahasa pengantar di Hindia. Bahasa dan bangsa adalah satu. Bila kita menghendaki adanya satu bahasa untuk bangsa Hindia seluruhnya, seyogianya janganlah kita memaksa untuk menerima bahasa asing, sebab kita mempunyai bahasa Melayu yang tidak saja mudah dipelajari, melainkan kini juga telah menjadi ***lingua franca*** *di Nusantara."*[19]

Bagi S. Surya Ningrat masalah bahasa bukanlah persoalan perguruan semata-mata, melainkan juga merupakan masalah nasional yang penting. Ia sangat setuju dengan keinginan Menteri Tanah Jajahan yang mengatakan, "Pengajaran di sana haruslah dipribumikan". Maksudnya bahwa sekolah Hindia menyiapkan murid-muridnya untuk masyarakat Hindia. Untuk mempribumikan pengajaran ini, perlu ditetapkan salah satu dari bahasa-bahasa Bumiputera menjadi bahasa pengantar. Masalahnya sekarang bahasa mana di antara bahasa yang banyak itu yang paling tepat untuk keperluan tersebut?

S. Surya Ningrat menyebut bahasa Melayu, dengan alasan bahasa tersebut telah lama menjadi *lingua franca* di kepulauan Nusantara. Dibanding dengan bahasa-bahasa lain di Nusantara, bahasa Melayu adalah yang paling dapat diterima, karena bahasa itu bentuknya amat mudah, mengenal ungkapan-ungkapan yang hidup, kuat dan berisi, di samping kaya akan kata-kata, mudah pula menyesuaikan diri kepada pikiran-pikiran dan keadaan-keadaan baru.[20]

Sebagai seorang ahli sastra Jawa, S. Surya Ningrat mengetahui benar bahwa bahasa Jawa tidak memenuhi syarat-syarat utama bagi suatu bahasa pengantar. Bahasa itu sulit sekali dipelajari dan terlalu erat hubungannya dengan keadaan adat dan kebiasaan setempat. Menurut pendapatnya, bahasa Jawa

yang paling banyak pendukungnya dibanding dengan bahasa-bahasa lainnya di Indonesia, tidak akan mau karena perubahan-perubahan zaman.

Mengenai bahasa Belanda, S. Surya Ningrat berpendapat bahwa penggunaan bahasa Belanda itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh pintu ke "perbendaharaan-peradaban Barat". Bahasa tersebut dipelajari, pertama-tama untuk membeli ilmu-ilmu guna kebahagiaan tanah airnya.[21]

Sejak 17 Agustus 1917, S. Surya Ningrat tidak lagi hidup sebagai orang buangan, karena hukuman pengasingannya telah dicabut. Berhubung kesempatan pulang ke tanah air belum ada, maka waktu menunggu kesempatan itu diisi dengan berbagai macam kegiatan. Ia tetap aktif dalam bidang jurnalistik. Pada 1918 ia berhasil mendirikan kantor berita di Den Haag, dengan nama *"Indonesische Persbureau"* sebagai pusat pemberitaan untuk Indonesia. Untuk pertama kalinya nama "Indonesia' diperkenalkan kepada masyarakat umum dan dipakai di surat kabar di Negeri Belanda.[22]

Pada 20 Mei 1918, hari ulang tahun ke-20 organisasi Budi Utomo diperingati di Negeri Belanda. S. Surya Ningrat yang dulu pernah berpartisipasi dalam perkumpulan itu, turut mengambil bagian. Ketua panitia dijabat oleh dr. Tumbelaka, sedang S. Surya Ningrat mengetuai bagian kesenian. Ibu Surya Ningrat ikut menyumbang dengan membawakan tarian Jawa, berperan sebagai Pergiwa. S. Surya Ningrat juga ikut dalam panitia penerbitan buku kenang-kenangan: "Sumbangsih" bersama Drs. Sosrokartono dan R.M. Notosuroto.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketika S. Surya Ningrat menjalani hukuman pengasingan di Negeri Belanda, perhatiannya tidak hanya ditujukan kepada hal-hal yang bersifat politis. Masalah sosial-budaya dan khususnya mengenai pendidikan sangat menarik perhatiannya. Terutama terhadap aliran Montessori dan Rabindranath Tagore. Kedua tokoh pendidikan

tersebut merupakan pembongkar dunia pendidikan lama dan pembangunan dunia pendidikan baru. Bagi S. Surya Ningrat kedua tokoh tersebut dianggapnya sebagai penunjuk jalan untuk usahanya dalam membangun aliran pendidikan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.[23]

Mengingat adanya perhatian yang dicurahkan kepada bidang pendidikan di samping bidang politik, maka periode selama di Negeri Belanda itu merupakan periode peralihan.

CATATAN

1. M. Tauchid, *K.H. Dewantara Pahlawan dan Pelopor Pendidikan*, 1986 : 16
2. M. Tauchid, *KHD, Pahlawan dan Pelopor*, 1986 : 16
3. Abdurrachman, Cita-cita dan Tindak Perbuatan, *Pusara*, Juli–Agustus 1965 : 18
4. Abdurrachman, Cita-cita, *Pusara*, Juli–Agustus 1965 : 19
5. Abdurrachman, Cita-cita, *Pusara*, Juli–Agustus 1965 : 20
6. Abdurrachman, Cita-cita, *Pusara*, Juli–Agustus 1965 : 6–7
7. Abdurrachman, Cita-cita, *Pusara*, Juli–Agustus 1965 : 6
8. Dewan Rakyat
9. Van Kol en S. Surya Ningrat, Het-Indisch – Nationaal Streven, *Indische Monografien* 1919 (wawancara antara S. Surya Ningrat dengan van Kol)
10. Van Kol en S. Surya Ningrat, *Indische Monografien* 1919 : 6
11. Van Kol en S. Surya Ningrat, *Indische Monografien* 1919 : 7
12. Van Kol en S. Surya Ningrat, *Indische Monografien*, 1919 : 19

13. Van Kol en S. Surya Ningrat, *Indische Monografien*, 1919 : 20
14. M. Tauchid, *KHD, Pahlawan dan Pelopor*, 1968 : 16
15. KHD, Tentang Frobel dan Metodenya, *Pusara*, Mei 1941 atau Karya I : 252
16. KHD, Dr. Montessori, Penganjur Pendidikan Modern *Pusara* Sept. 1952 atau Karya I : 266–267
17. KHD, Dr. Montessori, Penganjur, Karya I : 266
18. KHD, Bahasa dan Bangsa, *Hindia Putra* (1916–1917) : 74–75 atau Karya IIa : 108
19. KHD, Bahasa dan Bangsa, *Karya IIa* : 109
20. KHD, Bahasa dan Bangsa, *Karya IIa* : 155
21. KHD, Bahasa dan Bangsa, *Karya IIa* : 110
22. M. Tauchid, *KHD, Pahlawan dan Pelopor*, 1968 : 17
23. KHD, Hubungan kita dengan Tagore, *Pusara* Agustus 1941 atau Karya IIa : 357

BAB VI KEMBALI KE MEDAN PERJUANGAN

Sesuai dengan artikel yang pernah dimuat dalam surat kabar *"Nieuwe Amsterdammer"* dan *'Het Volk"* sebagai kata perpisahannya dengan masyarakat Belanda yang memakai judul: "Kembali ke medan perjuangan", maka setelah sampai di tanah air, Suwardi Suryaningrat segera mulai dengan tugas-tugas perjuangannya. Ia ingin berbuat dan mengabdi pada kepentingan rakyat banyak. Bidang yang dipilihnya adalah bidang politik untuk melanjutkan perjuangannya sebelum dijatuhi hukuman pengasingan.

Pada 5 September 1919, ia dengan keluarganya mendarat di Tanjung Priok dan pada esok harinya, pada 6 September 1919 ia datang melapor pada Pengurus Besar *"Nationaal Indische Partij"* (N.I.P.) di Bandung. Sepintas lalu nampaknya tanggal 6 September mempunyai arti khusus bagi tokoh politik ini :

6 September 1912, *"Indische Partij"* didirikan;
6 September 1913, tiga orang pemimpinnya berangkat ke tanah pengasingan;
6 September 1919, Suwardi S. kembali menghadap Pengurus Besar N.I.P. di Bandung.

Suwardi S. diserahi tugas baru, menjabat Sekretaris N.I.P. Tidak lama kemudian ia diangkat menjadi ketuanya. Perlu diketahui bahwa Suwardi S. adalah yang paling akhir kembali ke tanah air dibanding dengan dua kawan seperjuangannya. Pada 1914 dr. Cipto telah diperkenankan kembali ke Indonesia dan pada 1918 dr. Douwes Dekker menyusul. Douwes Dekker melanjutkan perjuangannya yang lama. Diterbitkannya majalah *"De Beweging"* dan harian *"De Expres"*, keduanya sebagai alat propaganda partainya. Suwardi yang juga tetap giat dalam bidang jurnalistik, diminta untuk membantu majalah dan harian tersebut. Selain itu ia juga membantu "Persatuan Hindia" yang terbit dalam bahasa Melayu dan *"Panggugah"*, penerbitan dalam bahasa Jawa.

Sejak 1918 di Batavia (sekarang Jakarta) didirikan Dewan Rakyat atau *Volksraad* oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sidang pertama dewan tersebut dilangsungkan pada 18 Mei 1918. Dalam kata pembukaannya Gubernur Jendral Van Limburg Stirum mengucapkan antara lain, bahwa *Volksraad* bertujuan akan mengangkat Indonesia ke tempat yang mulia, sehingga menjadi suatu bagian dari negeri Belanda yang demokratis, di bawah pemerintahan sendiri. Juga diharapkan bahwa dengan ikatan kekuasaan Nederland itu, dan berkat kemajuan, kecerdasan dan kekayaan penduduknya, Indonesia akan dapat menjadi makmur.[1]

Van Limburg Stirum tidak merahasiakan, bahwa menurut pendapatnya sendiri, susunan *Volksraad* atau Dewan Rakyat itu masih jauh dari sempurna. Ia berusaha agar jumlah anggotanya ditambah. Anggota Dewan tersebut sebagian dipilih oleh anggota-anggota sidang-sidang lokal dan sebagian lainnya diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Ketua Dewan diangkat oleh raja Belanda.[2]

Pada 1918 jumlah anggota Dewan sebanyak 39 orang, dan pada 1920 ditambah menjadi 48, terdiri atas 20 orang

bangsa Indonesia dan 28 orang bangsa Eropa dan Timur Asing. Kemudian sejak 1927 jumlah anggota ditambah menjadi 60 orang, di antaranya 25 orang bangsa Indonesia dan 30 orang bangsa Eropa dan 5 orang golongan Timur Asing.

Volksraad atau Dewan Rakyat yang berkedudukan di Batavia di gedung yang sekarang ditempati oleh Departemen Luar Negeri R.I., di kalangan rakyat terkenal dengan nama Gedung Bicara. Dengan didirikannya Dewan tersebut, dimaksudkan agar keinginan-keinginan politik dapat disalurkan secara resmi kepada Pemerintah Kolonial, tetapi ternyata bahwa melalui cara yang sifatnya kooperatif itu, kepentingan rakyat tidak dapat dilindungi. Sejak Dewan ini dibuka anggota-anggota yang terdiri atas bangsa Indonesia tidak henti-hentinya menyampaikan keinginannya akan perubahan-perubahan ketatanegaraan menuju kemerdekaan nusa dan bangsa, tetapi Pemerintah Kolonial selalu berusaha untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Ketika Pemerintah Hindia Belanda runtuh karena pendudukan Jepang, maka Dewan tersebut juga bubar (1942).

Ketika Pemerintah Kolonial tidak mengijinkan organisasi-organisasi rakyat terjun dalam kegiatan politik, maka timbullah kekecewaan di kalangan kaum nasionalis. Mereka membentuk kekuatan di kalangan rakyat untuk melawan Pemerintah Kolonial. Pergerakan rakyat itu makin menjadi radikal dan revolusioner, sesudah Perang Dunia I berakhir dan keadaan sosial ekonomi makin buruk. Menghadapi keadaan yang panas itu, pemerintah bertindak lebih keras terhadap pergerakan nasional.

Dalam keadaan yang demikian itu, tulisan-tulisan Suwardi S. tidak lagi seperti tulisan-tulisannya pada waktu berada di Nederland. Kalau di negeri Belanda tulisannya bersifat lugas dan terang, maka pada waktu itu ia kembali di tanah air, tulisannya bersifat politis dan tajam. Akibatnya ia harus sering

berurusan dengan pihak Pemerintah Kolonial, karena delik pers.

Antara tanggal 5 Juni dan 24 Agustus 1920, ia ditahan dalam penjara untuk menunggu perkaranya diperiksa oleh hakim. Ketika opsir justisi menanyakan tentang asal-usul keturunannya, dan ternyata Suwardi S. berasal dari keluarga Istana Pakulaman, ia akan diperlakukan istimewa. Pemeriksaannya juga akan dilakukan melalui Dewan Justisi *(Raad Van Justitie)*, tetapi Suwardi S. menolak perlakuan istimewa tersebut. Ia minta agar perkaranya diperiksa dengan cara-cara yang sama dengan yang berlaku bagi pemimpin-pemimpin Indonesia pada waktu itu, seperti Semaun, Darsono, dan lain-lainnya.[3]

Delik pers yang kedua terjadi pada Nopember 1920. Ia dituduh menghina Sri Baginda Ratu Wilhelmina, menghina Badan Pengadilan, menghina Pangreh Praja, dan menghasut untuk merobohkan Pemerintah. Suwardi S. adalah orang yang pertama-tama dari wartawan Indonesia yang kena delik pers.[4] Hukuman yang diterimanya adalah masuk penjara di Pekalongan. Sesudah keluar dari penjara, tidak berapa lama kemudian ia masuk lagi karena delik pidato. Ia dijatuhi hukuman selama tiga bulan. Mula-mula ditempatkan di penjara Mlaten Semarang, kemudian dipindahkan ke penjara pusat di Pekalongan. Seperti orang-orang hukuman lainnya, dalam penjara tersebut Suwardi S. melakukan kerja paksa.

Pada waktu itu banyak pemimpin lainnya yang keluar masuk penjara atau gedung pengadilan karena delik pers. Di antaranya ialah: dr. Cipto Mangunkusumo, dr. Douwes Dekker, Abdul Muis, Haji Hisbah, Cokroaminoto dan lainnya.[5] Ketika Suwardi S. menjalani hukuman penjara di Pekalongan, istrinya yang sedang mengandung itu sakit keras. Berhubung sakit istrinya cukup mengkhawatirkan, maka Suwardi S. minta cuti meninggalkan penjara untuk menengok keluarganya. Atas jaminan

Sri Paku Alam VII almarhum, permohonan tersebut dikabulkan. Kepergian Suwardi tidak bebas, karena seorang sipir penjara mengikutinya. Setelah batas waktu untuk menengok sudah habis, akan tetapi kesehatan istrinya belum membaik, maka Suwardi tidak bersedia meninggalkan istrinya untuk kembali ke penjara di Pekalongan. Sipir yang menyertainya tidak dapat memaksa Suwardi untuk menaati waktu yang telah ditentukan. Karena kehilangan akal, maka ia pergi ke Pura Pakualaman, melapor kejadian tersebut dan selanjutnya ia kembali ke Pekalongan.

Syukurlah bahwa pada hari itu juga Suwardi telah dibebaskan dari hukuman. Tilgram pembebasan dari Peverintah di Batavia dialamatkan ke penjara Pekalongan. Sipir yang dulu menyertai Suwardi pulang menengok istrinya, diperintahkan untuk pergi ke rumah Suwardi dengan tugas menyampaikan berita gembira tersebut.[6]

Sesudah keluar dari penjara, Suwardi dan kawan-kawan seperjuangannya tidak menghentikan kegiatannya dalam bidang politik. Lebih-lebih pada waktu itu Tiga Serangkai atau *Janget Kinatelon* berkumpul lagi. Mereka membuat pernyataan yang dimuat dalam *'De Expres''*, bahwa Tiga Serangkai tidak akan mundur setapak pun walaupun Gubernur Jendral akan mematahkan semangat mereka.[7] Pernyataan ini akhirnya harus dilepaskan, karena keadaan tidak menguntungkan perjuangan.

Nationaal Indische Partij (N.I.P.) ternyata tidak panjang umurnya. Partai ini didirikan pada bulan Juni 1919 sebagai kelanjutan dari Insulinde.[8] Pada tahun tersebut, berhubung pemimpin-pemimpin *Indische Partij* yang diasingkan ke Xegeri Belanda telah kembali di Indonesia, Insulinde mempunyai warna baru. Pengaruh bekas pemimpin *Indische Partij* sangat besar. Oleh karena itu maka Juni 1919 nama Insulinde diganti dengan nama *Nationaal Indische Partij* dengan anggaran dasar baru. Tempat kedudukannya kemudian juga dipindahkan ke

Semarang. Pekerjaan partai ini ialah membangunkan dan menggerakkan *"Indiers"* untuk dapat mencapai kemerdekaan negeri Hindia. Suwardi Suryaningrat menjadi ketua Pengurus Besar.[9] Dr. Douwes Dekker dan dr. Cipto Mangunkusumo juga aktif dalam N.I.P.

Walaupun pengaruh bekas pemimpin-pemimpin *Indosche Partij* terdapat dalam N.I.P., namun semangat *Indische Partij* (1912–1913) sangat tipis. "Jiwa Douwes Dekker" telah lenyap. Pada hakekatnya partai tersebut merupakan partai atau organisasi bangsa peranakan Belanda. Orang-orang Indonesia ternyata lebih suka akan kebangsaan Indonesia daripada kebangsaan Hindia. Sarikat Islam dapat menarik hati bangsa Indonesia. Di samping itu dari pihak bangsa Indonesia timbul bantahan keras atas pemberian hak-hak tanah kepada orang-orang bangsa Eropa yang dilahirkan di negeri ini.[10] Di kalangan peranakan Belanda yang pada jaman *Indische Partij* bersedia melawan Pemerintah kolonial untuk tujuan kemerdekaan Hindia, pada waktu itu tidak lagi ingin berjuang melawan Belanda. Mereka merasa lebih sedarah dengan orang Belanda dan mereka merasa lebih tinggi derajatnya dari orang-orang Indonesia, mereka khawatir akan terdesak kedudukannya, karena makin lama jumlah kaum terpelajar Indonesia makin meningkat.

Di samping alasan tersebut di atas, kelemahan N.I.P. disebabkan pula karena timbulnya perselisihan paham dalam kalangan Pengurus Besar-nya, di antaranya tentang sikap non-koperasi terhadap Pemerintah.[11] Suwardi Suryaningrat selamanya tidak akan setuju sikap koperasi dengan Pemerintah Hindia Belanda, sedang beberapa pemimpin NIP menyetujuinya. Ketika masih bernama Insulinde, organisasi ini mempunyai wakil di dalam *Volksraad* atau Dewan Rakyat. Adapun wakil-wakil itu adalah J.J.E. Teeuwen dan dr. Cipto Mangunkusumo. Perwakilan ini diteruskan sampai 1921, kemudian diganti oleh P.F.

Dahler (1921–1924).[12] Wakil-wakil tersebut diangkat oleh pemerintah.

Akhirnya pada 1923 N.I.P. dibubarkan dan P.F. Dahler yang mewakilinya di *Volksraad*, meninggalkan Dewan tersebut.[13] Dr. Douwes Dekker mendapatkan lapangan baru untuk meneruskan perjuangannya, ialah lapangan perguruan nasional. Ia mendirikan sekolah *Ksatrian Instituut* di Bandung. Arah sekolah ini untuk mendidik kader-kader ekonomi dan jurnalistik.

Ketika di dalam partai N.I.P. timbul ketidak-sesuaian paham di antara pemimpin-pemimpinnya mengenai sikap terhadap Pemerintah, lagi pula perkembangan nasionalisme di kalangan anggota-anggotanya sudah sangat merosot, maka sejak 1921 Suwardi Suryaningrat memilih jalan baru untuk melanjutkan perjuangannya. Bidang yang dipilihnya sama dengan Douwes Dekker. Pada saat itu lahirlah putera yang ke tiga, seorang puteri nama Ratih Tarbiah. Nama ini dimaksudkan untuk mengenangkan peristiwa saat permulaan ia terjun ke lapangan baru, lapangan pendidikan. Tarbiah berarti pendidikan. Dengan demikian maka dari Tiga Serangkai atau *Janget Kinatelon Indische Partij* yang pernah menjalani hukuman pengasingan di Negeri Belanda, hanya dr. Cipto Mangunkusumo saja yang masih meneruskan kegiatannya dalam bidang politik.

Sejak 1921 keadaan di Indonesia makin gawat. Gubernur Jendral Van Limburg Stirum (1916–1921) diganti oleh Fock (1921–1926). Gubernur Jendral baru ini berhaluan liberalisme. Pemerintahannya sangat menguntungkan kaum kapitalis penanam modal. Ia menjalankan hak untuk mengasingkan orang-orang yang dianggap berbahaya dan membatasi kebebasan menyelenggarakan pertemuan dan berbicara.[14] Di samping itu ia melaksanakan penghematan dan menaikkan pajak penduduk.

Akibat dari tindakan pemerintah tersebut di atas, maka perbedaan antara penjajah dan yang dijajah makin tajam. Di

satu pihak modal asing menimbun kekayaan yang berjuta-juta gulden, di pihak lain rakyat sangat menderita. Keadaan yang makin menjadi buruk ini menimbulkan adanya krisis sosial-ekonomi. Krisis yang memuncak sering diikuti dengan pergolakan-pergolakan. Pada 1922 terjadi pemogokan pegawai Pegadaian dan pada tahun berikutnya terjadi pemogokan pegawai Kereta Api. Kemudian pada 1925 pemogokan di pelabuhan Surabaya dan pada 1926 timbul pemberontakan-pemberontakan. Di Banten, Jakarta dan tempat-tempat lain terjadi perlawanan dengan senjata terhadap Pemerintah. Pertempuran yang paling hebat terjadi di Banten.[15]

Dalam keadaan sosial-ekonomi dan politik yang cukup menggelisahkan Pemerintah Hindia Belanda, pada 1922 di Bandung dilangsungkan kongres *Al-Indie*. Suwardi S. hadir dalam kongres tersebut dan ikut mengambil bagian. Maksud kongres adalah untuk mempersatukan rakyat Indonesia dan untuk memperoleh pemerintahan sendiri. Datang pada kongres itu wakil-wakil dari partai, perkumpulan yang ada di Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kupang dan Maluku.

Pemerintah kolonial mengirim agen-agennya untuk memasang telinganya. Akan tetapi berkat kebijaksanaan pembicara-pembicara dalam menyusun kata-kata, maka tidak seorang pun kena jerat delik berbicara. Di antara banyak pembicara-pembicara terdapat antara lain: Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo. Fournier, Labberton, Cramer dan Suwardi Suryaningrat. Semangat para pembicara meluap-luap. Demikian pupa para pengunjungnya.[16]

Suwardi Suryaningrat dalam memberikan pemandangan menggambarkan segala kesedihan dan pedihan yang terikat pada peraturan-peraturan yang ganas dan sewenang-wenang. Disebutnya sebagai contoh, penawanan preventif dan hak Gubernur Jendral untuk membuang orang yang dianggap "berbahaya". Seluruh hadirin terpukau mengikuti kata-kata-

nya. Ruangan menjadi sunyi senyap, hanya kata-kata pembicara saja yang kedengaran sangat jelas. Dan baru sesudah pidato itu berakhir, terdengarlah tepuk-tangan yang sangat riuh dari para pendengar. Suwardi Suryaningrat menambahkan bahwa di dalam ia berpidato tadi, lidahnya agak terhalang oleh adanya polisi yang datang memasang telinga. Ia berkata sebagai berikut: "Tetapi dari tepuk tangan hadirin, tahulah saya, bahwa tuan-tuan telah maklum juga, apa yang saya tidak katakan."[17] Tepuk tangan yang gegap gempita menyusul lagi. Jarang sekali orang melihat kegembiraan dan semangat kongres seperti tersebut di atas di Indonesia.[18]

Pada 1922 terjadi pemogokan pegawai Pegadaian yang dimulai dari Rumah Pegadaian Ngupasan Yogyakarta. Peristiwa pemogokan ini kemudian meluas ke seluruh Jawa. Menanggapi kejadian tersebut, Suwardi S. membuat surat edaran yang berkepala: "Bantuan uang oleh kaum cendekiawan untuk pejuang-pejuang nasional". Ia menyatakan sebagai berikut: "Sekarang kita dihadapkan kepada perjuangan yang bukan semata-mata perjuangan suatu serikat sekerja, tetapi dari sesuatu, yang oleh saudara-saudara setiap hari diperjuangkan tanpa habis-habisnya."[19]

Di Yogyakarta didirikan "Komite Hidup Merdeka", diketuai oleh Suryopranoto dan Suwardi sebagai sekretarisnya. Anggota-anggotanya: Haji Fahruddin dari Muhammadiyah dan Haji Agus Salim dari S.I. Komite tersebut bertujuan untuk mendidik manusia-manusia Indonesia yang sebagian besar masih hidup dalam keadaan menggantungkan nasibnya kepada Pemerintah Kolonial menjadi manusia-manusia yang bebas dan merdeka. Komite tidak akan melakukan perjuangan dengan kata-kata, tetapi secara melipatgandakan perjuangan dengan perbuatan-perbuatan.[20] "Komite Hidup Merdeka" ini merencanakan mendirikan tempat-tempat kerja kerajinan rumah tangga bagi istri-istri para pemogok, mengorganisasi pengajaran

praktis, tempat kerja untuk perniagaan dan kerajinan kaum laki-laki pemogok serta usaha mendirikan sekolah guru, yang kelak akan menjadi guru-guru rakyat.[21]

Pemerintah Kolonial sangat curiga terhadap kegiatan tersebut di atas. Maka diperintahkannya polisi-polisi menjaga rumah Suwardi S., tempat kerja dan kantor "Komite Hidup Merdeka". Pada waktu itu Suwardi telah pindah di Yogyakarta dan bekerja di sekolah *Adi Dharma*, milik Suryopranoto.

Tindakan pemerintah dengan cara kekerasan tersebut segera diubah setelah diketahui bahwa gerakan komite itu bukan semata-mata menuju ke arah kriminal, melainkan mempunyai dasar-dasar yang lebih kuat dan dalam. Maka dikirimkan tokoh-tokoh, di antaranya Dr. B. Schrieke untuk melihat dan mempelajari peristiwa dan gerakan tersebut dari dekat.[22] Sementara itu Suwardi S. telah memusatkan perhatiannya kepada masalah-masalah pendidikan dan pengajaran.

Suwardi S. berpendapat bahwa kemerdekaan Nusa dan Bangsa untuk mengejar keselamatan dan kebahagiaan rakyat tidak hanya dicapai melalui jalan politik. Ia bekerja sebagai guru sekolah di Adi Dharma. Setelah mempunyai pengalaman mengajar selama satu tahun, dan telah mengenal dari dekat hal-ikhwal mengenai pendidikan dan pengajaran untuk rakyat, timbullah padanya gagasan-gagasan baru. Akan tetapi gagasan-gagasan baru itu tidak mungkin dapat dilaksanakan di sekolah di mana ia pada waktu itu mengajar, karena sekolah tersebut adalah milik kakaknya. Oleh sebab itu muncul pikiran untuk menyelenggarakan sekolah sendiri yang akan dibina sesuai dengan cita-citanya. Baginya, pendidikan adalah tempat pesemaian segala benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan.

Sebelum mendirikan sekolah sendiri, Suwardi menggabung pada *"Paguyuban Selasa-Kliwonan"* yang berkedudukan di Yogyakarta. Paguyuban ini, disingkat *"Saka"*, membicarakan

hal-hal yang berhubungan dengan usaha-usaha menaikkan derajat dan martabat bangsa Indonesia. Inti cita-citanya adalah: *Mengayu-ayu salira, mengayu-ayu bangsa* dan *mengayu-ayu manungsa,* artinya membahagiakan diri, membahagiakan bangsa dan membahagiakan manusia.[23] Pemimpin paguyuban tersebut adalah Ki Ageng Sutatmo Suryokusumo, seorang tokoh B.U. yang progresif. Anggota-anggota lain di antaranya adalah: Ki Pronowidigdo, Ki Prawirowiworo, R.M. Gondoatmojo, R.M. Subono, Ki Ageng Suryomataram, Ki Suryoputro (paman Ki Hajar Dewantara), Ki Suryoadiputro (adik Ki Hajar Dewantara). Pertemuan-pertemuan diadakan pada setiap hari Selasa Kliwon.

Salah satu pertemuan membahas masalah demokrasi yang pada saat itu banyak dibicarakan oleh kaum pergerakan. Pada 1920 Ki Ageng Sutatmo Suryokusumo menulis tentang demokrasi. Karangan tersebut berbentuk brosur dengan kepala: *Sabdo-Pandito-Ratu;* demokrasi tanpa kebijaksanaan adalah bencana bagi kita semua. Sutatmo Suryokusumo tidak setuju dengan demokrasi seperti yang berlaku di dunia Barat yang berdasarkan liberalisme dan mementingkan jumlah suara dari mereka yang ikut menyetujui sesuatu pendapat. Menurut tradisi di dunia Barat, yang dianggap benar ialah kalau mendapat dukungan separoh dari jumlah suara ditambah satu. Ketentuan ini berarti bahwa bukan yang *benar* dan yang *adil* yang diakui berkuasa, tetapi yang mempunyai *kekuatan fisik paling besar.* Sutatmo berpendapat bahwa Kebijaksanaan penting untuk dapat membawa Keadilan.[24]

Cita-cita *Paguyuban Selasa-Kliwon:* membahagiakan diri, membahagiakan bangsa, membahagiakan manusia kemudian menjadi cita-cita Perguruan Taman Siswa yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat. Pada 3 Juli 1922 perguruan tersebut lahir di Yogyakarta. Ini merupakan Perguruan Taman Siswa yang pertama-tama yang kelak meluas ke banyak tempat di pulau Jawa, Sumatra, Bali, Sulawesi, Kalimantan dan Ambon.

Selain berdasarkan cita-cita yang luhur tersebut di atas, kelahiran Perguruan Taman Siswa disebabkan karena keadaan pendidikan dan pengajaran pada waktu itu sangat kurang dan sangat mengecewakan. Seperti kita ketahui, sesudah Pemerintah Kolonial melaksanakan politik etis, jumlah sekolah yang didirikan bertambah banyak. Akan tetapi walaupun demikian jumlah sekolah dibanding dengan jumlah anak usia sekolah masih sangat jauh dari cukup. Lagi pula sekolah-sekolah tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan kolonial, baik kepentingan dalam bidang politik, ekonomi maupun administrasi. Jadi sama sekali tidak ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Ketika belum dibuka sekolah dasar yang disebut H.I.S. bagi rakyat pada umumnya disediakan sekolah bumiputera yang rendah sekali pelajarannya. Ada sebagian kecil dari rakyat kita, yaitu kaum priyayi, diperkenankan menuntut pelajaran di sekolah dasar Belanda, sehingga mereka dapat melanjutkan pelajaran ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi tingkatnya. Akan tetapi sekolah tersebut tertutup bagi anak rakyat pada umumnya.

Banyak orang merasa senang ketika Pemerintah membuka Sekolah Bumiputera Kelas Satu yang kelak menjadi H.I.S., karena mereka mempunyai penghargaan bahwa anak-anaknya akan dapat memperoleh kepandaian yang dapat menjadi tangga untuk mempertinggi derajat penghidupannya. Akan tetapi pada umumnya merasa kecewa, karena apa yang diharapkan itu tidak dapat terpenuhi. Anak keluaran H.I.S. pada umumnya tidak dapat diterima di sekolah yang lebih tinggi tingkatannya dalam hal ini M.U.L.O. – karena kurang kepandaiannya, terutama mengenai bahasa Belanda. Jika mereka bekerja, biasanya hanya cocok untuk menjabat juru tulis atau pembantu juru tulis dengan gaji sama besarnya dengan gaji jongos atau koki. Lagi pula anak-anak kita yang dididik di H.I.S. itu banyak yang kehilang-

an tabiat kerakyatan dan mereka merasa lebih tinggi derajatnya daripada saudara-saudaranya yang tidak pandai bahasa Belanda.[25]

Sudah barang tentu anak-anak H.I.S. itu kehilangan rasa kerakyatannya, karena mulai berumur enam tahun mereka didik menjadi atau seperti Belanda. Mereka tiap hari memakai bahasa Belanda untuk membaca berbagai kitab yang dapat menjauhkan atau memisahkan rasa mereka dari roh kerakyatan. Seringkali bacaan atau bahan ceritera yang diterima anak-anak itu mengandung penghinaan kepada bangsa kita, sehingga dengan demikian anak-anak yang setiap hari menerima pendidikan semacam itu, akan tidak suka lagi hidup seperti rakyat. Maka mereka yang tidak cukup kepandaiannya akan mudah jatuh ke dalam perbudakan.[26]

Karena keadaan H.I.S. yang sangat kurang dan mengecewakan tersebut di atas, terutama H.I.S. sebagai alat pendidikan kebatinan anak, maka Suwardi Suryaningrat berpendapat, bahwa kita wajib berusaha sendiri untuk:

a. memperbanyak sekolah-sekolah untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia;
b. memperbaiki pelajaran, hingga anak-anak kita dengan mudah dapat turut naik ke sekolah yang lebih tinggi;
c. mendidik anak-anak kita, agar mereka itu merasa puas sebagai anak rakyat kita.

Adapun tujuannya ialah agar kita pada kemudian hari mempunyai rakyat yang kuat lahir dan batin, dan dapat menjunjung derajat bangsanya.[27]

Suwardi Suryaningrat menyampaikan maksud akan mendirikan sekolah sendiri kepada kakaknya, pemilik sekolah Adi Dharma. Oleh kakaknya ia diberi modal, berupa murid-murid dan bangku sekolah. R.M. Suryopranoto berpesan kepada adiknya, supaya Taman Siswa hanya membuka bagian Taman Anak dan Kursus Guru saja.

Demikianlah sejak 3 Juli 1922 Suwardi Suryaningrat bekerja dalam bidang pendidikan untuk merealisasi cita-cita yang luhur. Cita-cita ini dapat dicapai dengan melewati kemerdekaan bangsa dan negaranya. Suwardi Suryaningrat yang kemudian terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Taman Siswa, Bapak Pendidikan Nasional, seorang pahlawan yang sepanjang hayatnya terus berjuang untuk kepentingan nusa dan bangsanya.

Sebelum tahun 1922 ia adalah seorang politikus terkemuka. Hukuman pengasingan, hukuman penjara ataupun penahanan-penahanan terhadap dirinya tidak mampu menahan dan mematahkan kegiatannya dalam usahanya mencapai cita-citanya. Atas jasa-jasanya ini Pemerintah Republik Indonesia pada 8 Maret 1955, menetapkan Ki Hajar Dewantara sebagai Perintis Kemerdekaan.

Suwardi menggunakan jurnalistik sebagai alat untuk mencapai cita-citanya. Keberaniannya dan ketajaman penanya mengakibatkan ia sering "terjerat" dan dikenakan delik pers. Ia adalah wartawan Indonesia yang pertama-tama kena delik pers. Atas jasa-jasanya dalam bidang jurnalistik ini, Persatuan Wartawan Indonesia (P.W.I.) pada 28 April 1959 mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Ketua Kehormatan P.W.I. secara posthum atau anumerta. Peristiwa ini terjadi dua hari sesudah K.H. Dewantara wafat.[28]

CATATAN

1. Koch, *Menuju*, 1951 : 65-66
2. Koch, *Menuju*, 1951 : 66
3. Abdurrachman, *Cita-cita, Pusara* Juli–Agustus 1965 : 21
4. M. Tauchid, *KHD, Pahlawan dan Pelopor*, 1968 : 17
5. Abdurrachman, Cita-cita, *Pusara* Juli–Agustus 1965 : 22
6. Ki Hajar Dewantara pernah menempeleng mandor Belanda, *Buana Minggu*, 15 Pebruari 1976
7. Abdurrachman, Cita-cita, *Pusara* : 22
8. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, 1950 : 21
9. Pringgodigdo, *Sejarah*, 1950 : 22
10. Pringgodigdo, *Sejarah*, 1950 : 94
11. Pringgodigdo, *Sejarah*, 1950 : 94
12. Pringgodigdo, *Sejarah*, 1950 : 22
13. Koch, *Menuju*, 1951 : 106
14. Koch, *Menuju*, 1951 : 94
15. Koch, *Menuju*, 1951 : 100
16. Koch, *Menuju*, 1951 : 102
17. Koch, *Menuju*, 1951 : 102
18. Abdurrachman, *Cita-cita, Pusara;* 1965 : 23

19. Abdurrachman, Cita-cita : 23
20. Abdurrachman, Cita-cita : 23
21. Abdurrachman, Cita-cita : 23
22. KHD, *Demokrasi dan Leiderschap* : 7
23. KHD, *Demokrasi dan Leiderschap* : 8
24. KHD, Pengajaran bagi Rakyat kita kurang dan mengecewakan, *Wasita*, Pebruari, 1929 atau Karya I : 104
25. KHD, Pengajaran, *Wasita*, Pebruari 1929
26. KHD, Pengajaran, *Wasita*, Pebruari 1929
27. M. Tauchid, *Perjuangan* : 7

BAB VII BAPAK PENDIDIKAN NASIONAL

Perguruan Taman Siswa yang pertama-tama didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Ia lahir pada masa rakyat Indonesia bergerak menuju Indonesia Merdeka. Pada waktu itu pergerakan rakyat sedang menempuh masa peralihan, dari masa perjuangan secara kooperatif dengan Pemerintah Kolonial ke masa perjuangan non-kooperatif. Taman Siswa merupakan badan perjuangan yang berjiwa nasional; suatu pergerakan sosial yang menggunakan kebudayaan sendiri sebagai dasar perjuangannya.[1]

Taman Siswa tidak hanya menghendaki pembentukan intelek, tetapi juga dan terutama pendidikan dalam arti pemeliharaan dan latihan susila.[2] Bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan itu? Jawab atas pertanyaan ini ialah: dengan menggunakan dasar kekeluargaan.

Seorang guru atau pamong berkewajiban mengajar dan mendidik *"Mengajar"* berarti memberi ilmu pengetahuan, menuntun gerak-pikiran serta melatih kecakapan atau kepandaian anak didik kita, agar mereka kelak menjadi orang yang pandai, berpengetahuan dan cerdas. *"Mendidik"* berarti menuntun tumbuhnya budi pekerti dalam hidup anak didik kita, supaya mereka kelak menjadi manusia berpribadi yang beradab

dan susila.[3] Menurut Ki Hajar Dewantara *adab* atau *Keluhuran budi* manusia itu menunjukkan sifat batinnya manusia (misalnya keinsyafan tentang kesucian, kemerdekaan, keadilan, ke Tuhan-an, cinta kasih, kesetiana, kesenian, ketertiban, kedamaian, kesosialan dan lain sebagainya), sedang *kesusilaan* atau *kehalusan* itu menunjukkan sifat hidup lahirnya manusia yang serba halus dan indah (kebudayaan). Sering dipakai kata-kata etis dan estetis, yang menunjukkan dua sifat manusia yang *luhur* dan *halus* atau indah itu.[4]

Dengan menggunakan dasar kekeluargaan, maka antara guru atau pamong dengan muridnya terdapat hubungan yang erat. Seorang pamong Taman Siswa yang semula menuntut pelajaran di Sekolah Gubernemen menceriterakan pengalamannya bahwa ada perbedaan yang besar antara Sekolah tersebut dengan Taman Siswa. Di H.B.S. di mana ia dulu menuntut pelajaran, guru adalah seperti *ambtenaar* atau pegawai yang berdiri di depan kelas. Ia tidak pernah menaruh perhatian kepada murid-muridnya, selain mengajar yang dipusatkan pada pembentukan intelek. Ia tidak akan mengerti kesulitan anak didiknya. Sebaliknya siswa-siswa di Taman Siswa merasa bahwa perguruannya merupakan rumah ke dua. Di tempat itu ia menemukan "bapak" atau "ibu" yang dapat diminta nasihatnya atau pertimbangannya apabila mereka menghadapi kesulitan.[5] Mereka tidak takut menyampaikan masalah-masalahnya itu kepada bapak atau ibu pamong, karena antara kedua belah pihak itu ikatan batin yang intim, ikatan yang terdapat dalam keluarga.

Tipe rumah perguruan yang sekaligus menjadi tempat tinggal para pamong, membuat anak-didik merasa seperti berada dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian maka di perguruan Taman Siswa tidak ada kebiasaan mengadakan kegiatan hanya pada jam sekolah saja. Pada waktu-waktu lain misalnya sore hari anak-didik datang lagi untuk melakukan

kegiatan olah raga, pramuka, berolah seni dan kegiatan lain yang bersifat positif. Di setiap saat mereka dapat menemui "bapak" atau "ibu" pamongnya.

Perguruan Taman Siswa juga sering dipinjam oleh rakyat setempat untuk keperluan yang berguna bagi kepentingan rakyat banyak, misalnya untuk memberikan pelajaran agama, melatih bela diri dan sebagainya. Sudah barang tentu semuanya ini atas ijin pimpinan perguruan, dengan ketentuan tidak merugikan atau merepotkan perguruan. Di sini terjadi integrasi antara perguruan dan rakyat.

Dalam melaksanakan tugasnya, mengajar dan mendidik, pamong harus memberi tuntunan dan menyokong pada anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan sendiri. Cara mengajar dan mendidik dengan menggunakan alat perintah, paksaan dengan hukuman seperti yang dipakai dalam pendidikan di masa dahulu, hendaknya dihindari. Metode ini disebut metode *Among*. Semboyan yang dipergunakan untuk melaksanakan metode ini adalah *Tut Wuri Andayani*, artinya mendorong para anak didik untuk membiasakan diri mencari dan belajar sendiri. Guru atau pamong mengikuti di belakang dan memberi pengaruh, bertugas mengamat-amati dengan segala perhatian; pertolongan diberikan apabila dipandang perlu. Anak didik hendaknya dibiasakan bergantung pada disiplin kebatinannya sendiri, bukan karena paksaan dari luar atau perintah orang lain.

Dengan menggunakan metode *Among*, yang berarti membimbing anak dengan penuh kecintaan dan mendahulukan kepentingan sang anak maka anak dapat berkembang menurut kodratnya. Bakatnya dapat berkembang dan hubungan pamong dan murid adalah seperti keluarga. Oleh sebab itu sejak jaman penjajahan murid-murid Taman Siswa menyebut gurunya "ibu" dan "bapak". Pada jaman penjajahan, murid memanggil gurunya dengan sebutan: *meneer*, *mevrouw* dan *juffrouw* (tuan, nyonya,

nona) atau di daerah Jawa terdapat sebutan: *mas behi, den behi,* bahkan ada yang menyebut *ndoro.*

Sesudah Taman Siswa berkembang dan merupakan keluarga yang besar, dirasa perlu untuk memiliki pendapa yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan. Untuk tempat bermusyawarah, mempergelarkan kesenian, latihan tari, tempat ceramah, diskusi, pesta perkawinan dan lain-lainnya. Untuk kepentingan ini maka Taman Siswa Yogyakarta yang pada waktu itu berkedudukan di Jl. Stasiun berusaha membeli tanah pekarangan yang luas. Pada 14 Agustus 1935, dapatlah dibeli sebuah pekarangan dengan rumah beserta isinya yang terletak di Jl. Wirogunan (sekarang Jl. Taman Siswa) no. 31–33. Uang yang dipakai untuk membeli pekarangan tersebut diperoleh dari "Bank Nasional", yang dibayar kembali dengan bunga yang sangat rendah. Pada waktu itu yang menjadi ketua Majelis Luhur adalah Ki Sudarminta dan pimpinan Bank Nasional adalah R. Rujito.

Pada 6 Juli 1937 Taman Siswa Mataram-Yogyakarta pindah ke Jl. Wirogunan atau Jl. Taman Siswa. Di tempat ini ruangan untuk kelas jumlahnya lebih banyak daripada di tempat sebelumnya. Sedikit demi sedikit pekarangan itu diperluas dengan membeli tanah di sekitarnya. Kemudian direncanakan pembuatan pendapa, yang memerlukan biaya yang cukup besar. Salah satu jalan untuk memperoleh uang itu ialah dengan cara pengumpulan dana dari murid-murid Taman Siswa. Pada Januari 1936 Majelis Luhur mengumumkan pemungutan sokongan *"benggol bulanan"* dari murid-murid Taman Siswa di semua cabang yang ada di Indonesia.

Setahun kemudian, pada 10 Juli 1938 dilangsungkan perletakan batu pertama Pendapa Pusat Taman Siswa. Sebelum upacara tersebut dimulai, Ki Hajar Dewantara menerangkan perlunya Taman Siswa mempunyai pendapa. Disebutnya pula

nama-nama yang berjasa dalam usaha mendirikan bangunan itu, di antaranya ialah:

1. Siswa-siswa Taman Siswa seluruh Indonesia dengan "benggol bulanan"-nya.
2. P.S.S.I. (Persatuan Sepakraga Seluruh Indonesia) dengan anggota-anggota P.B.M.T.S. (Persatuan Bekas Murid Taman Siswa) sebagai pelopornya.
3. B.P.H. Suryodiningrat.
4. Ir. Suratin Sosrosugondo, G.P.H. Tejokusumo dan Ki Penewu Katri Kartisuseno sebagai pembuat rencana dengan R. Sindutomo sebagai pelaksana dan R. Rujito sebagai ketua komisi pendirian.
5. Ni Kumo Ratih Wonoboyo sebagai ketua wismarini.
6. Ibu Pawiyatan Taman Siswa.
7. Majelis Luhur Taman Siswa.[6]

Ki Hajar Dewantara pada kesempatan tersebut juga membacakan piagam. Isi piagam antara lain bahwa pada hari Ahad Legi, tanggal 12 Jumadilawal, tahun 1869 Saka (1357 Hijrah, wulan Adi, bersamaan dengan hari bulan 10 Juli 1938 jam 7.15 pagi-pagi, Nyi Hajar Dewantara telah meletakkan batu pertama Pendapa Taman Siswa. Nyi Hajar bertindak karena permintaan Ki Hajar Dewantara dan mewakili semua orang yang turut mendirikan "Wakaf Merdeka" dari Persatuan Taman Siswa. Perletakan batu pertama tersebut disaksikan oleh orang-orang yang boleh dianggap mewakili segenap golongan dari masyarakat Yogyakarta yang bersahabat dengan Perguruan Kebangsaan Taman Siswa.

Pada hari Selasa Kliwon, 2 Ruwah 1889 atau 27 September 1938, diadakan upacara pemasangan paku pada molo, yang dilakukan oleh G.P.H. Tejokusumo didahului dengan suatu khotbah oleh B.P.H. Suryodiningrat. Kira-kira dua bulan kemudian, tepatnya pada 16 Nopember 1938, bertepatan dengan

pembukaan Kongres Taman Siswa ke III di Yogyakarta, Pendapa Taman Siswa itu dibuka dengan resmi.

Upacara pembukaan dilakukan oleh Nyi Hajar Dewantara. Dengan mantera *Rawe-rawe rantas*, lepaslah janur dan bunga melati yang terpancang di Pendapa. Ini melambangkan bahwa dengan keteguhan iman, segala perintang yang menghalangi jalannya Taman Siswa akan tidak berdaya dan kemudian mati dengan sendirinya. Kemudian mengucapkan *Malang-malang putung* dipatahkan batang kayu yang terpancang di Pendapa. Tindakan ini melambangkan bahwa penghalang Taman Siswa akan patah. Selanjutnya diikuti dengan pernyataan tanda syukur kepada Tuhan Y.M.E. dimulai dengan mengalunkan tembang *Puspanjala* dan *Mega Mendung* oleh murid-murid Taman Siswa.

Pada waktu peresmian Pendapa itu dan pada pembukaan Kongres ke III, diresmikan pula panji-panji Taman Siswa. Panji-panji itu berbentuk segi panjang berukuran 50 x 75 cm, menyerupai perisai dan berisi lambang Taman Siswa. Panji-panji ini melukiskan secara simbolik dasar perjuangan Taman Siswa dalam mencapai cita-citanya.

Di sebelah utara pendapa, agak menonjol ke muka terdapat rumah yang dijadikan tempat kediaman Ki Hajar Dewantara. Tempat ini dikenal sebagai *padepokan*. Di sekitar Padepokan tersebut terdapat tanaman dan pohon-pohon yang rindang daunnya, sehingga memberikan kesan suasana yang sejuk dan damai, apabila seseorang memasuki halaman tersebut. Di dekatnya terdapat asrama puteri yang diberi nama *Wismarini*, sedang agak jauh di belakang terdapat asrama untuk anak-anak pria yang diberi nama *Wisma Prasaja*. Ruangan kelas untuk belajar anak-anak terdapat di sekeliling Pendapa. Beberapa tahun kemudian sesudah Taman Siswa Yogyakarta makin berkembang, beberapa tanah yang letaknya di sebelah timur pendapa – disela oleh beberapa pekarangan milik orang lain dibeli

dan dipakai untuk kelas-kelas dan lapangan olah raga. Dewasa ini di sebelah selatan Pendapat dibangun sebuah gedung yang cukup megah dan dipergunakan untuk perkuliahan Perguruan Tinggi Sarjana Wiyata dan perkantoran Majelis Luhur.

Sesudah Ki Hajar Dewantara pindah ke Padepokan baru yang tertelak di Jl. Muja-muju pada 1953, maka Padepokan lama dipakai untuk rumah tamu dan sesudah Ki Hajar wafat, gedung tersebut dijadikan gedung museum, tempat benda-benda bersejarah yang pernah dipergunakan oleh Ki Hajar selama berjuang. Padepokan di Muja-muju didirikan atas sumbang-sih seluruh keluarga Taman Siswa yang dipersembahkan kepada bapaknya yang sangat dicintai dan dihormati. Ketika Ki Hajar mendapat rumah dari Pemerintah R.I. karena diangkat menjadi pahlawan, maka rumah itu didirikan di belakang Padepokan Muja-muju.

Demikianlah sedikit gambaran pendirian Pendapa Taman Siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara Pendapa itu mempunyai arti yang penting bagi Perguruan Kebangsaan Taman Siswa sebagai alat pertalian keluarga yang penuh suasana kebatinan, sehingga dengan sendirinya dapat memperdalam, memperkuat serta mempertinggi budi satu-satunya dan sekalian anggota keluarga.[7]

Agar tidak terpisahkan dari keluarga Taman Siswa, Ki Hajar dan para pemimpin Taman Siswa menginginkan adanya makam keluarga Taman Siswa. Makam itu sekarang diberi nama Taman Wijayabrata, terletak di sebelah selatan Taman Pahlawan Yogyakarta. Hingga waktu ini tokoh-tokoh selain Ki dan Nyi Hajar, yang dimakamkan di Taman Wijayabrata itu adalah Ki dan Nyi Mangunsarkoro, Ki dan Nyi Cokrodirjo, Ki Pronowidigdo, dokter Sukiman, Ki dan Nyi Sukemi dan beberapa lagi lainnya.

Selain berdasarkan kekeluargaan, pendidikan di Taman Siswa menggunakan sistem Tri Pusat. Pusat-pusat pendidikan

ini masing-masing harus tahu kewajibannya sendiri-sendiri dan mengakui haknya pusat-pusat lainnya, yaitu:

1. *Pusat keluarga:* untuk mendidik budi pekerti dan laku sosial.
2. *Pusat perguruan:* sebagai balai wiyata, yaitu untuk usaha mencari dan memberikan ilmu pengetahuan, di samping pendidikan intelek.
3. *Pusat pergerakan pemuda:* sebagai daerah merdekanya kaum pemuda atau "Kerajaan Pemuda" untuk melakukan penguasaan diri, yang amat penting untuk pembentukan watak.[8]

Dalam hal ini perguruan berdiri sebagai titik pusat dari ketiga pusat tersebut dan menjadi perantara keluarga dan anak-anaknya dengan masyarakat. Antara orang tua murid dengan guru harus ada kerjasama untuk kemajuan anak didik, sedang di dalam pergerakan pemuda, haruslah ada beberapa guru yang menjadi penasihatnya, Di sini guru harus melaksanakan metode *Among*.

Di kalangan Taman Siswa anak-anak yang besar mendirikan P.P.T.S. (Persatuan Pemuda Taman Siswa), yang mempunyai bermacam-macam kegiatan: olah raga, debat, sandiwara, pengajaran (maksudnya tugas mengajar membaca dan menulis orang buta huruf sebanyak-banyaknya dalam waktu tertentu, mengumpulkan pakaian bekas untuk si miskin, latihan P.P.P.K. (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan lain sebagainya. Murid-murid Taman Siswa itu juga seperti murid-murid di sekolah lain, bedanya bahwa mereka itu berbuat bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka, sekalipun para guru itu berdiri di belakang sebagai penasihat dan sebagai "pemimpin-pemimpin yang berdiri di belakang barisan" *(Tut Wuri Andayani)* atau mengikuti di belakang dengan wibawa.[9] Prof. Bunche dari *Howard University* di Washington, yang seminggu lamanya menjadi tamu kita di Yogyakarta Mei 1938, mengatakan bahwa

ia belum pernah melihat hubungan kekeluargaan yang begitu laras antara murid-murid dan guru.[10]

Sejak lahirnya Taman Siswa menyatakan dirinya sebagai Lembaga Pengajaran Nasional. Akan tetapi kebangsaan dalam Taman Siswa itu hanyalah mengenai sifat lahirnya saja. Pada hakekatnya Taman Siswa mengutamakan "Hak diri" dan "Tertib Damai", artinya tiap-tiap manusia harus mendapat kemerdekaan yang seluas-luasnya, dengan syarat tidak merugikan tertib damainya masyarakat. Kepentingan masyarakat ini harus diletakkan di atas kepentingan diri sendiri.[11] Oleh sebab itu kita wajib memberi kemerdekaan kepada anak-anak, tetapi dalam batas tertib damai dari masyarakat di mana ia berada.

Mengenai dasar pendidikan Taman Siswa adalah dasar kemanusiaan, dan kebangsaan itu hanya diartikan ujudnya, jadi sifat lahirnya saja. Oleh sebab itu maka adab kemanusiaan lebih diutamakan dari adab kebangsaan. Syarat kebangsaan yang berlawanan dengan syarat kemanusiaan, harus dibatalkan.[12]

Bagaimana cara melaksanakan pendidikan kebangsaan itu? Karena nasionalisme di dalam Taman Siswa adalah nasionalisme kultural yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, maka cara memberikan pendidikan kebangsaan itu dilakukan melalui etika, sejarah kebudayaan, pelajaran bahasa, kesenian – termasuk antara lain permainan, nyanyian, tarian dan musik, kepemudaan.

Semboyan untuk pengajaran nasional ini adalah: "Kembali kepada yang bersifat nasional". Konsekuensi yang pertama dari semboyan ini adalah pemakaian bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran. Apabila suatu tempat tidak terdapat bahasa ibu, seperti halnya Jakarta, maka bahasa Melayu baru yang dipakai dan dinamakan dengan istilah baru: "bahasa Indonesia". Beberapa pelajaran masih diberikan dalam bahasa Belanda, jika bahasa Jawa atau Indonesia masih sulit untuk dipakai sebagai bahasa pengantar, misalnya untuk ilmu pasti.[13]

Menurut Ki Hajar, keluhuran dan kehalusan budi adalah dua sifat yang nampak dalam hidup manusia. Manusia adalah makhluk terpilih dan berbudi, yang memiliki kekuatan-kekuatan serta sifat-sifat yang menyebabkan bedanya makhluk manusia dan makhluk hewan.

Sejak kecil anak-anak harus diperkenalkan pada keluhuran budi dan kehalusan budi, misalnya dengan memberikan penghormatan kepada pahlawan-pahlawan. Di sini anak diperkenalkan pada watak dan laku utamanya tokoh-tokoh itu. Oleh sebab itu penghormatan pahlawan tidak hanya ditujukan kepada pahlawan-pahlawan nasional saja, akan tetapi juga pahlawan-pahlawan bangsa lain. Hanya dalam memberi penghormatan kepada pahlawan nasional, dapat diselipkan tujuan lain, ialah memupuk atau menanamkan perasaan nasionalisme. Itulah sebabnya mengapa pada jaman penjajahan Belanda, hampir di tiap Perguruan Taman Siswa, gambar Diponegoro dipasang di kelas-kelas. Juga hari lahirnya diperingati dan hari *weton*-nya (hari Rebo Wage) dijadikan Hari Pendidikan, yang terkenal dengan nama *Rebo Wagen*.

Sumber lain untuk bahan mengajarkan keluhuran budi dan kesusilaan terdapat dalam agama, dunia pewayangan, babad, ceritera (legenda atau mite), biografi pahlawan dan sebagainya. Jika Mahatma Gandhi, tokoh terkemuka dari India, menyebut Bagawatgita sebagai karya sastra yang berisi ajaran moral yang tinggi, Ki Hajar banyak mengutip dari buku *Sastra Gending*, yang disebutkan berasal dari Sultan Agung Mataram.

Menurut Ki Hajar, pelajaran moral dan kesusilaan itu akan berharga apabila pelajaran itu dapat dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Asas-asas kesusilaan yang tidak dipratekkan tidak berguna sama sekali. Barang siapa yang tidak menjalankan hidup menurut hukum-hukum susila, ia tidak dapat dianggap manusia dalam arti yang sebenarnya.

Di Taman Siswa pendidikan kesenian sangat diperhatikan, karena pendidikan kesenian itu dapat dijadikan alat untuk memperhalus budi anak. Kesenian daerah digali dan kemudian ditingkatkan untuk dikembangkan. Sejak Taman Siswa dibuka, usaha menggali *tembang* dan *dolanan* (permainan) anak-anak dari masyarakat telah dilakukan. Dari Taman Siswa Yogyakarta, kesenian tersebut disebarluaskan melalui cabang-cabang Taman Siswa lainnya. "Dolanan anak-anak" Taman Siswa merupakan sesuatu yang khas Taman Siswa. Di Cabang Semarang, guru-guru dari sekolah lain, seperti sekolah *"Mardigarini"* dari *"Institut Sigit"* datang di Taman Siswa untuk belajar "dolanan anak-anak" dari pamong-pamong Taman Siswa.[14] Kemudian pada waktu Kongres Perempuan ke I di Yogyakarta pada 22–25 Desember 1928, "dolanan anak-anak" dari Taman Siswa Yogyakarta merupakan salah satu acara pada malam resepsi pembukaan.

Dalam bidang seni tari, Ki Hajar dengan dibantu oleh tokoh-tokoh kesenian di Yogyakarta, seperti Pangeran Suryadiningrat dan Pangeran Tejakusuma, berjasa menyebar-luaskan tarian yang semula hanya dipelajarkan di kalangan istana dan bangsawan saja. Demikianlah tiap hari Rabu pada jaman penjajahan, Ki dan Nyi Hajar bersama dua pangeran tersebut selalu menyaksikan latihan tari Jawa oleh anak-anak Taman Siswa, bertempat di Pendapa. Selain tarian Jawa, juga diajarkan tarian lain, misalnya tari Bali dan bahkan tari Hindu. Diajarkannya tari Hindu ini, karena kebetulan pada waktu itu ada tamu dari India yang datang di Taman Siswa untuk mempelajari tari Jawa. Mereka tinggal selama beberapa bulan di tengah-tengah keluarga Taman Siswa. Kesempatan itu dipakai oleh Taman Siswa untuk saling menukar pengetahuan mengenai tari.

Dalam memajukan kesenian ini Ki Hajar mendapat bantuan pula dari Gusti Mangkunegara VII. Pada waktu masih belajar di Negeri Belanda raja ini telah berkenalan dengan Ki

dan Nyi Hajar Dewantara. Ketika Taman Siswa akan membuat kamar untuk penginapan tamu-tamu dari India, Gusti Mangkunegara memberikan bantuannya. Selain itu beberapa murid puteri Taman Guru yang pandai menari srimpi, setiap hari Minggu didatangkan di istana Mangkunegaran untuk membantu melatih menari bagi warga istana tersebut. Pernah juga anak-anak pondok Wisma Rini diundang ke istana Mangkunegaran untuk ikut merayakan hari ulang tahun Gusti Nurul, puteri Gusti Mangkunegara. Raja ini bersama permaisuri dan puterinya pernah datang di Taman Siswa Yogyakarta.

Pembinaan pendidikan nasionalisme di Taman Siswa selalu diusahakan. Sebagai ilustrasi kami kutipkan pendapat seorang bekas Pamong Taman Siswa Jakarta mengenai nasionalisme pada anak-anak ketika berlangsung aksi militer Belanda I. Justru aksi itu membawa makin mendalamnya perasaan dan kesadaran nasionalisme di kalangan murid-murid. Pada suatu ketika diadakan larangan memakai lencana merah-putih. Bendera Merah Putih yang berkibar di lapangan olah raga juga harus diturunkan. Akan tetapi apa yang terjadi? Anak-anak itu tiap tanggal 17 mengenakan pakaian merah-putih; anak-anak perempuan memakai rok bawah putih dengan blus merah dan anak laki-laki mengenakan stelan putih-putih.[15]

Satu lagi contoh mengenai kesetiaan Taman Siswa kepada Pemerintah Republik Indonesia pada masa pendudukan. Pada waktu itu uang Republik yang disebut ORI dengan gambar Bung Karno dilarang beredar. Sebagai penggantinya pemerintah mengeluarkan uang Nica. Akan tetapi anak-anak Taman Siswa membayar uang sekolahnya dengan ORI. Guru-gurunya menerima nafkah berupa ORI. Akan tetapi berhubung harga ORI sangat merosot, maka nafkah yang diterima oleh para pamong itu hanya dapat dipakai untuk hidup selama satu minggu saja.

Kesulitan para pamong ini dimengerti oleh para orang tua murid. Oleh sebab itu ketika pimpinan Taman Siswa minta

agar biaya sekolah dibayar dengan uang sebagian dan beras sebagian, mereka tidak keberatan. Sesudah peraturan ini dilaksanakan, maka setiap guru pada akhir bulan membawa pulang uang dan beras yang diboncengkan pada sepedanya. Mereka mendapat pembagian beras yang cukup untuk hidup selama satu bulan. Pada waktu itu guru-guru umumnya tidak memikirkan soal pakaian. Hal ini dirasakan sebagai sesuatu yang mewah. Walau demikian prestisenya di depan murid tidak merosot.[16]

Masih dipakainya uang Republik di kalangan Taman Siswa membawa akibat bahwa ORI dalam waktu yang lama masih "berlaku sah" di kampung-kampung dan pasar-pasar kecil. Ketika anggota delegasi Republik dan kantor-kantor di Jakarta mengganti ORI dengan uang Nica, orang-orang Taman Siswa "tetap setia kepada *Kiblik*".[17]

Hubungan antara murid dan guru sangat dekat, sehingga guru-guru juga mengetahui kesulitan anak-didiknya dalam rumah, terutama yang menyangkut masalah ekonomi. Anak laki-laki berusia 13 tahun banyak yang terpaksa terjun ke masyarakat untuk membantu orang tuanya mencari uang, setidak-tidaknya untuk membiayai sekolahnya sendiri. Anak-anak ini biasanya termasuk keluarga yang ayahnya seorang non-kooperator atau menolak kerjasama dengan Nica yang menduduki kota. Anak-anak itu berjualan koran, majalah dan barang-barang lain dengan memperoleh komisi.

Suatu ketika seorang guru yang akan melihat bioskop menjadi kaget mendengar ucapan "Salam, Pak". Ucapan ini adalah ucapan anak-anak Taman Siswa kepada teman atau gurunya, apabila berjumpa atau berpisahan. Ternyata anak itu sedang berjualan karcis secara gelap untuk pertunjukan malam itu. Guru itu berpikir apakah tindakan muridnya itu harus dilarang? Jawabnya ialah: "Ya, untuk keadaan yang normal". Tetapi dalam keadaan yang tidak normal, di mana ibunya

sangat membutuhkan uang, maka dagang gelap seperti yang dilakukan muridnya itu menjadi normal.[18]

Demikianlah keadaan di Taman Siswa, ikatan antara guru dan murid amat dekat dan pembinaan nasionalisme yang selalu tetap dilakukan. Hubungan antar anggota Perguruan juga erat. Ki Hajar Dewantara pada Kongres Taman Siswa 1936, menegaskan bahwa setiap anggota Taman Siswa harus merasa sebagai saudara terhadap anggota yang lain. Pada waktu itu dimasukkan sebutan "saudara seperguruan".[19]

Taman Siswa selama jaman penjajahan Belanda selalu melakukan kebijaksanaan non-kooperatif. Oleh sebab itu tidak mau menerima subdisi dari Pemerintah Kolonial, agar dengan demikian ia dapat hidup merdeka untuk bertindak sesuai dengan tujuannya. Kebijaksanaan ini memaksa Taman Siswa untuk membelanjai sendiri segala usahanya. Selanjutnya karena kas Taman Siswa tidaklah besar, maka untuk dapat menegakkan sistem membelanjai sendiri tersebut, para anggotanya harus dapat hidup sederhana. Oleh sebab itu mengenai hal "Hidup Sederhana" yang selalu dianjurkan oleh Pemerintah R.I. akhir-akhir ini, bagi keluarga Taman Siswa adalah bukan hal yang baru.

CATATAN

1. Sartono Kartodirdjo, *Lembaran Sejarah I* : 38
2. KHD, *Karya I* : 58
3. KHD, *Karya I* : 482
4. KHD, *Karya I* : 482
5. Hazil, De T.S. en de Revolutie, *Indonesia*, Mei 1950.
6. *Taman Siswa 30 Tahun* : 236
7. *Taman Siswa 30 Tahun* : 236
8. KHD, *Karya I* : 74
9. KHD, *Karya I* : 55
10. KHD, *Karya I* : 59
11. Pasal 1 Asas TS 1922
12. Pendidikan Taman Siswa, *Pusara* 1935
13. KHD, *Karya I* : 61
14. *Taman Siswa 30 Tahun* : 242
15. Hazil, De T.S., *Indonesie*, Mei 1950
16. Hazil, De T.S., *Indonesie*, Mei 1950
17. Hazil, De T.S., *Indonesie*, Mei 1950
18. Hazil, De T.S., *Indonesie*, Mei 1950
19. Mangunsarkoro, Het Nationalisme in de T.S. Beweging, *Koloniale Studieen*, no. 2, 1937

BAB VIII MELAWAN "ORDONANSI SEKOLAH LIAR"

Perguruan Taman Siswa lahir pada 3 Juli 1922 dengan menggunakan nama *"Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa"*, dan berkedudukan di Yogyakarta. Pada hari pertama, ketika perguruan itu dibuka, Ki Hajar Dewantara – waktu itu masih bernama Suwardi Suryaningrat – menguraikan dengan panjang lebar mengenai asas dan tujuan Taman Siswa. Pidato Bapak Taman Siswa ini kemudian dikenal sebagai Asas-asas 1922 yang dapat disarikan sebagai berikut:

1. Agar suatu bangsa dapat tumbuh secara sehat lahir dan batin, maka pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepadanya harus berdasarkan prinsip nasional dan kultural-kemasyarakatan.
2. Pengajaran yang diberikan oleh Pemerintah Kolonial hanya untuk dapat menjadi "buruh" karena memiliki "ijazah", tidak untuk isi pendidikannya dan mencari pengetahuan guna kemajuan jiwa-raga.
3. Pengajaran yang berjiwa kolonial itu akan membawa kita selalu tergantung kepada bangsa Barat. Keadaan ini tidak akan lenyap hanya dilawan dengan pergerakan politik saja. Perlu diutamakan penyebaran hidup merdeka di kalangan

rakyat kita dengan jalan pengajaran yang disertai pendidikan nasional.

4. Kita harus berani membuat sistem pendidikan dan metodik baru didasarkan atas kultur sendiri dan untuk kepentingan masyarakat kita sendiri.
5. Pemakaian metode Among, suatu metode yang tidak menghendaki "perintah-paksaan", melainkan memberi "tuntunan" bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya.
6. Supaya ada kemerdekaan yang seluas-luasnya, pengajaran dan pendidikan nasional itu harus berdasarkan prinsip berdiri di atas kaki sendiri dan syaratnya adalah "berhemat".
7. Perlu adanya demokratisasi dalam pengajaran, supaya tidak hanya lapisan atas saja yang terpelajar. Pengajaran harus benar-benar dapat dinikmati oleh rakyat.[1]

Untuk mengingatkan tahun berdirinya Taman Siswa, maka ditandai dengan pemakaian *candrasengkala* yang berbunyi: *"Lawan Sastra Ngesti Mulya"*, menunjukkan tahun 1852 Saka atau 1922 M. Arti candrasengkala tersebut ialah dengan berilmu mencita-citakan kemuliaan atau ilmu yang luhur dan mulia menyelamatkan dunia serta melenyapkan kebiadaban. Tidak berapa lama kemudian banyak orang yang tertarik kepada usaha pendidikan nasional tersebut dan mereka mendirikan Taman Siswa. Selain itu juga terdapat bekas sekolah B.U. yang menyerahkan sekolahnya pada Taman Siswa, misalnya di Jakarta, Tebingtinggi, Galang dan Medan, sedang Taman Siswa Bandung adalah bekas sekolah milik Sarikat Rakyat. Penyerahan sekolah ini dilakukan oleh Ir. Sukarno (kemudian menjadi Presiden R.I. ke I). Untuk mengadakan ikatan antara Taman Siswa di Mataram–Yogyakarta dengan Taman Siswa di tempat-tempat lain, maka pada Oktober 1923 diadakan konperensi. Hasilnya membentuk persatuan sehingga dengan demikian

nama *"Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa"* ditambah dengan keterangan *"Hoofdzetel* Yogyakarta", artinya berpusat di Yogyakarta. Untuk mengenang peristiwa tersebut ditandai dengan *candrasengkala: "Suci Tata Ngesti Tunggal"*, artinya Suci batinnya, Tertib lahirnya, Luhur maksudnya dan sempurna tujuannya. Suci tertib bercita-cita tunggal; arti "tunggal" di sini ialah bersatu dalam arti luas. Boleh diartikan bersatu dengan Tuhan, atau ditafsirkan sebagai "sempurna".[2]

Selama satu windu (delapan tahun menurut perhitungan tahun Jawa) Taman Siswa giat memperkuat diri ke dalam. Akan tetapi ia juga tidak memisahkan diri dari dunia luar, terutama dari pergerakan rakyat yang memiliki program pendidikan, misalnya B.U., S.I., Muhammadiyah, Sarikat Rakyat dan sebagainya. Ketika P.P.P.K.I. (Persatuan Partai Politik Kebangsaan Indonesia) mengadakan kongresnya pada 31 Agustus 1928 di Surabaya, Ki Hajar Dewantara diminta memberikan prasarannya. Pada waktu itu nama Suwardi Suryaningrat sudah tidak dipakai lagi. Pergantian nama tersebut dilakukan pada tanggal 2 bulan Puasa Jimakir 1858 atau tanggal 23 Pebruari 1928, tepat pada usia 40 tahun menurut perhitungan tahun Jawa.

Prasaran tersebut dimufakati oleh kongres. Isinya menguraikan dasar-dasar alasan mengapa diadakan usaha pendidikan nasional. Di antaranya dikemukakan bahwa pengajaran nasional adalah hak dan kewajiban kita semua. Karena Pemerintah di Indonesia pada waktu itu adalah Pemerintah Nederland yang bersikap kolonial, maka sesungguhnya kita sendirilah yang harus memikirkan pengadaan pengajaran nasional, sebelum kita mempunyai Pemerintah Nasional sendiri.[3]

Sebagai seorang yang selalu menganjurkan dan mengusahakan persatuan, dalam prasaran tersebut juga dikemukakan perlu adanya persatuan jalan dalam aksi pengajaran yang berguna bagi rakyat. Agar supaya ada kesamaan penafsiran tentang mak-

sud perkataan "persatuan" maka Ki Hajar menjelaskan sebagai berikut:

> *"Persatuan itu diartikan: persatuan atas keperluan yang penting-penting dan diakui oleh semua golongan; persatuan yang demikian itu laras dan nyata. Jangan mengejar persatuan dalam hal yang kecil-kecil dan dalam mana keperluan dari golongan yang satu bertentangan dengan keperluan dari golongan lain. Persatuan yang tidak harmonis dan tidak nyata, niscaya hanya persatuan pura-pura saja, yang berdirinya hanya dari paksaan atau dari tipu muslihat saja, dan tentu tak akan dapat lama berdiri lalu pecah lagi".*[4]

Dua tahun sesudah kongres P.P.P.K.I., Taman Siswa melangsungkan kongresnya yang ke I. Kongres ini diadakan pada 6–13 Agustus 1930, bertempat di Yogyakarta. Pada waktu itu jumlah cabang Taman Siswa tidak kurang dari 60 buah, terdapat di Jawa, Sumatra dan Kalimantan. Sebelumnya pada 1928, Taman Siswa menggemparkan masyarakat, karena tujuh dari dua belas murid Taman Siswa lulus pada ujian masuk AMS bagian pasti-alam. Orang-orang sebangsa yang dulu menertawakan usaha Taman Siswa dan tidak percaya bahwa orang-orang pribumi dapat berusaha tanpa bantuan Pemerintah Kolonial, sekarang berdiam diri. Mereka itu dulu berpendapat bahwa usaha Taman Siswa itu berarti mengundurkan jarum jam limapuluh tahun ke belakang.[5]

Kongres atau Rapat Besar Umum ke-1 itu berjalan dengan selamat dan menghasilkan:

1. Persatuan secara organisatoris dengan peraturan-peraturannya.
2. Penandatanganan surat perjanjian pendirian oleh Ki Hajar Dewantara atas nama kawan-kawan yang mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922, yang pada waktu kongres

itu diserahkan kepada Persatuan Taman Siswa yang diwakili oleh Majelis Luhur.[6]

Ujud organisasi Taman Siswa berbeda dengan perhimpunan lainnya. Sifat Taman Siswa itu diujudkan sebagai "Keluarga Besar Yang Suci" yang mempunyai sifat lahir dan batin. Di dalam organisasi lahir ada Pengurus Besarnya yang diberi nama Majelis Luhur. Tugas Majelis ini menjaga Peraturan Besar dengan menggunakan alat "Sendi dan Peraturan Besar". Dalam organisasi batin, Ki Hajar Dewantara adalah Ayah, yakni bapak bagi "Keluarga Besar dan Suci", dan wajib menjaga kemurnian Asas Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara berkedudukan sebagai Pemimpin Umum dan apabila diperlukan ia dapat melakukan diktatur, dengan catatan bahwa segala tindakannya tersebut kemudian dipertanggungjawabkan kepada kongres berikutnya. Cara organisasi ini sesuai dengan paham yang dianut oleh Taman Siswa, ialah: Demokrasi dengan kepemimpinan. Paham ini dikemukakan oleh Sutatmo Suryokusumo pada 1920, berupa brosur dengan judul *Sabdo Pandito Ratu*, ditulis dalam bahasa Belanda. Sutatmo tidak setuju dengan demokrasi yang berlaku di dunia Barat, yang berdasarkan liberalisme dan mementingkan jumlah suara dari mereka yang ikut menyetujui sesuatu pendapat. Menurut tradisi Barat, yang dianggap benar ialah kalau memperoleh dukungan suara separoh dari jumlah suara ditambah satu. Jika hal ini terjadi, maka bukan yang benar dan yang adil yang diakui berkuasa, tetapi yang mempunyai kekuatan fisik paling besar. Sutatmo berpendapat bahwa kebijaksanaan kepemimpinan penting untuk membawa keadilan.[7]

Berhubung majalah atau surat kabar merupakan alat yang sangat penting bagi suatu lembaga yang membutuhkan perluasan penyebaran cita-citanya kepada masyarakat luas, maka Taman Siswa juga mengeluarkan brosur-brosur dan majalah-majalah. Pada 1928 mulai terbit majalah *"Wasita"*. Sampai tahun 1930, majalah ini terutama ditujukan kepada orang-

orang di dalam lingkungan Taman Siswa sendiri. Pada 1931 majalah "Wasita" ini dihentikan penerbitannya, dan diganti oleh *"Pusara"*, yang sampai sekarang masih tetap menjadi organ Persatuan. Selain "Wasita" dan "Pusara" pada jaman penjajahan Belanda Taman Siswa mengeluarkan majalah lain, ialah *"Keluarga"* dan *"Keluarga Putera"*, terbit pada 1936. Di samping itu masih terdapat majalah lokal untuk kepentingan cabang-cabang atau daerah-daerah tertentu misalnya di Bandung, Jakarta, Cirebon, Mojokerto, Jember, Medan dan Purwokerto.[8]

Sejak 1930 Taman Siswa telah menjadi lebih kuat daripada masa-masa sebelumnya. Kongres juga memutuskan untuk membuka Taman Guru di Yogyakarta, dengan maksud agar perluasan pendidikan nasional di kalangan rakyat menjadi lebih cepat. Ketika dilangsungkan konperensi pada 1932, sebanyak 92 cabang dan 23 persiapan cabang dari jumlah 135 tempat yang terdapat perguruan Taman Siswanya. Salah satu keputusan konperensi adalah bahwa Taman Siswa harus mempunyai percetakan sendiri, agar dapat memenuhi kebutuhan cetak-mencetak yang pada waktu itu sudah sangat banyak.

Perkembangan Taman Siswa yang cepat itu sejalan dengan perkembangan pergerakan Kebangsaan yang berupa partai-partai. Golongan pemuda melahirkan kongresnya yang kedua pada 27–28 Oktober 1928 yang melahirkan suatu tekad bulat di kalangan bangsa Indonesia. Keputusannya yang berupa ikrar, bahwa Putera-puteri Indonesia mengakui bertumpah darah satu, tanah Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia dan berbahasa satu, bahasa Indonesia, mempunyai nilai simbolis bagi proses indonesianisasi. Bahasa Indonesia merupakan alat untuk membangun kebudayaan Indonesia dengan tanah air Indonesia sebagai wilayahnya dan bangsa Indonesia sebagai pendukungnya.

Sejak saat itu persatuan di kalangan bangsa Indonesia makin kuat. Bahasa Indonesia menolong mengikat persatuan

yang akan menggiatkan nasionalisme. Tindakan partai-partai politik makin radikal untuk mencapai Indonesia Merdeka. Akibatnya Pemerintah Kolonial melakukan tindakan kekerasan, antara lain melarang pegawai negeri menjadi anggota suatu partai. Polisi melakukan penggeledahan di rumah pemimpin-pemimpin partai, menangkap dan menahan para pemimpin. Peristiwa ini terutama terjadi pada sekitar tahun 1932. Pemerintah dihadapkan kepada masalah-masalah besar. Di dalam *Volksraad* juga nampak adanya persatuan dengan berdirinya "Fraksi Nasional" pada 27 Januari 1930. Ketua fraksi tersebut adalah Moh. Husni Thamrin.

Di Negeri Belanda perkumpulan *Indische Vereniging*, yang pada 1922 telah berganti nama menjadi "Perhimpunan Indonesia" makin bersikap radikal. Dalam anggaran dasarnya yang dikeluarkan pada 1925, disebutkan bahwa kemerdekaan penuh bagi Indonesia, hanya akan diperoleh dengan aksi bersama, dilakukan serentak oleh seluruh kaum nasionalis dan berdasarkan kekuatan sendiri.

Taman Siswa tidak melarang anggotanya memasuki partai. Oleh sebab itu, maka ketika Pemerintah Belanda melakukan kekerasan terhadap partai-partai tertentu, beberapa pamong Taman Siswa terkena pula. Ki Hajar Dewantara selalu mengatakan bahwa anggotanya dengan aliran partai manapun, apabila berada di dalam Taman Siswa harus mementingkan cita-cita Taman Siswa.

Ki Hajar mengumpamakan pamong Taman Siswa sebagai bapak tani yang bekerja di sawah, menanam benih-benih yang perlu. Baginya partai-partai politik adalah pagar sawah itu. Jika pagar itu kuat, maka amanlah sawah itu. Sebaliknya jika pagar itu rusak, hal ini akan membawa bahaya bagi bapak tani. Menurut Ki Hajar seakan-akan ada pembagian tugas antara partai politik dan lembaga pendidikan nasional. Pergerakan politik memperjuangkan hak-hak yang memagar lingkungan

kepentingan rakyat, sedang pergerakan sosial, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan nasional, bekerja di dalam lingkungan itu.[9] Selain terdapat pembagian tugas antara dua macam pergerakan tersebut, juga terdapat kerjasama. Oleh sebab itu dari Budi Utomo sampai pada P.N.I., semuanya adalah "kawan" Taman Siswa. Taman Siswa harus benar-benar satu dengan rakyat.

Ketika seluruh pergerakan nasional makin hidup dan makin kuat, maka Pemerintah Kolonial makin bertindak waspada. Tindakan itu juga diarahkan kepada pergerakan sosial, terutama yang menitik beratkan kegiatannya dalam bidang pendidikan. Maka dibuatlah "Undang-undang Pengajaran" yang diumumkan mulai berlaku pada 1 Oktober 1932. Undang-undang ini dikenal sebagai "ordonansi Sekolah Liar". Dalam bahasa Belanda disebut *"Onderwijs Ordonnantie"*, disingkat menjadi O.O., termuat dalam *Staatsblad* 1932 no. 494.

Taman Siswa mengetahui bahwa jika O.O. dilaksanakan, maka sekolah-sekolah swasta yang tidak mendapatkan subsidi dari Pemerintah Kolonial akan sangat menderita, bahkan dapat gulung tikar. Oleh sebab itu Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Harian yang berkedudukan di Yogyakarta, dalam sidangnya pada 29 September 1932, memutuskan memberi hak leluasa kepada Ki Hajar Dewantara untuk melaksanakan kekuasaan diktatur agar segera bersikap terhadap O.O. tersebut.[10] Tindakan Majelis Luhur ini disebabkan karena keadaan yang sangat mendesak, yang tidak memungkinkan dalam waktu yang amat singkat itu mengumpulkan semua wakil cabang untuk berkonperensi. Walaupun Ki Hajar Dewantara memegang kekuasaan diktatur dalam menghadapi O.O. itu, ia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya tersebut pada konperensi atau kongres yang diadakan kemudian. Tindakan ini adalah pengetrapan "Demokrasi dan kebijaksanaan kepemimpinan", suatu paham yang diikuti oleh Taman Siswa.

Pada tanggal 1 Oktober 1932, tepat pada hari berlakunya O.O., Ki Hajar Dewantara berkirim surat kawat kepada Gubernur Jendral di Bogor. Isi telegram tersebut adalah sebagai berikut:

"Gubernur Jendral Buittenzorg"

"Yang Mulia. Ordonansi yang disajikan amat tergesa-gesa dan dijalankan dengan cara paksaan dan mengenai sendi tulangnya masyarakat dan adab, sesudah rencana pengajaran (dari pemerintah) dibatalkan (oleh ***Volksraad)*** *seolah-olah membuktikan kebingungan dan kegetaran pada pemerintah, yang dengan sifat berbahaya salah mengerti dan salah raba terhadap kepentingan hidup matinya rakyat. Bolehlah saya memperingatkan, bahwa walaupun makhluk yang tak berdaya mempunyai rasa asali (insting) untuk menangkis bahaya guna menjaga diri dan demikianlah juga boleh jadi kami karena terpaksa akan mengadakan perlawanan sekuat-kuatnya dan selama-lamanya dengan cara tenaga diam."*

"Ki Hajar Dewantara"[11]

Salah satu pasal dalam ordonansi tersebut yang dipandang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup sekolah-sekolah swasta berbunyi bahwa Pemerintah Kolonial mempunyai kekuasaan penuh untuk mengurus ujud dan isi sekolah swasta itu. Artinya mulai dari bangunan rumah sekolah, ruang kelas, guru-gurunya dan isi pelajarannya. Bagi Taman Siswa yang melaksanakan kerja duta, yaitu membentuk manusia lahir batin, dan dalam menyelenggarakan usahanya itu mengikuti adat dan dasar sendiri, maka sahnya ordonansi tersebut berarti berakhirnya kemerdekaan rakyat untuk mengadakan pendidikan dan pengajaran.

K.H. Dewantara kemudian memberi uraian kepada semua anggota Taman Siswa mengenai pentingnya membatalkan ordonansi dengan seketika. Ordonansi baru itu dianggapnya sebagai sesuatu yang prinsipial, karena ordonansi itu merebut hak ibubapak atau rakyat untuk memilih cara pendidikan bagi anaknya. Selain itu ordonansi tersebut sangat menghina kedudukan pengajaran partikelir yang tidak bersubsidi, disebabkan sifatnya tidak lagi mengamat-amati, melainkan menguasai.[12] Ki Hajar menilai bahwa terjadinya undang-undang itu berarti kekalahan bagi pergerakan politik "Pagar" itu *"dadal"* (rusak) dan musuh dapat masuk ke "ladang" dengan membawa senjata yang tajam dan membunuh kita.

Bagaimana cara perlawanan itu harus diberikan? Dengan berbicara dan mengajukan protes? Tidak, cara-cara lama ini harus ditinggalkan. Menurut Ki Hajar cara dengan berbicara itu akan membawa hasil, jika yang saling berbicara itu mempunyai hak sama, ialah "hak meja bundar". Sedang berprotes dan bermosi kepada pemerintah, pada hakekatnya hanya mengajak masgul dan mengajak minta-minta. Oleh karena itu, meskipun protes dan mosi itu juga mempunyai faedah, tetapi untuk menangkis bahaya, tidak akan berhasil. Adapun cara yang harus digunakan ialah dengan kekuatan tenaga. Cara ini dapat dilakukan secara aktif dan pasif; secara aktif, jika kekuatan yang kita miliki sepadan dengan yang dilawan, sedang secara pasif adalah bagi mereka yang tidak mempunyai kekuatan lahir sepadan dengan kekuatan lawannya. Pasif di sini bukan berarti diam lahir batinnya, melainkan diam lahirnya. Kita harus kuat batinnya, kuat menderita, tidak boleh putus asa, tidak boleh marah, tidak boleh tergoda, tidak boleh takluk. Dalam batin kita harus terus merdeka, tidak mengakui kekuasaan si lawan.[13]

Diterangkan selanjutnya bahwa surat kawat Ki Hajar Dewantara kepada wali negeri di Bogor itu tidak lain dan tidak

bukan adalah suatu *uluk-uluk*, boleh dianggap suatu "peringatan", boleh juga dianggap sebagai "ultimatum" (tantangan), boleh juga dianggap sebagai pemberita "minta diri" (pamitan) dari masyarakat Hindia Belanda, yang menurut perasaannya sebagai pernyataan ksatriaan terhadap pihak lawan.[14]

Agar perlawanan tersebut lebih teratur, maka di kalangan Taman Siswa dibentuk golongan-golongan yang mencakup beberapa cabang. Golongan-golongan yang mencakup beberapa cabang. Golongan-golongan itu adalah:

1. Blambangan
2. Argapura
3. Selagilang
4. Junggringsalaka
5. Madura
6. Jenggala
7. Majapahit
8. Singasari
9. Daha
10. Purbaya
11. Melawapati
12. Jipang
13. Semarang
14. Pajang
15. Mataram
16. Kedu
17. Bagelan
18. Wijayakusuma
19. Haldakaslamet
20. Tegalarum
21. Cirebon
22. Krawang
23. Galuh
24. Pejajaran
25. Jakarta
26. Lampung
27. Sriwijaya
28. Bangkahulu
29. Minangkabau
30. Tapanuli
31. Perca Timur
32. Aceh
33. Kalimantan

Adapun yang masih berdiri sendiri, belum merupakan golongan adalah cabang-cabang di Makasar, Ternate, Badung Bali dan Ambon.[15]

Kepada ibu-ibu wanita Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara menyerukan sebagai berikut: "Srikandi-Srikandi..... majulah ke muka. Subadra-Subadra..... dirikanlah bala-

tentara "Palang Merah" dan peliharalah kawan-kawanmu yang jatuh."[16]

Selanjutnya pada 3 Oktober 1932, Ki Hajar Dewantara memberi maklumat kepada seluruh Pemimpin Pergerakan Rakyat yang isinya selain menjelaskan mengenai tindakannya dalam menghadapi O.O. agar tidak terdapat salah paham, juga berisi saran dan seruan. Sarannya adalah sebagai berikut: Jika ada sekolah ditutup atau tidak boleh berdiri karena pengaruh O.O., atau ada guru yang ditarik kembali ijin mengajarnya, di tempat itu hendaknya didirikan Komisi Penyelidik yang terdiri atas anggota-anggota Perhimpunan Pengajaran di tempat tersebut. Hasil penyelidikan supaya diumumkan di dalam pers. Kalau menurut anggapan Rakyat, memang ada kesalahan pada pihak kita, terukur dengan ukuran kebajikan umum, lalu usahakanlah kebaikannya dengan kekuatan rakyat. Sebaliknya kalau ternyata amtenar (pegawai Belanda) juru pemeriksa yang bersalah, misalnya merajalela, tuntutlah pada pemerintah untuk mendirikan sekolah gubermen di tempat itu, agar anak-anak kita tidak terlantar belajarnya. Kalau tidak diindahkan, janganlah meninggalkan kewajiban kita dengan sendiri.

Sebagai penutup pada maklumat itu diserukan agar sekalian Pemimpin Pergerakan Rakyat memberi sokongan.

> *"Berilah sokonganmu di mana kamu merasa tertarik karena mufakat dengan cara yang sesuai dengan kodrat alammu sendiri.*
> *Setidak-tidaknya berilah doa (pangestu) kepada kami semua yang akan sanggup bertenaga, untuk bekal dalam perjalanan.*
> *Janganlah kamu niat membelokkan laku kami dari aliran yang sudah kami tetapkan; ingatlah pada "bersama-sama berjalan dengan jalan sendiri-sendiri, menuju ke satu maksud."*[17]

Perlawanan Ki Hajar Dewantara bersama Taman Siswa menghadapi O.O. mendapat sambutan yang amat besar di kalangan masyarakat yang luas. Seluruh Pergerakan Rakyat baik yang bersifat politik, agama, maupun sosial secara serentak mendukung perlawanan Ki Hajar, sehingga perlawanan tersebut menjadi aksi masa.

Dokter Sukiman dalam "Utusan Hindia" menganjurkan agar aksi masa itu menggunakan perlawanan aktif, supaya cara aktif dan pasif dapat saling membantu, sehingga bahaya itu dapat ditolak dengan sempurna. Drs. Moh. Hatta, pemimpin Pendidikan Nasional Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa bahaya O.O. harus dilawan keras-keras. Pengurus Besar Budi Utomo, Pengurus Besar Muhammadiyah, Istri Sedar, Partai Indonesia di bawah Mr. Sartono, P.S.I.I., P.P.P.K.I. ditambah masyarakat Indonesia, Arab dan Cina di Pekalongan dan organisasi-organisasi lainnya, semuanya mendukung sikap Ki Hajar Dewantara dalam menghadapi O.O. Demikian pula suara pers kita, antara lain: "Pewarta Deli", "Suara Umum", "Aksi", "Suara Surabaia", "Sedyatama", "Darmokondo", "Bintang Timur", "Timbul" dan koran-koran di Sumatra.[18] Bapak Mara Sutan dan Angku Syafei, tokoh-tokoh pendidikan di Sumatra datang di Yogyakarta untuk berunding dengan Ki Hajar Dewantara mengenai hal cara-cara melawan O.O.

Akibat sikap Ki Hajar Dewantara terhadap O.O. itu maka pada tanggal 19, 20 dan 21 Oktober 1932 Kuasa Pemerintah Untuk Urusan Umum di dalam *Volksraad*, Mr. Ir. Kiewiet de Jonge datang berunding di "Pondok Dewantara". Kedatangan de Jonge itu tidak selaku wakil Pemerintah, demikian pula Ki Hajar menyatakan bahwa dirinya berbicara atas nama dirinya sendiri, tidak mewakili Persatuan Taman Siswa. Yang dibicarakan mengenai segala sesuatu mengenai Taman Siswa dan juga menyangkut O.O. Udara pembicaraan baik, tenang dan pada keduanya kelihatan sabar. Selama tiga hari itu de Jong datang

tiga kali dan masing-masing pembicaraan berlangsung cukup lama. Putusan pembicaraan ialah bahwa keduanya mengakui harus ada kompromi, tetapi buat Ki Hajar Dewantara kompromi itu harus diartikan hapusnya soal ijin mengajar dan mendirikan sekolah.[19]

Sementara itu golongan-golongan Taman Siswa berunding, dan mulai terdapatlah korban O.O., sehingga beberapa cabang Taman Siswa harus ditutup untuk sementara. Korban pertama adalah guru di cabang Cikoneng, Jawa Barat. Ketua cabang Taman Siswa itu dimajukan ke Pengadilan dan dikenakan denda f. 10,– atau 5 hari penjara. Ketua tersebut terpaksa menjalani hukuman.[20]

Polisi ikut campur urusan pengajaran, murid ditanya bermacam-macam hal; diadakan penggeldahan dalam perguruan, di rumah pamong dan juga di rumah murid-murid. Macam-macam alasan dicari untuk dapat melarang guru mengajar. Pemasangan gambar Diponegoro dijadikan alasan untuk melarang mengajar. Di daerah Lampung atas perintah kontrolur, seorang pasirah telah membuat surat edaran yang isinya supaya guru dan murid memberi hormat, apabila ada pegawai bangsa Eropa atau bumiputera datang.[21]

Masalah O.O. kemudian dibawa ke *Volksraad*. Banyak pertanyaan diajukan kepada Pemerintah, dan ketika jawaban Pemerintah tidak memuaskan, maka pada 10 Januari 1933 oleh Wiranatakusumah dan kawan-kawan dimajukan usul untuk membuat undang-undang baru. Undang-undang itu dimaksudkan untuk:

a. menarik kembali ordonansi pengajaran untuk satu tahun lamanya.
b. mengesahkan kembali ordonansi yang lama untuk satu tahun.

c. mengangkat suatu komisi untuk merencanakan perubahan yang tetap untuk dimajukan kepada Pemerintah dalam waktu satu tahun.

Usul Wiranatakusumah dengan kawan-kawan itu diterima dan juga dimufakati oleh Pemerintah. Maka usul inisiatif itu menjadi ordonansi. O.O. 1932 ditunda untuk satu tahun lamanya dan sebagai penggantinya, dihidupkan lagi ordonansi lama dari tahun 1923/1925. Ketetapan penundaan O.O. 1932 itu telah disahkan dalam *Staatsblad* 21 Pebruari 1933, no. 66.[22]

Menanggapi hal ini, Ki Hajar memberi maklumat yang menyatakan bahwa untuk satu tahun lamanya orang dihadapkan pada keadaan baru. Ini harus diterima dengan sikap baru pula, agar perjuangan bersama selalu terletak di atas keadaan yang nyata. Dengan keluarnya "Ordonansi Penundaan" itu, maka aksi luar biasa Taman Siswa dengan sendirinya menjadi tertunda.

Selanjutnya Ki Hajar menerangkan bahwa antara 20 Februari 1933 dan 20 Pebruari 1934, Pemerintah dan *Volksraad* akan merancangkan ordonansi baru untuk mengadakan peraturan yang tetap mengenai pengawasan pengajaran partikelir yang tidak bersubsidi. Dalam pembicaraan umum di dalam *Volksraad*, seolah-olah pemerintah dan *Volksraad* sudah terikat pada beberapa ketentuan yang sudah diucapkan dan tertulis, antara lain, bahwa pemerintah akan seterusnya melepaskan "stelsel preventif", sehingga "permintaan ijin" tidak lagi akan dimasukkan dalam ordonansi yang akan dibuat itu.[23]

Demikianlah secara sepintas perlawanan Ki Hajar dalam menghadapi O.O. Sementara itu, ketika hampir seluruh pers Indonesia menduukung sikap Bapak Perguruan Nasional tersebut, ada surat kabar Belanda yang menulis sebagai berikut:

> *"Sekarang terbukalah rahasiamu. Teranglah sekarang bahwa Taman Siswa berpolitik. Sebenarnya yang bernama*

"Ki Hajar Dewantara" itu tidak lain dari S. Suryaningrat yang pada 1913 dibuang ke Negeri Belanda dan pada 1919 boleh kembali, karena ia berjanji sedikit pun tidak akan bercampur dengan politik."[24]

Apa yang dikatakan oleh pers Putih itu tidaklah benar, karena Ki Hajar dibebaskan dari hukuman pengasingan tidak disertai janji apa pun oleh pemerintah.

CATATAN

1. Taman Siswa 30 Tahun : 192-193
2. Taman Siswa 30 Tahun ; 306
3. Taman Siswa 30 Tahun : 203-206
4. Taman Siswa 30 Tahun : 204
5. KHD, Pengajaran dan Pendidikan dengan dasar Kebangsaan, *De Locomotief*, 1940/1941 atau *Karya I* : 87
6. Periksa Lampiran 2
7. KHD, *Demokrasi* : 7-8
8. *Pusara*, Jan. 1935
9. *Pusara*, Nopember 1932
10. *Pusara*, Oktober 1932
11. *Pusara*, Oktober 1932
12. *Pusara*, Oktober 1932
13. *Pusara*, Oktober 1932
14. *Pusara*, Oktober 1932
15. Taman Siswa 30 Tahun : 220
16. *Pusara*, Oktober 1932
17. *Pusara*, Oktober 1932
18. *Pusara*, Oktober 1932
19. *Pusara*, Nopember 1932

20. Taman Siswa 30 Tahun : 224
21. Taman Siswa 30 Tahun : 226
22. *Pusara*, Maret 1933
23. *Pusara*, Maret 1933
24. *Pusara*, Nopember 1933

BAB IX MENGHADAPI BERBAGAI MACAM MASALAH

Sesudah kaum pergerakan politik dapat bersatu dan berjuang dengan tujuan sama, sehingga merupakan pagar yang kuat bagi pergerakan sosial, maka para pendidik mulai bekerja lagi sebagai sediakala. Ki Hajar mengumpamakan kaum pendidik itu sebagai bapak tani yang bekerja di ladang atau di sawah mengurusi benih, menanam, matun, merabuk, mencari cara-cara supaya tanamannya tumbuh dengan baik.

Sesungguhnya O.O. bukan satu-satunya rintangan yang dihadapi oleh Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa. Pada 1924, Pemerintah Kolonial membeslah segala barang yang ada di rumah Suwardi Suryaningrat, termasuk bangku-bangku sekolah. Alasan mengapa Ki Hajar tidak mau membayar pajak rumahtangga sehingga Pemerintah melakukan pembeslahan, ialah karena ia tinggal di rumah bersama dengan perguruan. Menurut taksirannya ia tidak sampai kena pajak rumahtangga karena ia hanya menempati dua kamar saja. Kamar-kamar lain dipakai oleh perguruan dan perguruan tidak dikenakan pajak tersebut.

Barang-barang yang dibeslah itu lalu dilelang. Lelangan berjalan, tetapi mereka yang membeli barang-barang itu menyerahkannya kembali kepada Suwardi Suryaningrat. Ini adalah

kedermawanan para pencinta Taman Siswa yang namanya tidak mau disebutkan. Walaupun barang-barang telah diterima kembali, sehingga esok harnya anak-anak dapat belajar kembali sebagai sediakala, Suwardi Suryaningrat juga mengajukan protes terhadap peristiwa pemungutan pajak rumahtangga tersebut. Akhirnya dengan keputusan kepala kerajaan Paku Alaman, pajak rumahtangga untuk Suwardi Suryaningrat untuk tahun 1922, 1923 dan 1924 dihapuskan. Uang yang pernah dibayarkan kepada pemerintah dikembalikan.

Pada 1935 sampai 1937, Taman Siswa dihadapkan pada masalah-masalah baru: masalah "Tunjangan Anak" dan "Pajak Upah". Untuk menyelesaikan masalah yang kedua tersebut, Ki Hajar terpaksa berunding dengan Gubernur Jendral.

Menurut Peraturan Pemerintah (1935), hak atas "Tunjangan Anak" kepada pegawai negeri diberikan, jika anaknya bersekolah di :

a. Sekolah Negeri
b. Sekolah yang mendapat subsidi
c. Sekolah-sekolah lainnya yang mendapat hak memakai salah satu nama seperti sekolah negeri, misalnya: *H.I.S., Volkschool, 2^{e} Inlandsche School,* dan sebagainya.

Taman Siswa pasti tidak dapat dimasukkan golongan a dan b. Oleh penilik sekolah, sebagian cabang-cabang Taman Siswa ada yang tidak dapat dimasukkan pada golongan c. Oleh sebab itu pegawai negeri yang mengirimkan anaknya ke sekolah Taman Siswa seperti tersebut di atas, tidak berhak mendapatkan "Tunjangan Anak". Ini akan membawa akibat sebagian orang tua murid menarik anaknya dari Taman Siswa, sehingga dengan demikian jumlah murid Taman Siswa menjadi susut. Tetapi ada juga cabang-cabang Taman Siswa yang dikelompokkan sekolah golongan c. Majelis Luhur memperjuangkan agar seluruh cabang mempunyai kedudukan yang sama: seluruhnya dapat

digolongkan kelompok c atau seluruhnya tidak dapat. Sesudah berjuang selama dua tahun, nampaklah hasilnya. Mulai 1938 berlaku peraturan, bahwa semua pegawai negeri, yang anaknya dikirimkan ke sekolah Pemerintah, bersubsidi atau partikelir, mempunyai hak atas "Tunjangan Anak".[1]

Masalah yang lain adalah mengenai pajak upah. Sebagai suatu lembaga pendidikan yang bersifat kekeluargaan, Taman Siswa tidak mengenal adanya buruh dan majikan. Untuk jasa guru atau pamong dibagikan nafkah yang diatur menurut dasar kekeluargaan pula. Oleh sebab itu para guru berpendapat bahwa mereka tidak seharusnya membayar pajak upah. Mereka membayar pajak penghasilan.

Pada pertengahan bulan Desember 1937, Taman Siswa menerima surat dari Pemerintah, yang menerangkan bahwa semua guru Taman Siswa, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1938 dikenakan pajak upah. Berhubung hak ini menyangkut masalah prinsip, maka pada tanggal 17 Desember 1937 Ki Hajar memerlukan datang beraudiensi pada Gubernur Jendral di istana Cipanas. Perundingan berlangsung lama. Hasilnya, pada 29 Desember 1937, Majelis Luhur menerima surat dari Direktur Keuangan berisi penundaan pembayaran pajak upah bagi guru-guru Taman Siswa, karena Pemerintah akan meneliti keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Taman Siswa.[2]

Dari berbagai macam kesulitan tersebut di atas, masalah O.O. 1932 merupakan bahaya terbesar. Dengan bersendikan kepada: *"Tetep-Mantep-Antep"*, *"Ngandel-Kendel-Bandel-Kandel"* dan *"Neng-Ning-Nung-Nang"*, Taman Siswa dapat mengatasi kesulitan-kesulitannya.

"Tetep" atau tetap, maksudnya untuk mencapai apa yang kita kehendaki, perlulah kita selalu tetap dalam pekerjaan kita, jangan selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Kita harus terus berjalan tertib dan maju, setia dan taat terhadap segala asas-asas kita. Lagi pula kita harus selalu *"mantep"* atau berbesar

hati, agar tidak akan ada kekuatan yang dapat menahan laku kita atau membelokkan aliran kita. Sesudah kita tetap dan mantap, dengan sendirinya perbuatan kita akan *"antep"* atau berat, dan pasti tidak mudah kita dapat ditahan, dihambat atau dilawan.

"Ngandel" atau percaya maksudnya yakin kepada penguasa Tuhan dan kekuatan diri. *"Kandel"* atau berani, yaitu menghindarkan rasa takut atau wasangka. *"Bandel"* atau tahan, tawekal, ialah hatinya kuat menderita. *"Kendel"* atau tebal yaitu meskipun menderita namun kuat badan tubuhnya. Keempat tabiat itu saling berhubungan: barang siapa dapat percaya tentu akan berani, lalu mudahlah ia tawekal dan dengan sendirinya ia akan tebal tubuhnya.

"Neng" berarti *"meneng"* yaitu tenteram lahir-batinnya. *"Ning"* dari perkataan *"wening"* dan *"bening"* berarti jernih pikirannya, mudah dapat membedakan barang yang "hak" dan yang "batal", yang "benar" dan yang "salah".

"Nung" dari perkataan *"hanung"*, berarti kuat, sentosa dalam kemauannya, yaitu kokoh dalam segala kekuatannya, lahir dan batin, untuk mencapai apa yang dikehendaki. *"Nang"* yaitu *"menang"* atau dapat "wewenang" atau berhak atas buah usahanya. Keempat tabiat ini juga saling berhubungan: barang siapa dapat *"neng"* tentu mudah ia akan dapat berpikir *"ning"*, lalu menjadi kuat atau *"nung"* kemauannya, dan dengan sendirinya ia akan *"menang"*.[3]

Di luar permasalahan tersebut di atas Ki Hajar menaruh perhatian besar terhadap "soal wanita", dan dalam "masalah kebudayaan" ia mengemukakan suatu konsep tertentu.

Hingga sekarang soal wanita tetap merupakan masalah yang banyak dibicarakan. Pergerakan wanita di negara-negara yang maju di dunia Barat berbeda dengan pergerakan wanita di dunia ketiga atau di negara-negara yang sedang berkembang.

Muncullah sekarang organisasi untuk membebaskan kaum wanita atau *Women's Liberation* di negara-negara yang maju. Organisasi yang terkenal dengan singkatan *Women's Lib* itu menuntut emansipasi yang setinggi-tingginya. Di Indonesia sekarang ini banyak wanita yang selain menjadi ibu rumah-tangga juga memegang karir tertentu di kantor, di perguruan atau di lembaga-lembaga lain. Seringkali wanita-wanita ini menghadapi suatu kesulitan untuk menentukan tugas manakah yang harus dipilihnya.

Pada 1928 Ki Hajar menulis sebuah artikel yang menjelaskan bahwa pada jaman itu wanita di dunia Barat sedang bergerak dan berusaha mendapatkan hak persamaan dengan kaum pria. Mereka menuntut emansipasi dalam segala hal. Kegemaran menuntut persamaan ini sudah masuk dalam tabiat dan jiwanya. Misalnya mereka menghendaki persamaan dalam hal pakaian, dalam kesenangan hidupnya, pekerjaan dan seterusnya.

Menurut pendapatnya, gambar angan-angan wanita Barat seperti tersebut di atas adalah gambar wanita yang lupa akan kodratnya. Mereka lupa bahwa tubuh wanita itu berbeda sekali dari tubuh laki-laki. Adapun perbedaan ini disebabkan karena berhubungan dengan kodrat perempuan, yang ditakdirkan akan menjadi ibu, mengandung anak, melahirkan, memelihara dan mendidik anak. Wanita mempunyai kewajiban-kewajiban kodrati berbeda dengan pria. Dengan adanya kewajiban-kewajiban pada wanita yang tidak dapat diungkiri itu, maka persamaan hak antara wanita dan pria belumlah mengandung arti bahwa wanita boleh menjalankan tingkah laku pria.

Wanita ditakdirkan akan menjadi ibu, akan memelihara dan mendidik anak. Sebab itu wanita yang kasar tabiatnya tidak laras dengan hidupnya sebagai ibu. Wanita yang tidak suka berdekatan dengan anak-anak, dapat dikatakan memungkiri kodratnya. Selanjutnya Ki Hajar berpesan agar kaum wanita Indonesia

jangan tergesa-gesa meniru cara modern, cara Eropa; akan tetapi juga jangan terikat oleh konservatisme atau rasa sempit, melainkan harus menyesuaikan segala-galanya dengan keadaan kodratnya.

Adapun persamaan pria dan wanita yang hak dan harus berlaku, yaitu *persamaan hak*, *persamaan derajat* dan *persamaan harga*, bukan persamaan sifat hidup atau penghidupannya.[4]

Wanita dapat memberi pengaruh pada suasana sekelilingnya dalam hal kesucian dan kehalusan, juga dalam rasa kebatinan dan rasa kemanusiaannya. Sebagai contoh dikemukakan hal ko-edukasi dalam Taman Siswa. Anak-anak perempuan belajar bersama anak pria dalam satu kelas. Ko-edukasi ini dipandang penting, karena kehadiran anak-anak perempuan dalam ruangan itu akan banyak membawa pengaruh. Pengaruh ini meliputi hal kesucian, kehalusan dan dalamnya rasa batin. Demikianlah, maka jika dalam kelas terdapat anak-anak puteri, maka anak-anak pria takut akan berbuat kasar. Dalam mengucapkan kata-kata pun mereka sangat hati-hati, berusaha berkata halus dan sopan.[5]

Ki Hajar pernah menyerukan kepada wanita Indonesia sebagai berikut:

> *"Ketahuilah bahwa kamu sekalian berkuasa mendidik keutamaan, karena besarlah pengaruhmu pada barang dan tempat kelilingmu dalam hal kesucian, kehalusan dan dalamnya batin. Ingatlah, bahwa kamu berhak turut campur dalam semua perkara. Hukum adat kita memberi hak dan kelonggaran padamu lebih daripada hak-hak orang perempuan Eropa. Usahakanlah kekuatanmu. Guna kemuliaan rakyatmu dan keselamatan dunia."*[6]

Ki Hajar berpendapat bahwa yang paling tepat untuk memimpin anak-anak kecil adalah guru wanita, karena hal ini sangat sesuai dengan kodratnya. Anak-anak kecil lebih tertarik

kepada guru wanita daripada guru laki-laki, karena mereka itu masih sangat membutuhkan hubungan batin dengan ibunya. Untuk memenuhi kemauan dan keinginan anak-anak, untuk melayani nafsu anak-anak, untuk memelihara tubuh anak-anak, guru wanita lebih pandai daripada guru laki-laki. Guru laki-laki, meskipun ia mengerti akan kewajibannya selaku guru dan berusaha mendekati anak-anak, namun tabiatnya sebagai orang laki-laki tidak dapat ditinggalkan. Kurangnya kesabaran, ketelitian, cinta kasih ditambah tindak laku dan angan-angannya yang lebih kasar daripada rekannya, guru wanita, menyebabkan guru laki-laki itu tidak dapat bergaul secara baik dengan anak-anak. Akibatnya anak menjadi takut dan ia terpaksa berbuat sesuatu yang sesungguhnya tidak cocok dengan batinnya. Dengan guru wanita, rasa takut itu tidak ada; kecintaanlah yang menjadi ikatan antara guru dan murid.[7]

Di dalam lingkungan Taman Siswa wanita dan pria mempunyai hak yang sama. Taman Siswa, suatu organisasi yang bersifat kekeluargaan menganggap perlu hadirnya golongan wanita untuk bersama-sama membawa maju Taman Siswa. Maka badan Wanita Taman Siswa, yang beranggotakan pamong-pamong puteri dan istri-istri pamong berkewajiban membantu Taman Siswa dalam segala usahanya. Dua tugasnya yang paling penting ialah menjaga kesucian dan memelihara hubungan kekeluargaan dalam lingkungan Taman Siswa serta membantu dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak-anak gadis kita.[8]

Dalam usaha mendidik anak-anak, pamong harus berusaha mencerminkan dasar-dasar Taman Siswa yang termaktub dalam Pancadharma: Kodrat alam, Kemerdekaan, Kebudayaan, Kebangsaan dan Kemanusiaan. Kemerdekaan adalah salah satu pokok dari Pancadharma. Untuk melaksanakan dharma tersebut – dalam hal ini "kemerdekaan" atau "kebebasan", orang harus menjunjung tinggi kesusilaan. Ki Hajar menerangkan bahwa "Kebebasan" itu sebenarnya bersifat "sekunder", yakni akibat

dari "kemerdekaan". Sedang arti perkataan "merdeka" adalah *sanggup* dan *mampu* untuk *berdiri sendiri,* untuk mewujudkan hidup diri sendiri, hidup tertib dan damai, dengan kekuasaan atas diri sendiri. Ini merupakan sifat *"primer".* Merdeka tidak hanya berarti bebas, tetapi harus pula diartikan sebagai *kesanggupan* dan *kemampuan,* yaitu kekuatan dan kekuasaan untuk *memerintah diri pribadi.*[9]

Khusus untuk pendidikan kesusilaan anak-anak puteri, Ki Hajar mewariskan syair, berbahasa Jawa, berbentuk tembang Asmaradana.[10] Nasihat ini diberi bentuk syair, agar supaya isinya mudah diingat-ingat oleh anak-anak gadis kita. Adapun inti nasihat itu ialah bahwa dalam kita bertindak berdasarkan jiwa kemerdekaan harus ingat akan kesusilaan, karena kesusilaan itu merupakan pagar atau benteng bagi keselamatan diri kita. Kesusilaan merupakan benteng, tidak hanya terhadap musuh dari luar, tetapi juga musuh di dalam selimut sendiri yang berujud nafsu diri yang tumbuh karena angkara murka.

Nyi Hajar Dewantara adalah pemuka Wanita Taman Siswa. Pada 1928 Nyi Hajar bersama dengan wanita lainnya, baik dari lingkungan Wanita Taman Siswa maupun pemimpin-pemimpin organisasi lainnya seperti R.A. Sukonto, R.A. Suyatin (sekarang Ny. Kartowiyono) mengajak perkumpulan-perkumpulan wanita lainnya di Yogyakarta untuk mengambil inisiatif mengadakan Kongres Perempuan Indonesia.[11] Kongres itu kemudian dilangsungkan di Yogyakarta pada 22–25 Desember 1928. Kongres ini adalah Kongres Perempuan I.

Pada tanggal 22 Desember 1953, diadakan peringatan "Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia". Untuk menyambut peristiwa bersejarah dalam dunia wanita Indonesia itu, Ki Hajar menerbitkan buku kecil dengan judul: "Soal Wanita". Isi buku itu mengenai arti, kedudukan dan tugas wanita. Diterangkan bahwa wanita dianggap sebagai lambang keabadian hidup manusia. Sebagai pemangku keturunan,

wanita itu berkedudukan sebagai "Ibu". Ia dapat mempunyai tugas macam-macam: sebagai "ratu keluarga", sebagai juru rawat, guru, pemimpin organisasi sosial, guru dan karir-karir lain di luar rumahtangga. Isi risalah tersebut adalah uraian-uraian yang pernah diceramahkan di depan murid-murid puteri Taman Guru Taman Siswa Mataram Yogyakarta. Maksudnya agar isi ceramah itu dapat dijadikan bekal yang kelak akan berguna bagi siswa-siswa tersebut, apabila mereka memasuki masyarakat yang luas.

Mengenai masalah kebudayaan, Ki Hajar mengemukakan suatu pendapat tertentu. Diterangkannya bahwa kebudayaan itu adalah buah budi manusia yang beradab. Kebudayaan juga merupakan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi kita. Adapun dua kekuatan itu adalah: kodrat alam dan jaman/masyarakat tiap-tiap bangsa. Karena dua kekuatan itu menyebabkan selalu nampak warna yang khusus pada kebudayaan masing-masing bangsa.[12]

Ki Hajar menjelaskan bahwa sifat kebangsaan itu berarti kemerdekaan bangsa seutuhnya, tidak hanya kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan kebudayaan. Tidak ada gunanya mengejar dan mencapai kemerdekaan politik, kalau dalam kebudayaan, kita mengekor bangsa lain.

Bolehlah kita mengambil unsur-unsur kebudayaan lain? Untuk menjawab pertanyaan ini, Ki Hajar mengemukakan bahwa dalam menerima atau mengambil kebudayaan asing, kita harus bersikap selektif atau memilih. Memilih apa yang baik dan bermanfaat bagi hidup dan penghidupan kita. Kita pilih apa saja dari kebudayaan asing itu yang dapat memajukan dan memperkaya kebudayaan bangsa kita sendiri.[13]

Agar kebudayaan itu tidak mundur dan mati, maka kita tidak boleh mengisolasi kebudayaan tersebut, tetapi harus selalu ada hubungan antara kebudayaan dengan kodrat dan masyarakat. Selanjutnya agar kebudayaan itu dapat dimajukan

dan dipercaya, maka diperlukan adanya hubungan dengan kebudayaan lain. Kemajuan kebudayaan harus berupa lanjutan langsung dari kebudayaan sendiri (kontinuitas), menuju ke arah kesatuan kebudayaan dunia (konvergen) dan tetap mempunyai sifat kepribadian dalam lingkungan kemanusiaan sedunia. Kontinuitas, konvergensi, dan konsentrisitas ini merupakan asas "Tri-kon". Ki Hajar menganjurkan agar kita lebih baik mengutamakan "asimilasi" daripada "asosiasi". Artinya kita memilih atau mengambil bahan-bahan kebudayaan dari luar tetapi kita sendiri yang memasak bahan-bahan itu hingga masakan makanan baru yang lezat rasanya bagi kita dan menyehatkan hidup kita.[14]

Benarkah Taman Siswa meng "kopi" atau meniru Shanti Niketan, perguruan nasional yang didirikan oleh pujangga Rabindranath Tagore di Bolpur, sebelah utara Kalkuta? Taman Siswa dan Shanti Niketan memang ada kesamaannya, terutama dalam hal Kemerdekaan dan Kemanusiaan. Tetapi Taman Siswa tidak pernah meng"kopi" apa yang ada di Shanti Niketan. Sejak lahirnya pada 1922 Taman Siswa selalu mencari-cari dari dalam kebudayaan sendiri, baik dalam jaman yang sudah lewat maupun yang kini masih kita alami bersama. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran selalu diusahakan memasukkan unsur-unsur yang serba "kultur nasional", dengan tidak meninggalkan asas "Trikon".[15]

Ki Hajar menerangkan bahwa sejak ia berada di Negeri Belanda pada 1913–1919, ia telah mengenal nama Tagore. Pada waktu itu banyak orang Eropa yang sangat tertarik kepada Tagore dan Montessori yang dianggapnya sebagai pembongkar dunia pendidikan lama serta pembangun aliran baru. Bagi Ki Hajar kedua tokoh pendidikan tersebut merupakan penunjuk jalan. Kemudian pada 1927 sang pujangga Tagore datang mengunjungi Taman Siswa Yogyakarta. Sejak itu terjalin hubungan antara Taman Siswa dan Shanti Niketan. Sepuluh tahun kemu-

dian Tagore mengirimkan guru tari di perguruannya ke Yogyakarta untuk belajar tari Jawa. Guru tari ini adalah Miss Mrinalini yang diantar oleh ibunya Mrs. Swaminadan. Mereka tinggal di asrama Wisma Rini untuk beberapa bulan lamanya. Tagore sangat tertarik akan tari Jawa.[16] Beberapa pamong Taman Siswa adalah keluaran Shanti Niketan.

Ketika pujangga Tagore berkunjung ke istana, ia disuguh pertunjukan *"Langen Mandra Wanara"* (wayang orang yang berbentuk khusus) oleh patih Danurejo VII. Ceritanya diambilkan dari buku Ramayana. Tagore kagum akan tarian tersebut dan ia tercengang ketika ia mendengar bahwa yang dimainkan itu cerita Rama. Ia berkata bahwa orang Jawa dapat menciptakan drama dari bahan-bahan yang diambil dari kebudayaannya, yaitu Ramayana dan Mahabarata, dan bangsanya tidak dapat menirunya.[17]

Memang benar, di India sampai sekarang tidak ada wayang seperti yang ada di Jawa. Pada hal Ramayana dan Mahabarata berasal dari sana. Cerita Ramayana dan Mahabarata oleh orang Jawa diwujudkan sebagai tonil dengan disertai Petruk, Gareng dan Semar.

Selanjutnya Ki Hajar berpendapat perlu adanya kesatuan kebudayaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kesatuan ini harus digalang. Sebagai sumber atau bahan untuk membangun kebudayaan kebangsaan Indonesia itu dapat menggunakan segala sari-sari atau puncak-puncak kebudayaan yang terdapat di seluruh daerah Indonesia sebagai modal isinya.[18] Demikianlah konsepsi Ki Hajar Dewantara mengenai kebudayaan kebangsaan.

CATATAN

1. *Taman Siswa 30 Tahun* : 229
2. *Taman Siswa 30 Tahun* : 230
3. *Taman siswa 30 Tahun* : 308
4. KHD, Kodrat Perempuan, *Wasita*, Desember 1928 atau Karya IIa : 238
5. KHD, Pengaruh Perempuan, *Wasita* Desember 1928 atau Karya IIa : 240
6. KHD, Karya IIa : 241-242
7. KHD, *Karya IIa* : 238-239
8. Peraturan Besar Wanita Taman Siswa (1975)
9. Syair Wasita Rini (Lampiran 3)
10. Periksa Lampiran 3
11. Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia : 1
12. KHD, *Karya IIa* : 171
13. KHD, *Karya IIa* : 172
14. KHD, *Masalah Kebudayaan* : 45
15. KHD, *Karya IIa* : 206
16. KHD, *Karya IIa* : 204
17. KHD, *Karya I* : 133
18. KHD, *Masalah Kebudayaan* : 46

BAB X DI TENGAH-TENGAH KELUARGA

Keluarga batih Ki Hajar Dewantara terdiri atas Ki dan Nyi Hajar dan enam orang putera. Dua di antaranya, yang pertama seorang puteri dan yang ke dua seorang pria, lahir di Negeri Belanda, pada waktu orang tuanya sedang menjalani hukuman pengasingan. Empat orang lainnya, di antaranya terdapat seorang puteri, adalah kelahiran Indonesia.

Ki Hajar dan Nyi Hajar merupakan pasangan yang sangat harmonis. Mereka adalah keturunan bangsawan yang semula bernama R.M. Suwardi Suryaningrat dan R.A. Sutartinah, akan tetapi keduanya tidak pernah menonjolkan asal keturunannya. Nyi Hajar adalah seorang istri yang setia, menjadi pendorong dan membantu perjuangan suaminya. Mereka bersatu hati dalam suka dan duka, dalam falsafah hidupnya dan dalam tekad mengamalkan baktinya untuk kepentingan nusa dan bangsanya. Masing-masing melakukan tugas dan panggilan tersebut menurut kodratnya masing-masing. Persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan harga antara pria dan wanita dilaksanakan dalam rumahtangga Dewantara. Ini sesuai dengan ajaran Ki Hajar. Ki Hajar tidak pernah merendahkan wanita. Bahkan ia merasa dan yakin bahwa seorang yang dengan sadar dan ulet selalu mendampingi dan membantunya dalam segala tindak perjuangan

yang dilakukan adalah istrinya, Nyi Hajar Dewantara. Oleh sebab itu Ki Hajar pernah mengucapkan, "Saya tidak tahu apakah yang akan terjadi dengan saya pada akhirnya, kalau tidak ada Nyi Hajar." Ucapan ini adalah suatu penghargaan dari seorang suami kepada istrinya.

Ki Hajar termasuk tipe orang yang tidak mau membuat sulit orang lain. Air mukanya selalu cerah dan menunjukkan kesabaran dari seorang bapak. Kepada siapa saja ia bersikap tidak merendahkan, bahkan kepada pembantu rumahtangganya. Sikapnya yang ramah, sabar, tidak merendahkan dan penuh perhatian terhadap murid-muridnya atau teman-temannya, menyebabkan orang sangat senang apabila bertemu dan diajak bicara oleh Ki Hajar. Lebih-lebih para muridnya, mereka sangat asih dan membapak kepada Ki Hajar yang sangat mereka cintai. Mereka pun tidak lupa akan sikap Nyi Hajar yang halus, tenang, sabar dan penuh keibuan. Ki Hajar dan Nyi Hajar adalah bapak-ibu mereka yang amat mereka cintai.

Walaupun Ki Hajar mempunyai tugas-tugas di luar rumahtangga yang banyak, namun kepentingan pendidikan dalam keluarga tidaklah diabaikan; karena itu selalu diusahakan adanya waktu untuk berbincang-bincang dengan anggota keluarga, makan bersama dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak dapat merasakan cinta-kasih ibu-bapaknya dan ini akan sangat berfaedah bagi pendidikan kebatinan.

Ki Hajar berpendapat bahwa kesempatan bergaul dengan keluarga itu perlu diadakan, agar anak-anak kenal pada adat istiadat kebangsaannya, sehingga hidupnya tidak nampak kaku dan dangkal. Selain itu juga diharapkan agar anak-anak itu suka melakukan cara hidup yang lazim terpakai, sehingga mereka tidak hanya dapat hidup untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga tertarik pada masalah kemasyarakatan. Dengan demikian apabila mereka menjadi orang dewasa dan harus masuk ke masya-

rakat, mereka tidak kelihatan "mentah" dan "kaku" dalam sikapnya dan tingkahnya terhadap masyarakat.[1]

Untuk kepentingan tersebut di atas, maka Ki Hajar menyerukan kepada orang tua agar ada perhatian kepada keluarganya dengan menyediakan waktu tertentu. "Serahkan hari libur Ahad kepada hidup keluarga. Jangan merampas anak dari keluarganya." Sebab itu Ki Hajar menyarankan agar segala pertemuan, kepanduan dan lain-lainnya jangan diberikan pada hari Ahad.[2]

Ki Hajar dan Nyi Hajar pernah menjadi pemangku Wisma Rini, yaitu pondokan anak-anak puteri, murid-murid Taman Guru dan Taman Dewasa yang berasal dari daerah di luar Yogyakarta dan di luar Jawa. Bekas penghuni Wisma Rini ini sampai sekarang tidak dapat melupakan pengalaman mereka pengalaman yang mengasyikkan, yang lucu dan yang "tegang". Dalam segala pengalaman itu mereka selalu ingat akan bapaknya yang bijaksana, Ki Hajar Dewantara.

Pada hari-hari yang kosong atau sore hari anak-anak Wisma Rini sering bermain pada keluarga Dewantara. Suasana santai penuh rasa kekeluargaan itu menyebabkan anak-anak merasa seperti di rumah sendiri. Lebih-lebih lagi sikap Nyi Hajar yang sangat lembut dan Ki Hajar yang suka akan humor.

Seperti kita ketahui, halaman padepokan yang letaknya tidak jauh dari Wisma Rini terdapat banyak tanaman hias dan pohon-pohon besar. Di antaranya terdapat pohon jeruk bali yang sangat lebat buahnya. Buah yang besar-besar tergantung pada pohon itu ternyata sangat menarik para penghuni pondok Wisma Rini tersebut. Pada malam hari beberapa anak yang "berani" masuk ke pekarangan padepokan dengan tujuan mengambil beberapa buah jeruk itu. Pada waktu itu seperti biasa Ki Hajar sedang duduk di serambi samping bersama Nyi Hajar, berbincang-bincang tentang macam-macam hal. Anak-anak yang ada di bawah pohon jeruk itu ternyata tidak dapat melihat buah-buah itu dengan jelas karena sangat gelap. Ketika jeruk

akan dipetik, dan kemungkinan besar buah itu sudah sangat masak, maka jatuhlah buah itu dari dahannya. Tentu saja suara dari pekarangan itu terdengar oleh Ki Hajar. Lampu di atas pekarangan itu segera dinyalakan, tetapi Ki Hajar tetap berada di serambi. Baru esok harinya, anak-anak Wisma Rini ditanya mengenai kejadian di pekarangan semalam. Ki Hajar tidak marah, tetapi anak-anak yang melakukan tindakan itu sangat malu dan mereka tidak akan berbuat demikian lagi.

Contoh lain mengenai kebijaksanaan Ki Hajar sebagai seorang bapak adalah seperti terlukis di bawah ini. Suatu ketika terjadi "keributan" di asrama Wisma Rini itu. Anak-anak penghuni kamar belakang-lah yang dituduh sebagai biang keladi keributan tersebut. Adapun sebab keributan itu karena ketidak-puasan terhadap ibu asrama yang langsung mengurusi mereka. Anak-anak itu melakukan tindakan yang sifatnya reaktif, tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak perlu terjadi.

Melihat kejadian tersebut Ki Hajar sangat sedih. Kemudian ditulisnya surat, dialamatkan kepada anak-anak penghuni kamar belakang. Isinya menerangkan bahwa Ki Hajar sangat prihatin, karena terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan itu merupakan bukti bahwa ikatan antara Bapak dan anak-anaknya tidaklah erat. Esok harinya penghuni asrama itu dikumpulkan dan diberi nasihat bagaimana seharusnya anak-anak berbuat apabila mereka mengalami kesulitan.[3] Rasa kekeluargaan harus ditegakkan.

Oleh Ki Hajar Dewantara pengertian keluarga dipakai sebagai sendi persatuan. Sifat hidup keluarga ini mengandung unsur-unsur seperti:

a. cinta-mencintai sesama anggota keluarga
b. sesama hak dan sesama kewajiban
c. tidak ada nafsu menguntungkan diri dengan merugikan anggota lain
d. kesejahteraan bersama
e. sikap toleran.

Dengan menggunakan dasar kekeluargaan dan metode Among, hubungan antara murid dan guru sangat erat. Ikatan ini tidak terbatas semasa kedua belah pihak bergaul di perguruan, tetapi juga sesudah mereka meninggalkan kalangan Taman Siswa. Mereka, baik bekas murid maupun bekas guru biasanya masih mempunyai rasa setia dan cinta kasih terhadap perguruannya. Berdirinya organisasi P.B.M.T.S. (Persatuan Bekas Murid Taman Siswa) merupakan bukti adanya rasa keterikatan dan tetap taat kepada garis-garis besar dari jiwa ketamansiswaan.[4] Kelompok ini terdiri atas orang-orang yang bermacam-macam profesinya. Di antaranya terdapat kelompok yang dengan mudah memberikan bantuan/sokongan guna keperluan ketamansiswaan. Mereka itu semua termasuk Keluarga Besar Taman Siswa.

Makin bertambahnya jumlah cabang Taman Siswa, makin besar pula jumlah anggota keluarga Taman Siswa. Ki Hajar adalah Bapak Taman Siswa, bapak dari seluruh keluarga Taman Siswa. Kira-kira 10 tahun sesudah berdiri Taman Siswa berkembang pesat. Menurut catatan pada tahun 1933, jumlah cabang Taman Siswa sebanyak 121, jumlah perguruannya 180 buah, jumlah murid 12.870 anak, dan jumlah guru 542 orang.[5] Macam-macam bagian yang terdapat di perguruan tersebut ialah Taman, Indriya, Taman Anak, Taman Muda, Taman Dewasa, Taman Antara, Taman Dewasa Raya, Taman Guru, Taman Tani, Taman Kerti, Taman Masyarakat dan Taman Rakyat. Menurut catatan tahun 1935 jumlahnya bertambah, terbesar di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Madura dan Bali. Jumlah perguruan 200 buah, murid 17.000 anak dan guru 700 orang.[6]

Mengenai hubungan antar anggota perguruan adalah seperti saudara. Mereka adalah saudara seperguruan. Pamong-pamong muda bersikap membapak kepada Ki Hajar. Pada waktu dilangsungkan kongres atau konperensi atau pertemuan lainnya di Yogyakarta untuk membicarakan masalah pengajaran atau

pun organisasi persatuan, maka wakil-wakil dari seluruh cabang yang hadir selalu bertemu muka dengan bapak dan ibunya, ialah Ki dan Nyi Hajar.

Perguruan Taman Siswa didirikan pada tahun 1933; pada 1930 berdasarkan keputusan Kongres ke I, terbentuklah Persatuan Taman Siswa. Di dalam organisasi lahir terdapat pengurus besarnya yang diberi nama Majelis Luhur. Majelis ini anggotanya dipilih di dalam Kongres. Tugas dan kewajiban Majelis itu ialah menjaga Peraturan Besar sedang dalam organisasi batin, Ki Hajar Dewantara adalah Bapaknya yang wajib menjaga kemurnian Asas Taman Siswa. Apabila diperlukan, dalam keadaan yang sangat mendesak Ki Hajar sebagai Pemimpin Umum dapat melakukan "penguasa leluasa" atau diktatur. Akan tetapi sesuai dengan paham yang dianut oleh Taman Siswa, yaitu "Demokrasi dengan kepemimpinan", maka segala tindakan yang bersifat diktatur itu harus dipertanggungjawabkan pada kongres berikutnya.

Jika Ki Hajar adalah Bapak rokhani Taman Siswa dan berkedudukan sebagai Pemimpin Umum, maka "Ibu"nya Taman Siswa adalah cita-cita Taman Siswa yang termaktub dalam Asas. Sebelum terbentuk Persatuan Taman Siswa, yang menjabat ketua adalah R.M. Sutatmo Suryokusumo (1923). Ketika ketua ke I ini wafat pada 1924, yang menjabat ketua adalah R.M.H. Suryoputro tetapi pada 1927 ia wafat. Sesudah dua orang ketua tersebut wafat, kursi ketua kosong. Ki Hajar menjabat Panitera Umum.

Sesudah Persatuan Taman Siswa terbentuk dan pengurusnya dipilih pada setiap kongres, Ki Hajar berkedudukan sebagai Pemimpin Umum. Sesudah Ki Hajar wafat, Nyi Hajar terpilih sebagai Pemimpin Umum Taman Siswa dan tugas ini ditunaikan sampai akhir hayatnya. Dewasa ini (1977) terdapat Badan Pinisepuh yang diketuai oleh Ki M. Said Reksohadiprodjo yang berkedudukan sebagai Pemimpin Umum.

Di kalangan murid-muridnya Ki Hajar dikenal sebagai guru yang mengagumkan. Cara memberi pelajaran menyenangkan dan tidak membosankan. Cara menerangkannya sangat jelas karena contoh-contoh yang dipakai diambilkan dari kehidupan sehari-hari yang dikenal oleh murid. Dengan demikian isi pelajaran yang diberikan itu menjadi gamblang dan dapat meresap pada ingatan anak didiknya.[7]

Sebagai contoh kami sertakan bagaimana Ki Hajar mengajarkan tentang asimilasi kebudayaan. Diambilnya contoh yang amat populer, yaitu nasi goreng. Ki Hajar pernah minta nasi goreng dengan keju dan mentega. Salah seorang puteranya mengejek dengan berkata bahwa Ki Hajar sudah menjadi Eropean. Kemudian Ki Hajar menjawab sebagai berikut: "Aduh, begini kok makanan Eropa. Tidak ada nasi goreng di Eropa. Saya pernah tinggal enam tahun di Eropa, tetapi tidak pernah melihat orang Eropa makan nasi goreng." Puteranya mengatakan bahwa kejunya dan menteganya itu adalah makanan Eropa. Tetapi kemudian Ki Hajar melanjutkan penjelasannya, "Apabila perlu, boleh mengambil bahan-bahan dari luar, asalkan kita jadikan masakan baru, makanan baru, yang lezat rasanya dan sehat bagi badan kita."[8] Contoh nasi goreng dan wayang ini mudah diterima anak-anak untuk mengerti apakah asimilasi kebudayaan itu. Asimilasi bukan meniru belaka. Jika hanya meniru orang tidak punya apa-apa sendiri. Kalau orang mempunyai, kemudian diperbaiki miliknya itu dengan cara menambah, mengurangi atau mengubah dan mengambil bahan-bahan luar kalau terpaksa, maka ini berarti memperkaya kebudayaan sendiri.

Ki Hajar wafat pada 26 April 1959. Ia wafat dengan tenang di tempat kediamannya Padepokan Muja-muju Yogyakarta. Berhubung dengan peristiwa itu Majelis Luhur mengeluarkan pernyataan yang antara lain berbunyi:

"Dengan kepergian Ki Hajar ini, maka bukan saja masyarakat Taman Siswa kehilangan seorang Bapak dan Pemim-

pin umumnya, tetapi segenap rakyat Indonesia telah ditinggalkan salah seorang Bapak dan Pemimpinnya yang pada saat-saat yang genting selalu sangat diperlukan petunjuk-petunjuknya.
Bersama segenap rakyat Indonesia dan keluarga Taman Siswa, Majelis Luhur mengajak untuk memanjatkan doa ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga arwah Ki Hajar diterima di pangkuanNya sesuai dengan segenap amal dan jasa beliau.
Inalilahi wa ina ilaihi rojiun. Amin."[9]

Segala persiapan yang diperlukan segera diadakan. Pada malam itu Muktamar Masyumi mengirimkan Dr. Hamka, dr. Sukiman dan Ny. Sunaryo Mangunpuspito untuk menyatakan belasungkawa keluarga Masyumi. Sementara itu perseorangan, rombongan yang ingin menyatakan belasungkawa terus mengalir di Muja-muju.

Nyi Hajar kelihatan tabah dan dengan ikhlas diantarnya arwah Ki Hajar untuk mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan Yang Mahaesa. Dari Dewan Menteri Nyi Hajar menerima telegram yang berbunyi sebagai berikut:

"Keluarga Alm. K.H. Dewantara Yogyakarta.
Atas nama Pemerintah saya menyatakan turut berduka cita berhubung wafatnya alm. K.H. Dewantara.
Untuk menghargai jasa Ki Hajar Dewantara sebagai Perintis Kemerdekaan dan terhadap nusa dan bangsa Indonesia Pemerintah memutuskan diadakan pemakaman kenegaraan dan upacara militer di Yogya Rabu tanggal 29 bulan ini. Menteri P.P. dan K mewakili Pemerintah pada upacara tersebut.

Sekretaris Dewan Menteri."[10]

Pada hari Rabu 29 April 1959, jenazah dipindahkan ke Pendapa Taman Siswa di Jl. Taman Siswa. Sampai di pendapa jenazah almarhum diserahkan oleh wakil-wakil cabang kepada Majelis Luhur Taman Siswa. Di sekitar pendapa bergantungan beratur-ratus karangan bunga anggrek, demikian pula di lantai pendapa. Para tamu terus mengalir, sehingga pekarangan Pendapa penuh manusia.

Pada upacara pemakaman di pendapa, Menteri P.P. dan K mengucapkan pidato belasungkawa atas nama Pemerintah Pusat. Isi pidatonya antara lain sebagai berikut:

> "... *Pemerintah merasa kehilangan seorang mahaputera yang perasaannya, pikirannya, perkataannya dan perbuatannya selalu merupakan keselarasan dan tak pernah bertentangan satu sama lain. Seluruh perbuatannya yang tak pernah mendustai pelajaran-pelajarannya itulah yang menyebabkan Ki Hajar menjadi pemimpin dan pendidik yang sukar dicari taranya.*"[11]

Selanjutnya menteri meneruskan :

> "... *Jika Presiden kita Bung Karno mengatakan bahwa Revolusi Kemerdekaan kita itu adalah Revolusi mencari Kepribadian kita sendiri, maka sudah lamalah Ki Hajar mulai mencari Kepribadian Indonesia itu. Kepribadian yang mengandung arti harga diri atau harkat kemanusiaan itulah yang menyebabkan Ki Hajar tidak pernah mengacungkan tangannya untuk minta bantuan atau subsidi dari pemerintah kolonial untuk perguruan nasionalnya.*
>
> ... *Ki Hajar telah wafat, tetapi namanya, jiwanya dan semangatnya akan tetap hidup di tengah-tengah kita* ..[12]

Dari pendapa jenazah diberangkatkan ke Pemakaman "Wijayabrata". Puluhan ribu manusia, tua muda, pria wanita, memberikan penghormatan terakhir. Upacara di pemakaman dipimpin oleh Panglima Teritorium IV Kolonel Suharto.[13]

Demikianlah sedikit lukisan mengenai pemakaman almarhum Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pejuang nasional angkatan 1908 yang sangat besar jasanya dan selalu berusaha menuju ke arah persatuan bangsa Indonesia.

Ketika Ki Hajar wafat, keinginan almarhum agar Taman Siswa mempunyai perguruan tingkat tinggi belumlah dapat dilaksanakan. Dengan adanya perguruan tinggi itu maka cita-cita Ki Hajar dapat dikembangkan secara ilmiah.

Menurut keterangan Ki Sarino Mangunpranoto, pada 1952 setelah ada dorongan dari sekelompok anggota keluarga Taman Siswa, anggota D.P.R., timbullah ide untuk menyelenggarakan Taman Sarjana. Kemudian dibentuk satu yayasan yang oleh Ki Hajar diberi nama *Yayasan Sarjana Wiyata* yang diharapkan dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi. Dalam waktu yang cukup lama usaha tersebut belum ada tindak lanjutnya. Kemudian Kongres ke-9 pada tahun 1960 menyambut baik adanya usaha pendirian pendidikan tinggi tersebut. Persiapan lebih jauh diadakan. Sangat menggembirakan karena sebagai pendiri pertama tercatat Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan Nyi Hajar Dewantara.[14] Pada tahun kuliah 1960/1961 dibukalah "Sarjana Wiyata" dan tetap berlangsung hingga saat ini.

Sebenarnya telah lama Ki Hajar mencita-citakan Pendidikan Tinggi di Taman Siswa. Ketika Ki Hajar menghadiri pembukaan bagian Taman Dewasa Raya di Jakarta pada tahun 1933, dalam pidato sambutannya ia mengharapkan agar Taman Dewasa Raya menjadi pintu gerbang masyarakat baru. Dari Taman Dewasa Raya, para siswa akan dapat terus ke Taman Ilmu, ialah sekolah tinggi nasional. Melalui Taman Ilmu inilah para mahasiswa mendapatkan bekal untuk membangun masyarakat baru dan dengan demikian Indonesia Raya, Indonesia Mulia dan Indonesia Merdeka segera dapat tercapai.[15]

Perlu diketahui bahwa pada jaman Pendudukan Jepang (1942–1945). Ki Hajar Dewantara duduk sebagai anggota

Empat Serangkai. Kemudian menjelang keruntuhan Jepang, duduk sebagai anggota Badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang disingkat menjadi Badan Penyelidik.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Ki Hajar duduk dalam kabinet pertama sebagai menteri pengajaran. Kemudian menjadi anggota K.N.I.P. (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan sebagai kegiatan lainnya dalam pemerintahan dan perjuangan mempertahankan kedaulatan.

Pada 1948, Ki Hajar Dewantara dipilih sebagai Ketua Peringatan Empatpuluh tahun Kebangkitan Nasional. Pada kesempatan itu ia bersama-sama partai-partai mencetuskan *statement* atau pernyataan dalam menghadapi Belanda. Selanjutnya pernah menjabat ketua Kesatuan Pertahanan Rakyat untuk mengatur pertahanan rakyat secara total (Agustus). Kemudian menjadi ketua Peringatan 20 Tahun Ikrar Pemuda (28 Oktober). Setelah pengakuan Kedaulatan di Negeri Belanda (Desember 1949), Ki Hajar duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) R.I.S. dan D.P.R. – R.I. Pada akhir bulan Maret 1950 Ki Hajar mengundurkan diri, dari D.P.R. dan selanjutnya mengabdikan diri sepenuhnya kepada Taman Siswa.[16]

CATATAN

1. KHD, Pendidikan Keluarga, Maj. *Keluarga*, Oktober 1937 atau Karya I : 385
2. KHD, *Karya I* : 383
3. Keterangan Ibu Imam Sudiyat, anggota Badan Pusat Wanita Taman Siswa
4. KHD, *Karya I* : 392
5. Organisasi T. Siswa, *Pusara*, Januari 1935
6. Organisasi T. Siswa, *Pusara* Januari 1935
7. Keterangan Ki Iman Sudiyat S.H., dosen Fak. Hukum UGM
8. KHD, *Karya I* : 363
9. Harun Al Rasyid, Laporan Pemakaman, *Pusara* April 1959
10. Harun Al Rasyid, Laporan, *Pusara* April 1959
11. Harun Al Rasyid, Laporan, *Pusara* April 1959
12. Harun Al Rasyid, Laporan, *Pusara* April 1959
13. Kol. Suharto, Sekarang Presiden R.I.
14. Sarino Mangunpranoto, Pidato dalam mengenang pahlawan KHD
15. Pembukaan T.D. Raya di Jakarta, *Pusara* Agustus 1933.

BAB XI KESIMPULAN

Tepatlah kiranya jika jiwa Ki Hajar Dewantara diumpamakan seperti berlian yang indah dengan banyak fasetnya. Pendapat ini diucapkan oleh Prof. Dr. M. Sarjito, Presiden Universitas Gajah Mada dalam pidato pada pemberian gelar *doctor honoris causa* oleh Universitas Gajah Mada kepada Ki Hajar Dewantara pada hari *Dies Natalis* yang ke-7, tanggal 19 Desember 1956 di Yogyakarta.

Perjuangannya dalam bidang Politik yang radikal dan revolusioner untuk mencapai Indonesia Merdeka, mengakibatkan ia harus berurusan dengan polisi, pengadilan, penjara dan tempat pengasingan. Tetapi ini semua tidak membuat Ki Hajar putus harapan dan lemah semangatnya. Pribadi Ki Hajar sangat kuat. Jalan lain dicarinya untuk dapat sampai pada cita-citanya semula.

Sesudah menjadi perintis kemerdekaan melalui bidang politik, akhirnya ia berganti siasat. Ia merintis pendidikan nasional agar bangsa Indonesia yang akan datang memiliki kepribadian nasional dan sanggup membangun masyarakat baru yang bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. Sejak itu namanya tidak dapat dipisahkan dari Perguruan Taman Siswa. Ki Hajar adalah Bapak Taman Siswa.

Seorang Bapak yang ramah, lemah-lembut, tetapi menurut Mr. Ali Sastroamijoyo, di bawah kelemah-lembutan itu tersimpullah keyakinan yang kuat dan iman yang teguh laksana batu granit yang tak dapat dipecahkan. Demikianlah kesan Mr. Ali ketika menjumpai Ki Hajar pada sekitar tahun 1930-an.

Taman Siswa melaksanakan sistem pendidikan nasional berdasarkan asas nasionalisme kultural :

among atau "Tut wuri andayani"
hak menentukan nasib sendiri
demokrasi
membiayai diri sendiri
kekeluargaan dan
tri – kon.

Taman Siswa tidak hanya menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, akan tetapi juga merupakan suatu aliran atau gerakan kebudayaan yang menginginkan suatu susunan masyarakat tertentu. Ki Hajar adalah seorang budayawan. Sistem pendidikan yang tersebut di atas dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai kebudayaan nasional.

Ki Hajar telah mempersembahkan jiwa raganya untuk kepentingan nusa dan bangsa Indonesia. Atas segala jasanya itu Ki Hajar mendapat penghargaan dari Pemerintah dan Masyarakat. Dari Pemerintah Republik Indonesia, Ki Hajar mendapat penghormatan dan penghargaan sebagai berikut:

1. Ditetapkan sebagai Perintis Kemerdekaan (8 Maret 1955);
2. Mendapat gelar *doctor honoris causa* dalam Ilmu Kebudayaan dari Universitas Gajah Mada atas pertimbangan karena amal jasanya yang sangat besar terhadap nusa dan bangsa Indonesia dalam lapangan kebudayaan; (19 Desember 1955);
3. Pada waktu wafatnya diangkat sebagai "Perwira Tinggi" secara anumerta dengan pemakaman negara secara militer (26 April 1959);

4. Diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai "Pahlawan Nasional" (28 Nopember 1959);
5. Oleh Pemerintah R.I. hari lahirnya 2 Mei ditetapkan sebagai "Uari Pendidikan Nasional" (16 Desember 1959);
6. Oleh Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang R.I. dianugerahi "Bintang Mahaputera" tingkat I atas jasanya yang luar biasa pada nusa dan bangsa (17 Agustus 1960);
7. Dianugerahi bintang Satya Lencana Kemerdekaan (20 Mei 1961);
8. Oleh Presiden Republik Indonesia dianugerahi gedung pahlawan, bersama-sama dengan pemberian kepada Dr. Ratulangi dan Samanhudi dan sembilan orang pahlawan nasional lainnya (27 Nopember 1961).

Selain itu oleh "Persatuan Wartawan Indonesia" (P.W.I.) – dua hari sesudah wafatnya – Ki Hajar diangkat secara anumerta sebagai Ketua Kehormatan P.W.I. atas jasanya di kalangan jurnalistik (28 April 1959).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

1. Achmad Djajadiningrat: *Herinneringen*, C. Kollf en Co, Amsterdam, Batavia, 1936.
2. Berkelbach van der Sprenkel J.W. en Brandt: *De Pelgrimstocht de Menschheid*, W. de Haan N.V. Utrecht, 1952.
3. Boxer C.R.: *Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600–1800*, A.W. Sijthoff/Leiden, 1970
4. Brinton Chr. and Wolff: *A History of Civilization, Vol. II, Prentice Hall-Inc.*, 1965.
5. Brugmans I.J.: *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederland Indie*, Groningen, Jakarta, 1957.
6. Burger D.H. – Prajudi: *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jl. I, J.B. Wolters – Jakarta, 1957.
7. Kartini: *Habis Gelap Terbitlah Terang*, terjemahan Armijn Pane, cet. ke 3, Balai Pustaka, Jakarta, 1951.
8. K.H. Dewantara: *Kenang-kenangan, Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan*, Penerbit Endang, Jakarta 1952.
9. K.H. Dewantara: *Masalah Kebudayaan*, Kenang-kenangan promosi doctor honoris causa, M.L. Persatuan T.S., 1957.

10. K.H. Dewantara: *Demokrasi dan Leiderschap*, M.L. Persatuan T.S. cet. ke 2, 1959.
11. K.H. Dewantara: *Karya I* (Pendidikan), M.L. Persatuan T.S., Yogyakarta, 1962.
12. K.H. Dewantara: *Karya IIa* (Kebudayaan), M.L. Persatuan T.S., Yogyakarta, 1967.
13. Koch, D.M.G.: *Menuju Kemerdekaan* (terjemahan Abdul Muis), Yayasan Pembangunan Jakarta, 1951.
14. Kossman E.H.: *De Lage Landen 1780–1940*, Amsterdam/ Brussel, 1976.
15. Kowani: *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*, 22 Desember 1928 – 22 Desember 1958.
16. M.L. Taman Siswa: *Mengenangkan Jasa Pahlawan Ki Hajar Dewantara*, Kepaniteraan M. Luhur T.S. Yogyakarta, 1960.
17. Mangunsarkoro: Het Nationalisme in de Taman Siswa Beweging, dalam *Koloniale Studien* no. 2, 1937.
18. Muchammad Tauchid: *Perjuangan dan Ajaran Hidup Ki Hajar Dewantara*, M.L. T. Siswa, Yogyakarta, 1963.
19. Muchamad Tauchid: *Pahlawan dan Pelopor Pendidikan*, M.L. Taman Siswa Yogyakarta, 1968.
20. Niel R. van: *The Emergence of the Modern Elite*, Van Hoeve – S. Gravenhage, 1960.
21. Panitia Buku Peringatan: *Taman Siswa 30 Tahun*, 1922–1952.
22. Peraturan Besar Wanita Taman Siswa (1975).
23. Pranata Ssp.: *Ki Hajar Dewantara, Perintis Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1959.
24. Pringgodigdo A.K. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakyat N.V., Jakarta, 1950.
25. Romein J.M.: *Aera ¼ropa*, Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan dari Pola Umum (terjemahan Nur Tugi-

man), Ganaco N.V., Bandung – Jakarta – Amsterdam, 1956.
26. Sagimun: *Ki Hajar Dewantara*, Bhratara, Jakarta, 1974.
27. Sayoga: *Riwayat Perjuangan Taman Siswa 30 Tahun* (1922–1952), M.L. Taman Siswa Yogyakarta, 1952.
28. Sartono Kartodirdjo: *Lembaga Sejarah I*, Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia abad 19–20, Seksi Penelitian Jur. Sejarah Fak. Sastra dan Kebudayaan UGM, Yogyakarta, 1967.
29. Sartono Kartodirdjo: *Lembaran Sejarah II*, 1968.
30. Sitisumandari Soeroto: *Kartini, sebuah biografi*, Gunung Agung, Jakarta, 1977.
31. Soebekti: *Ki Hajar Dewantara*, Usaha Penerbitan "Suharir", 1952.
32. Tuma E.H.: *European Economic History*, Harper & Row, Publishers, New York, Evanston, San Francisco, London, 1971.
33. Vlekke B.H.M.: *Geshiedenis van de Indische Archipel*, J.J. Romen & Zonen – Uitgevers Roermond – Maaseik, 1947.
34. Wal S.L. Van der: *Het Onderwijsbeleid in Nederlandsch-Indie* 1900–1940 (een bronnenpublikatie), J.B. Wolters Groningen, 1963.
35. Wertheim W.F.: *Indonesian Society in Transition*, 2nd edition, Sumur Bandung, 1956.

B. MAJALAH

1. Poensen, Amangku Buwana II, *Bijdragen Tot de Taal-land-en Volkenkunde Van Nederlandsch Indie*, 1905.
2. Hazil, De Taman Siswa en de Revolutie, *Indonesie*, Mei 1950.
3. *Pusara* Oktober 1932
   Nopember 1932

Maret 1933
Agustus 1933
Januari 1935
Agustus 1935
Agustus 1950
Juni/Juli/Agustus 1954
Juli 1958
April 1959
Juli, Agustus 1965

4. *Wasita*, Desember 1928

C. SURAT KABAR

1. *Buana Minggu*, 15 Pebruari 1976
2. *Kedaulatan Rakyat*, 20 Mei 1953
3. *Waspada* (Medan) 12 Oktober 1949

Lampiran 1

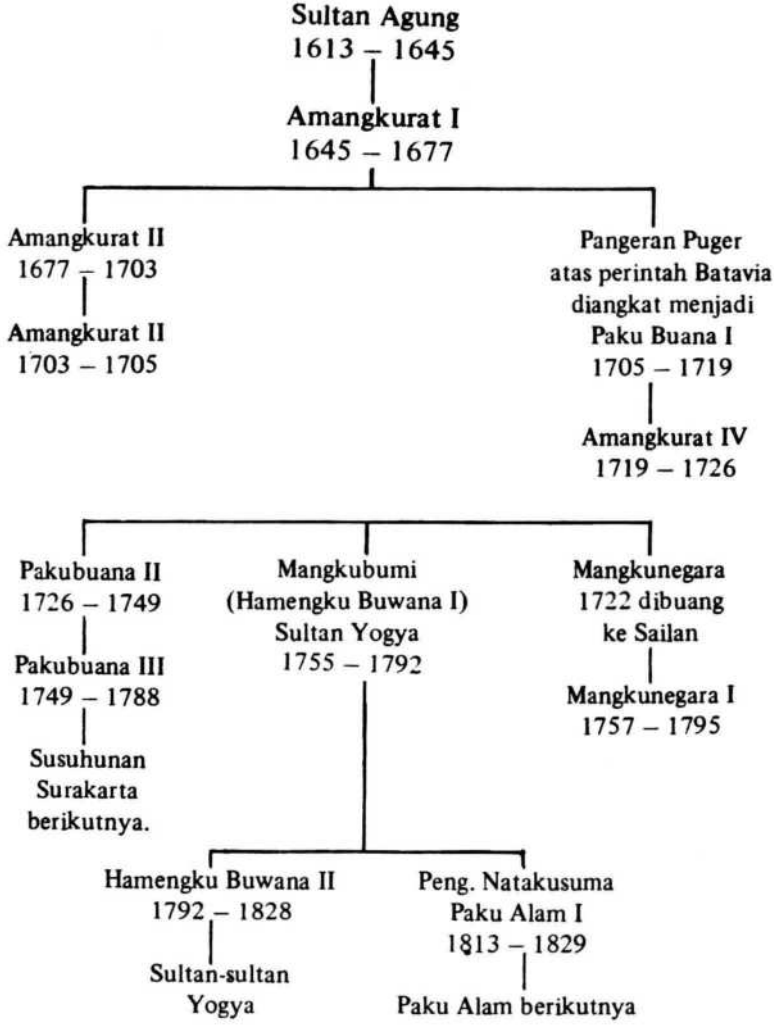

Sumber :

P.H.M. Vlekke, *Geschiedenis van den Indische Archipel,* J.J. Romen & Zonen – Uitgevers, 1947

Lampiran 2

PERJANJIAN PENDIRIAN

Bahwa ini adalah *Surat Perjanjian* atas berdirinya *Persatuan Taman Siswa Indonesia*, yang ditandatangani oleh kami *Ki Hajar Dewantara*, atas nama pihak orang-orang yang pada hari bulan 3 Juli 1922 telah mewujudkan usaha Pendidikan yang beralaskan *Hidup* dan Penghidupan Bangsa dengan nama *"Taman Siswa"* dan bersyarat *Asas* seperti termaktub di bawah;

a. Setelah kami mendengar dan melihat dengan nyata besarnya perhatian dari beberapa golongan rakyat kita bangsa Indonesia, yang beserta keluhuran budi dan keteguhan telah mendirikan perguruan-perguruan Taman Siswa sebagai cabang-cabang Perguruan Taman Siswa di Mataram, yang kami pangku selama satu windu itu;

b. Setelah kami mendengar dan melihat beberapa kesukaran tentang berdirinya, bekerjanya dan kedudukannya cabang-cabang itu dalam mensuarakan kita bangsa Indonesia, kesukaran-kesukaran mana berasal dari kurang pahamnya pendiri-pendiri Taman Siswa itu tentang asas dan maksudnya Perguruan kita Taman Siswa, sehingga seringkali menimbulkan kejadian-kejadian lahir maupun batin, yang tidak laras dengan hakekatnya Taman Siswa;

c. Setelah kami bermufakat dengan pemimpin-pemimpin Taman Siswa, yang sekaliannya berkeyakinan, bahwa tertib dan damainya masing-masing Taman Siswa hanya akan terdapat, jikalau sudah ada *Badan Taman Siswa* yang teratur tetap dengan peraturan yang pasti, sedangkan tertib damainya Taman Siswa seluruhnya itu dianggapnya amat penting untuk kemajuan rakyat kita bangsa Indonesia, yang pada waktu ini sedang menyusun segala kekuatan untuk menyusun *masyarakat yang Merdeka;*

d. Setelah kami memikir-mikirkan, merasa-rasakan, berkeyakinan, bahwa sesungguhnya perlu Cabang-cabang Taman Siswa di seluruh Indonesia itu bergabung menjadi satu *Persatuan* dengan diatur dengan peraturan yang tetap;

e. Setelah kami mengerti sifat kemerdekaan dari *Rokh Taman Siswa* yang sebenarnya hanya terikat oleh *Hukum Kodrat Alam* hingga dalam segala-galanya, lahir maupun batin, hanya boleh ditaklukkan pada *Penguasa Kodrat Alam;*

menetapkan :

dengan ridla hati menyerahkan segala Penguasa dan Hak-hak yang menurut hukum, adat atau anggapan yang sehat dianggap ada pada kami, berhubung dengan kedudukan kami dalam kalangan Taman Siswa se umumnya, kepada sekalian anggota dari *Persatuan Taman Siswa* yang akan diadakan :

dengan perjanjian :

bahwa *Asas Taman Siswa* yang termaktub di bawah ini, tetap hidup sebagai pokok yang tidak boleh berubah, tidak boleh disangkal dan tidak boleh dikurangi oleh sesuatu *Peraturan* atau *Adat* dalam kalangan Taman Siswa *selama nama Taman Siswa hidup terpakai.*

Mufakat
Tertanda ;
1. Cokrodirjo
2. Pronowidigdo

Mataram, 7 Agustus 1930

Tertanda :

Ki Hajar Dewantara

Asas Taman Siswa

1. Hak seseorang akan *mengatur dirinya sendiri (Zelfbeschikkingsrecht)* dengan mengingati *tertibnya persatuan* dalam perikehidupan umum itulah asas kita yang pertama.

   Tertib dan Damai itulah tujuap kita yang setinggi-tingginya. Tidak adalah ketertiban terdapat, kalau tak bersandar pad perdamaian. Sebaliknya tak akan ada orang hidup damai, jika ia dirintangi dalam segala syarat kehidupannya.

   Bertumbuh menurut kodrat itulah perlu sekali untuk segala kemajuan (evolusi) dan harus dimerdekakan seluas-luasnya. Maka dari itu pendidikan yang beralaskan syarat "paksaan-hukum-ketertiban" itulah kita anggap memperkosa hidup kebatinan anak. Yang kita pakai sebagai alat pendidikan yaitu *pemeliharaan* dengan sebesar perhatian untuk mendapat *tumbuhnya* hidup anak, *lahir dan batin* menurut kodratnya sendiri. Inilah yang kita namakan *"Among-methode"*.

2. Dalam sistem ini maka pelajaran berarti mendidik anak akan menjadi manusia yang *merdeka batinnya, merdeka pikirannya* dan *merdeka tenaganya*. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, akan tetapi harus juga mendidik si murid *mencari sendiri* pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu yaitu yang manfaat untuk keperluan *lahir dan batin* dalam hidup bersama.

3. Tentang jaman yang akan datang, maka rakyat kita ada di dalam kebingungan. Seringkali kita tertipu oleh keadaan, yang kita pandang perlu dan laras untuk hidup kita, padahal itu adalah keperluan bangsa asing, yang sukar didapatnya dengan adat penghidupan kita sendiri. Demikianlah kita acapkali merusak sendiri kedamaian hidup kita. Lagi

pula kita sering juga mementingkan pengajaran yang hanya menuju *terlepasnya pikiran* (intelektualisme), pada hal pengajaran itu membawa kita kepada gelombang penghidupan yang tidak merdeka dan memisahkan orang-orang yang terpelajar dengan rakyatnya. Di dalam jaman kebingungan ini seharusnyalah *keadaan kita sendiri* (cultuur historie) kita pakai sebagai penunjuk jalan, untuk mencari penghidupan baru, yang selaras dengan kodrat kita dan akan memberi kedamaian dalam hidup kita. Dengan keadaban bangsa kita sendiri kita lalu pantas berhubungan bersama-sama dengan keadaban bangsa lain.

4. Oleh karena pengajaran yang hanya terdapat oleh sebagian kecil dari rakyat kita itu tidak berfaedah untuk bangsa, maka haruslah golongan rakyat yang terbesar dapat pengajaran secukupnya. Kekuatan bangsa dan negara itu jumlahnya kekuatan orang-orangnya. Maka dari itu lebih baik *memajukan* pengajaran untuk *rakyat umum* daripada *meninggikan* pengajaran, kalau usaha meninggikan ini seolah-olah mengurangi tersebarnya pengajaran.

5. Untuk dapat berusaha menurut asas yang merdeka dan leluasa, maka kita harus bekerja menurut kekuatan sendiri. Walaupun kita tidak menolak bantuan dari orang lain, akan tetapi kalau bantuan akan *mengurangi kemerdekaan kita lahir dan batin* haruslah ditolak. Itulah jalannya orang yang tidak mau terikat atau terperintah pada kekuasaan, karena berkehendak mengusahakan kekuatan diri sendiri.

6. Oleh karena itu kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, maka haruslah segera belanja dari usaha kita itu dipikul sendiri dengan uang pendapatan biasa. Itulah yang kita namakan *"Zelfbedruipingssysteem"* yang jadi alatnya semua perusahaan yang hendak hidup tetap dengan berdiri sendiri.

7. Dengan tidak terikat lahir dan batin, serta dengan suci hati, berniatlah kita berdekatan dengan Sang Anak. Kita *tidak meminta sesuatu hak*, akan tetapi *menyerahkan diri* akan *berhamba kepada Sang Anak*.

KETERANGAN PENERIMAAN

Kami, sekalian anggota *Majelis Luhur Taman Siswa*, atas nama *Persatuan Taman Siswa Indonesia;*
bersidang pada hari bulan 13 Agustus 1930 di Mataram;

a. setelah membaca *"Perjanjian Pendirian"* dari Ki Hajar Dewantara berhubung dengan berdirinya *"Persatuan Taman Siswa";*

b. setelah mendengarkan keterangan-keterangan dari Ki Cokrodirjo dan Ki Pronowidigdo, keduanya *pengetua-pengetua* dan *pendiri-pendiri* dari Taman Siswa, yang dilahirkan pada hari bulan 3 Juli 1922 di Mataram;

c. setelah mendengar keterangan-keterangan pihak *Kongres Taman Siswa seluruh Indonesia* pada h.b. 13 Agustus 1930 di Mataram, rapat mana telah memilih kami sebagai Majelis Luhur dari Taman Siswa;

d. setelah mempertimbangkan segala kepentingan;

menetapkan :

menerima penyerahan dari Ki Hajar Dewantara tersebut di atas dengan sepenuhnya perjanjian, penerimaan mana telah disahkan lebih dulu oleh Kongres tersebut pada hari bulan 7 Agustus 1930.

Mataram, 13 Agustus 1930

Tertanda:
1. Sadikin
2. S. Joyoprayitno
3. S. Mangunsarkoro
4. Puger
5. Kadirun
6. Safiudin Suryoputro.

Lampiran 3

WASITA RINI

(Lagu gending Asmaradana dengan senggakan)

1. *Jatine wasita rini, ing jaman kuna lan mangkya,*
   yakti tan anan bedane. Karone harsa rumeksa,
   marang para wanita, mrih suci miwah rahayu,
   lupute ing sambekala.
2. *Bedane ing jaman mangkin, kang aran jaman mardika,*
   saliring dumadi kabeh, suwala marang wasesa,
   tan karsa pinurbeng liyan. Mangkono estri tan purun,
   ginawe sakarsa-karsa.
3. *Elinga para pawestri, mardika iku jarwanya,*
   nora mung lepasing pangreh, nging uga kuat kuwasa,
   amandiri priyangga, wit saka iku den emut,
   wenang lan wajib tan pisah.
4. *Dene kang ingaran wajib, siyaga barang prakara,*
   miranti lair batine. Nuli we ange tumindak,
   ing reh sakarsanira, wit sira wus darbe traju,
   panimbang becik lan ala.
5. *Para wanita kang sami, marsudi ing kamardikan,*
   wajib weruh ing gatine, sujana lan kasarjanan,
   weh mardikaning gesang, dene kasusilan iku,
   pager rahayuning raga.

(Senggakan)

Heh pra kenya kang ulah mardikeng rara,
Haywa lali kalane lelangen pada,
Ing reh solah tingkah ywa lirweng susila.

Dalam Bahasa Indonesia :

1. Pokok ajaran kewanitaan, di jaman dulu dan sekarang,
   sungguh tak ada bedanya, keduanya hendak menjaga,
   para wanita, agar suci serta selamat,
   terhindar dari mara bahaya.
2. Bedanya di jaman ini, yang disebut jaman merdeka,
   segenap umat menentang kekuasaan,
   dan penguasa pihak lain. Begitulah orang wanita tak
   suka diperlakukan sekehendak orang lain.
3. Ingatlah para wanita, merdeka itu tidak hanya berarti
   lepas dari perintah orang lain, namun kuat dan mampu,
   untuk menguasai diri sendiri. Karenanya janganlah dilupakan,
   bahwa hak dan wajib tidak berpisahan.
4. Adapun yang disebut wajib, ialah segala kesiapan dan kesediaan,
   lahir dan batin. Barulah menysuul hak melaksanakan
   kehendak diri sendiri, karena kamu sudah mempuhyai neraca,
   untuk menimbang apa yang baik dan apa yang tidak baik.
5. Para wanita yang memelihara jiwa kemerdekaan,
   wajib mengetahui kepentingannya, kecerdasan rasa dan cipta,
   memberi kemerdekaan hidup, *adapun kesusilaan adalah pagar keselamatan bagi dirimu.*

(Ulangan)

Hai, para garis yang mencita-citakan kemerdekaan wanita.
Janganlah dilupakan di dalam kamu bersenang-senang.

Untuk tetap bersucilah dalam segala tingkah-lakumu.

Sumber :

"Wasita" Jilid I no. 3 Desember 1928.

atau

Kitab ke I *"Pola Wasita"*, Penerbit Majelis Perusahaan Kitab dari Persatuan Taman Siswa di Mataram – Yogyakarta, 1933, hal. 22.

KI HAJAR DEWANTARA

Perpustaka
Jenderal
92